PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE UTARA



LAKIP 2023

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA



www.konaweutarakab.go.id
konaweutarakab@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Alamat : Jl. Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Utara – Wanggudu

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Wanggudu, 15 Maret 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

AMRUN, S.P.,M.M.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19690911 200804 1 002

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (LAKIP) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 dapat tersusun dan terselesaikan tepat waktu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah Kabupaten Konawe Utara disusun dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP.

Laporan kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good Govermance*), mendorong peningkatan Pelayanan public dan mencegah praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Sekaligus menjadi wujud akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *out put* maupun *outcome*. Disisi lain, laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permaslaahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi instansi pemerintah sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Sebagai media akuntabilias kinerja, melalui laporan ini, dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2023 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

LAKIP Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 merupakan hasil kerja keras dari seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas kerja sama yang diberikan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai capaian program dan kegiatan. Selain itu, dengan tersusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi korektif bagi kami untuk melakukan perbaikan dalam menjalankan program dan kegiatan pada tahun mendatang, sehingga sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan target pembangunan daerah yang telah diamanatkan.

Wanggudu, 27 Maret 2024
Bupati Konawe Utara

H. RUKSAMIN



RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO TAHUN 2023

PERTUMBUHAN EKONOMI
TARGET : 5.58%
REALISASI : 5.03%
90.14%

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TARGET : 71.78
REALISASI : 72.11
101.45%

PDRB PERKAPITA
TARGET : 61.838 Rp Juta/Jiwa/Tahun
REALISASI : 72.390 Rp Juta/Jiwa/Tahun
117.06%

TINGKAT KEMISKINAN
TARGET : 13.14%
REALISASI : 13.48%
97.48%

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
TARGET : 3.66%
REALISASI : 2.76%
132.61%

INDEKS GINI
TARGET : 0.376
REALISASI : 0.378
99.47%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023



No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Daya saing dan Sumber Daya Manusia							
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71.078	72.11	101.45
		Meningkatnya Akses pendidkan	Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	9.79	9.60	98.06
			Harpan Lama Sekolah	Tahun	13.54	13.12	96.90
		Meningkstnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71.26	70.53	98.98
		Meningkatnya Kualitas hidup perempuan dan Pengarusutamaan hak anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	86.9	86.90	100.00
			Kota Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama	100.00
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan Produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	76.54	70.75	92.44
		Meningktanya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	82.56	84.30	102.11
		Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	Persen	11.55	10.17	113.57

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
Misi 2: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dasar dan sarana prasarana Kawasan Permukiman							
2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah		Persentase Keterhubungan /Konektifitas Wilayah	Persen	87.22	92.30	105.82
		Meningkatnya Kapasitas infrastruktur wilayah	Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap	Persen	86.36	89.52	103.66
			Persentase Daerah Irigasi (DI) yang terlayani Jaringan Irigasi	Persen	68.91	76.24	110.64
		Terpenuhinya Sarana prasaranan Kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman (Perkotaan/Perdesaan) yang tidak kumuh	Persentase	87.85	78.45	89.30
			Rasio Akses Air Minum Layak	Persen	61.54	87.90	142.83
			Rasio Akses Sanitasi Layak	Persen	56.62	82.74	146.13
			Cakupan Layanan Persampahan	Persen	25.13	15.38	61.20
Misi 3. Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumber daya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi							
3	Meningkatkan pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi		Peertumbuhan Ekonomi	Persen	5.58	5.03	90.14
			PDRB Perkapita	Rp Juta/Jiwa/ Tahun	61.838	72.390	117.06
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.66	2.76	132.61
			Indeks Gini	Indeks	0.376	0.378	99.47
			Tingkat Kemiskinan	Persen	13.14	13.48	97.48
		Menigkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	Persen	40.16	37.15	92.50
			Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian	Persen	21.39	24.81	115.99
			Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	Persen	11.85	12.13	102.36
			Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	1.15	0.80	69.57
			Presentase PAD Sektor Pariwisata	Persen	0.06	0.036	60.00
			Nilai Omset Usaha Koperasi	Rb Ribu	814,011	877,800	107.84
		Meningkatnya Invetasi Daerah	Pertumbuhan Investasi PMBDN dan PMA	Persen	16.74	32.09	191.69

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
MISI 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, mendorong Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Prima							
4	Meningkatkan Kualitas tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Inkdeks	50.57	51.24	101.32
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (70.01)	B (65.45)	93.49
			Opini BPK	Kategoriu	WTP	WTP	100.00
		Terwujudnya Birokrsi yang kapabel, optimalnya implementasi SPBE, Serta pelayanan public yang terpercaya	Indeks Maturitas Kelembagaan	Level	3	3	100.00
			Indeks SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1.54	2.10	136.36
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.55	1.61	45.35
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	Indeks	207	225	108.70
		Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.6128	0.6757	110.26
Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana							
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61.33	58.85	95.96
		Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaata ruang	Persentase ketaanat terhadap perencanaan tata ruang	Persen	81.47	82.26	100.97
		Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara	Indeks kualitas air dan Udara	Indeks	94.8	95.05	100.26
		Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana	Indeks resiko bencana	Indeks	167.33	169.73	98.59
Misi 6 : Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilkai nilai keagamaan dan kebudayaan lokal							
6	Melestarikan seni dan budaya local		Persentase kapasitas Lembaga ada yang dibina	Persen	100	100	100.00
		Meningkatnya Investasi event seni budaya yang diselenggarakan	Jumlah penyelenggaraan event seni budaya	Nilai	3	4	133.33
	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan beragama		Indeks kerukunan beragama	Indeks	75.03	75.50	100.63
		Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Persen	100	100	100.00
					RATA-RATA CAPAIAN		**103.75**

REALISASI ANGGARAN & EFISIENSI

Total Pagu :

Rp. 1.985.264.359.214,00

Total Realisasi :

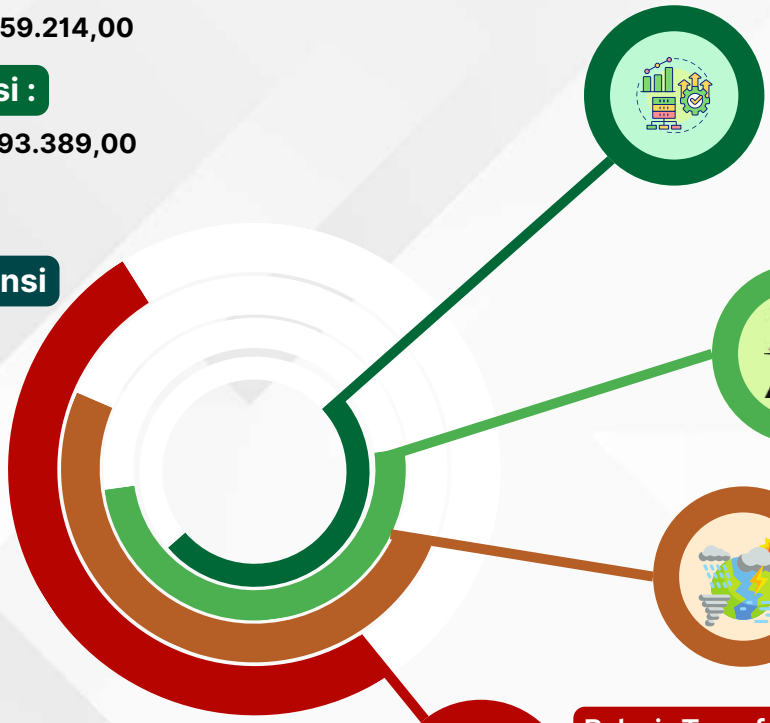
Rp. 1.754.746.593.389,00

88,39%

Tingkat Efisiensi Anggaran :

15.36

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN BELANJA



Belanja Operasi

Rp. 995.812.623.259,43
Rp. 879.140.953.135,00

88,28%

Belanja Modal

Rp. 760.360.231.416,57
Rp. 651.514.135.716,00

85,68%

Belanja Tak terduga

Rp. 5.000.000.000
Rp. 0

0%

Belanja Transfer

Rp. 224.091.504.538,00
Rp. 224.091.504.538,00

100%

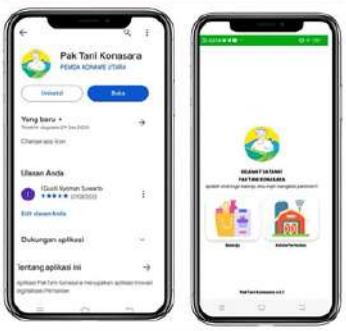
INOVASI UNGGULAN DAERAH

INOVASI BIDANG PENDIDIKAN



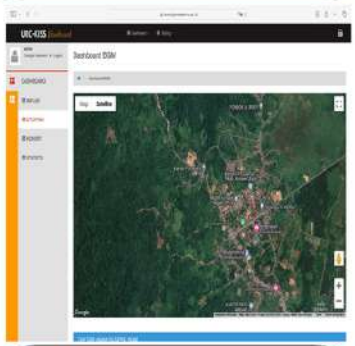
APLIKASI KONASARA SMART
Memudahkan pengajuan beasiswa untuk mahasiswa Konawe Utara menempuh Pendidikan di perguruan tinggi

INOVASI BIDANG PERTANIAN



APLIKASI PAK TANI KONASARA
Digitalisasi Program Pengembangan Kebun Pekarangan Konawe Utara dari Penanaman hingga pemasaran

INOVASI BIDANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PENGENDALIAN INFLASI



APLIKASI DASHBOARD PENGENDALIAN URC KISS
Pemantauan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Inflasi secara Real time dan Berbasis Koordinat

POTENSI STRATEGIS

1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Konawe Utara
2. Daya saing ekonomi daerah
3. Infrastruktur wilayah dan sarana prasarana kawasan permukiman
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
5. Kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam
6. Pembangunan kebudayaan dan kehidupan keagamaan masyarakat

PERMASALAHAN STRATEGIS

1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia;
2. Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan tidak berkualitas;
3. Belum terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah dan sarana parasarana kawasan permukiman;
4. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan mitigasi bencana alam;
6. Belum terwujudnya pembangunan kebudayaan dan kehidupan keagamaan masyarakat.

PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMDA KONAWE UTARA









DAFTAR ISI

Bab 1 Pendahuluan 01

Bab 2 Perencanaan Kinerja 19

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja 35

Bab 4 Penutup 115

Lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

SAKIP juga dapat diartikan sebagai rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dengan adanya sistem SAKIP dan LAKIP bergeser dari pemahaman "Berapa besardana yang telah dan akan dihabiskan" menjadi "*Berapa besar kinerja yang dihasilkan dankinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai*".

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) tahun 2023 ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja tahun sebelumnya, LAKIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Penyusunan LAKIP Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utaradalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LAKIP Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas,

fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LAKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.

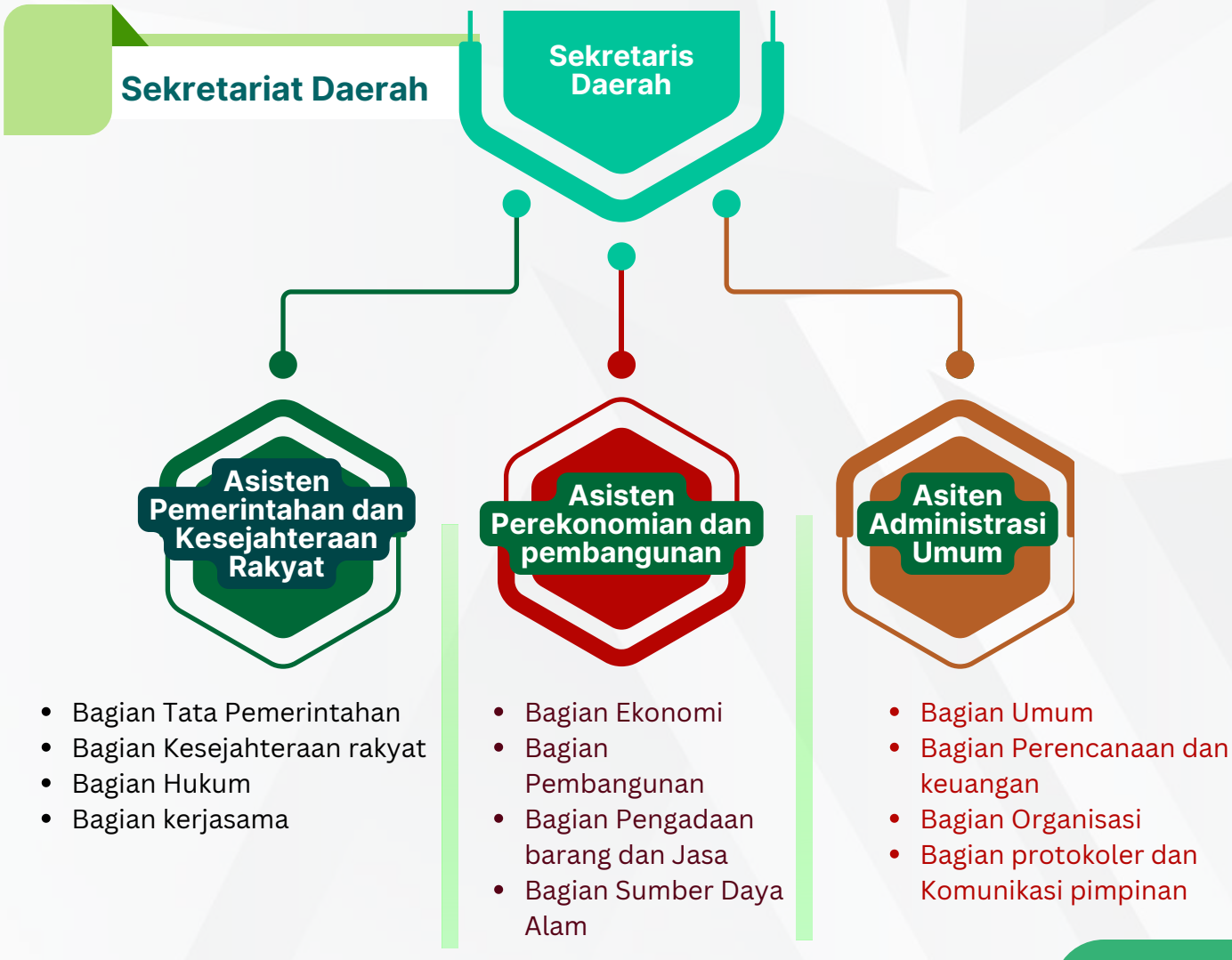
1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

1.2.1. Organisasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

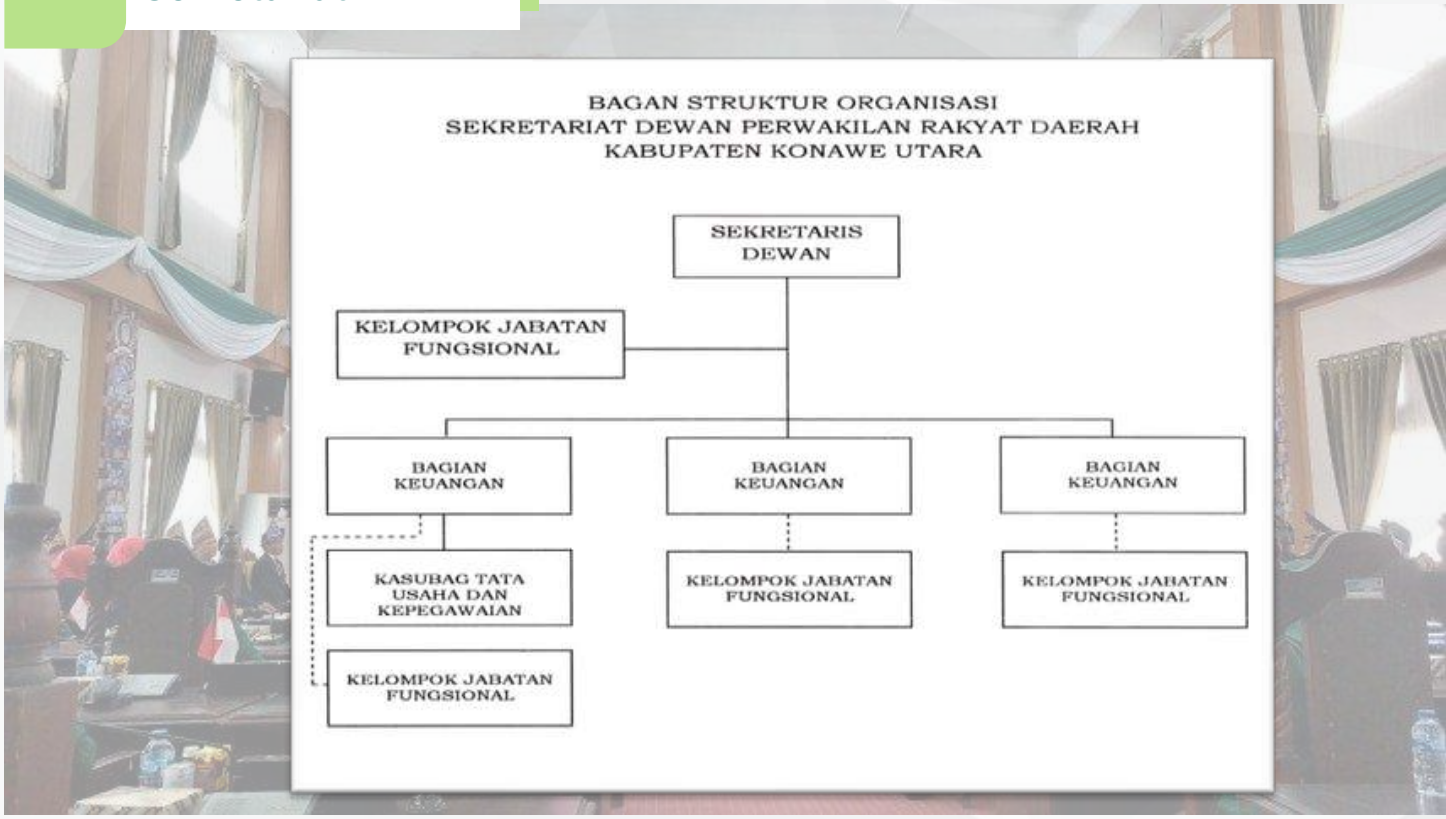
Organisasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara di bentuk berdasarkan beberapa Peraturan Daerah yaitu :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
- Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

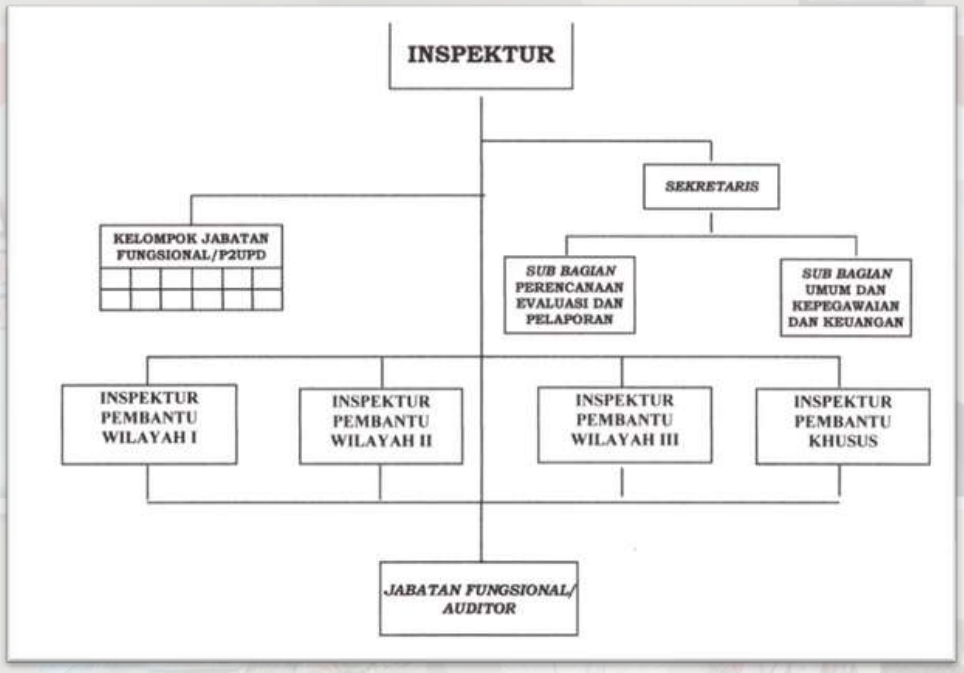
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara meliputi :



Sekretariat DPRD



Inspektorat Daerah



Dinas

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dinas Kesehatan
- Dinas PU dan Penataan Ruang
- Dinas Sosial
- Dinas Trasnmigrasi dan Tenaga Kerja
- Dinas PP dan PA
- Dinas PP dan KB
- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Dinas Perhubungan
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Dinas Koperasi, UMKM
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Dinas PM dan PTSP
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- Dinas Perpustakaan
- Dinas Perikanan
- Dinas Pariwisata
- Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
- Satuan Polisi dan Pamong Praja
- Dinas Pemadam dan Kebakaran
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Dinas Perkebunan

Badan

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Badan Kepegawiaan dan Pengembangan SDM
- Badan Keuangan dan Aset Daerah
- Badan Pendapatan Daerah
- Badan Penaguulangan Bencana Daerah
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kecamatan

- Kecamatan Motui
- Kecamatan Sawa
- Kecamatan Lembo
- Kecamatan Wawolesea
- Lecamatan Lasolo
- Kecamatan Molawe
- Kecamatan Andowia
- Kecamatan Asera
- Kecamatan Oheo
- Kecamatan Langgikima
- Kecamatan Landawe
- Kecamatan Wiwirano
- Kecamatan Lasolo Kepulauan







1.2.2. Kekuatan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Utara

Dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Konawe Utara didukung dengan kekuatan Sumber Daya Manusia yang handal dari berbagai disiplin ilmu. Pada Tahun 2023, Jumlah Aparatur Sipil Negara sebanyak 3.053 orang yang menempati eselon II-IV dari jenjang SD hingga Doktor (S3).

Jumlah Pegawai

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Konawe Utara per Desember 2023



Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	418	814	1.232
Fungsional Umum	577	663	1.240
Eselon V	-	-	-
Eselon IV	231	128	359
Eselon III	152	33	185
Eselon II	33	4	37
Eselon I	-	-	-
Jumlah/Total	1.411	1.642	3.053

Sumber Data : BPS, Kabupaten Konawe Utara dalam Angka Tahun 2024

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sampai dengan SD	1	-	1
SMP/Sederajat	2	1	3
SMA/Sederajat	78	39	117
Diploma I, II/Akta I, II	18	20	38
Diploma III/Akta III/ Sarjana Muda	69	158	227
Tingkat Sarjana/ Doktor/ Ph.D	1.243	1.424	2.667
Jumlah/Total	**1.411**	**1.642**	**3.053**

Sumber Data : BPS, Kabupaten Konawe Utara dalam Angka Tahun 2024

1.2.3. Tugas Pokok, dan Fungsi Kepala Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan kewenangan dalam Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan PA
3. Pangan
4. Pertahanan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi kependudukan dan Capil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan KB
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi dan UMKM
12. Kepemudaan dan Olahraga

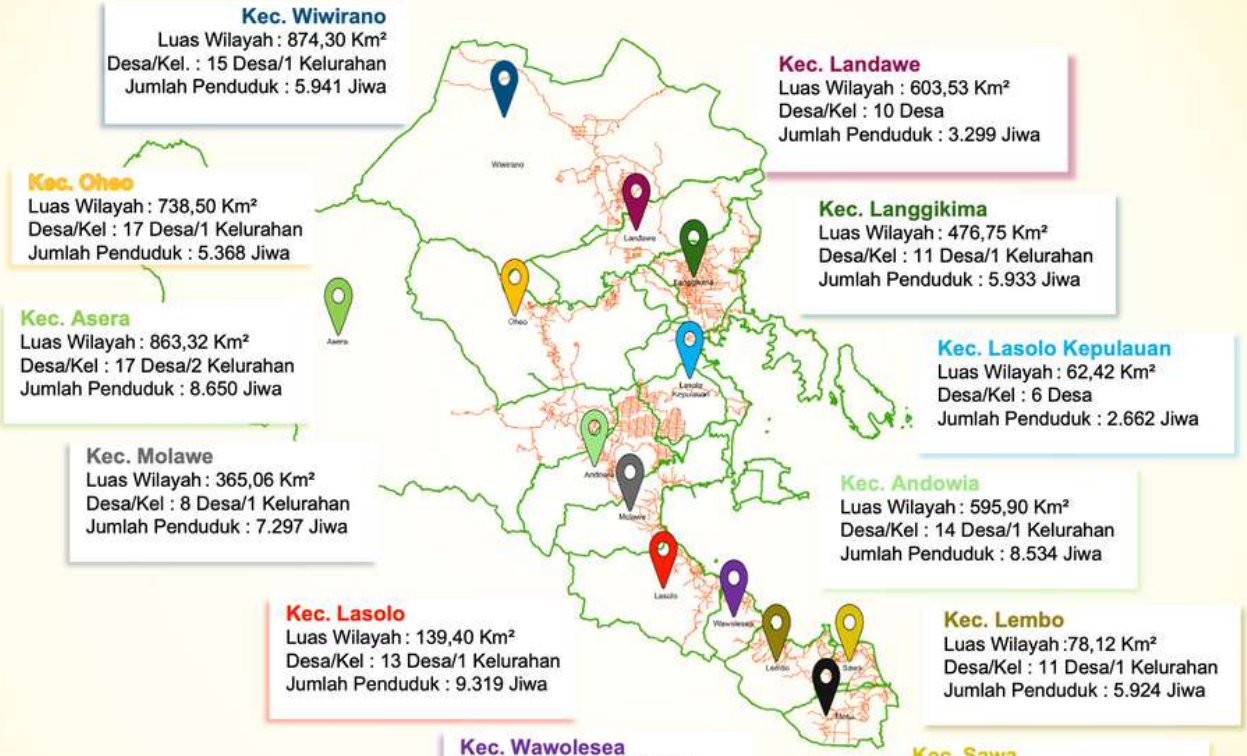
1.3. ASPEK STRATEGIS SERTA ISU STRATEGIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

1.3.1. Aspek Strategis Daerah Kabupaten Konawe Utara

1.3.1.1. Aspek Geografis dan Demografis Daerah

Ibukota Kabupaten :	Jumlah Penduduk :	Jumlah Kecamatan :	Jumlah Desa/Kel.:	Panjang Jalan :	APBD 2023 :
Wanggudu	Tahun 2023 72.250 Jiwa	13 Kecamatan	159 Desa 11 Kelurahan	699,94 Km	1,9 Triliun Rupiah

Secara geografis Kabupaten Konawe Utara terletak di bagian selatan Khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 02°97' dan 03°86' LS, membujur dari Barat ke Timur antara 121°49' dan 122°49' BT. Kabupaten Konawe Utara memiliki luas wilayah sebesar 5.0339 Km² atau sekitar 13,38 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.



Kec. Wiwirano
Luas Wilayah : 874,30 Km²
Desa/Kel. : 15 Desa/1 Kelurahan
Jumlah Penduduk : 5.941 Jiwa

Kec. Landawe
Luas Wilayah : 603,53 Km²
Desa/Kel : 10 Desa
Jumlah Penduduk : 3.299 Jiwa

Kec. Oheo
Luas Wilayah : 738,50 Km²
Desa/Kel : 17 Desa/1 Kelurahan
Jumlah Penduduk : 5.368 Jiwa

Kec. Langgikima
Luas Wilayah : 476,75 Km²
Desa/Kel : 11 Desa/1 Kelurahan
Jumlah Penduduk : 5.933 Jiwa

Kec. Asera
Luas Wilayah : 863,32 Km²
Desa/Kel : 17 Desa/2 Kelurahan
Jumlah Penduduk : 8.650 Jiwa

Kec. Lasolo Kepulauan
Luas Wilayah : 62,42 Km²
Desa/Kel : 6 Desa
Jumlah Penduduk : 2.662 Jiwa

Kec. Molawe
Luas Wilayah : 365,06 Km²
Desa/Kel : 8 Desa/1 Kelurahan
Jumlah Penduduk : 7.297 Jiwa

Kec. Andowia
Luas Wilayah : 595,90 Km²
Desa/Kel : 14 Desa/1 Kelurahan
Jumlah Penduduk : 8.534 Jiwa

Kec. Lasolo
Luas Wilayah : 139,40 Km²
Desa/Kel : 13 Desa/1 Kelurahan
Jumlah Penduduk : 9.319 Jiwa

Kec. Lembo
Luas Wilayah :78,12 Km²
Desa/Kel : 11 Desa/1 Kelurahan
Jumlah Penduduk : 5.924 Jiwa

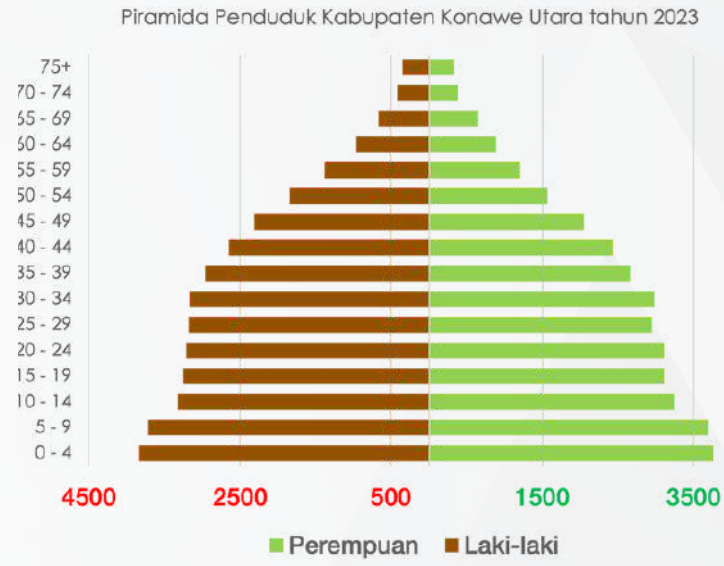
Kec. Wawolesea
Luas Wilayah : 149,40 Km²
Desa/Kel : 9 Desa
Jumlah Penduduk : 3.792 Jiwa

Kec. Sawa
Luas Wilayah : 93,76 Km²
Desa/Kel : 13 Desa/1 Kelurahan
Jumlah Penduduk : 4.995 Jiwa

Kec. Motui
Luas Wilayah : 61,30 Km²
Desa/Kel : 14 Desa/1 Kelurahan
Jumlah Penduduk : 5.677 Jiwa

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 sebanyak 70.314 jiwa yang terdiri dari 36.305 jiwa laki-laki dan 34.009 jiwa perempuan, dengan angka sex rasio jenis kelamin sebesar 106,75. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun di Kabupaten Konawe Utara sebesar 1,98 persen.





Piramida Penduduk Kabupaten Konawe Utara berbentuk piramida expansive. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk mudalebih tinggi atau lebih banyak dibandingkan penduduk tua. Artinya, angka kelahiran di wilayah tersebut tinggi, sedangkan angkakematian bayi rendah. Pemerintah Daerah masih fokus pada pengendalian jumlah penduduk dan memberikan pembinaan kepadapenduduk usia produktif.

1.3.1.2. Aspek Ekonomi Daerah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, dengan melalui pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak. Dimensi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup, dimensi pengetahuan diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dan dimensi hidup layak diukur melalui kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita.

Penghitungan IPM untuk dimensi pengetahuan menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Dimensi standar hidup layak menggunakan indikator Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita, sedangkan untuk menghitung dimensi kesehatan menggunakan indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). Metode agregasinya disempurnakan menjadi rata-rata geometrik. Ketidaktersediaan data PNB ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, digunakan proksi pengeluaran perkapita yang disesuaikan, dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Metode ini mulai diterapkan di Indonesia pada penghitungan IPM tahun 2014.

Berdasarkan hasil penghitungan IPM, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Konawe Utara menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih dibawah angka rata-rata provinsi dan nasional. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mulai dari 68,50 pada tahun 2018 hingga mencapai 72.11 pada tahun 2023, untuk ketiga kalinya termasuk dalam kategori tinggi (70 < IPM < 80). Tahun 2024 dan selanjutnya diharapkan dapat menembus target kategori sangat tinggi pada akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026. Hal ini dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara pada tahun-tahun mendatang harus terus memberikan dampak positif terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduk Kabupaten Konawe Utara.

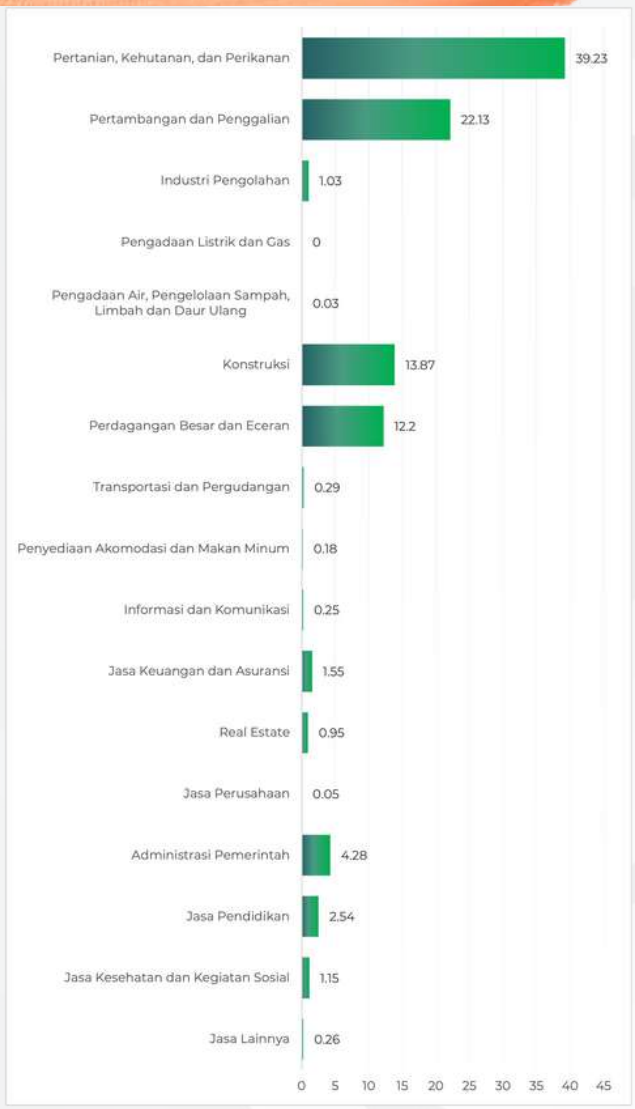
TAHUN	IPM KONAWE UTARA	IPM SULAWESI TENGGARA	IPM NASIONAL
2018	68,50	70,61	71,39
2019	69,22	71,20	71,92
2020	69,86	71,45	71,94
2021	70,23	71,66	72,29
2022	71,10	72,23	72,91
2023	72.11	72.94	74.39

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)



Sejalan dengan pulihnya ekonomi nasional dan Sulawesi Tenggara, Memasuki tahun 2021, perekonomian Kabupaten Konawe Utara mulai menunjukkan perubahan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mampu mencapai 4,59 persen dibanding tahun 2020. Adanya kebijakan mengizinkan kegiatan masyarakat mengakibatkan kegiatan ekonomi mulai berjalan sehingga pertumbuhan ekonomi mulai membaik.

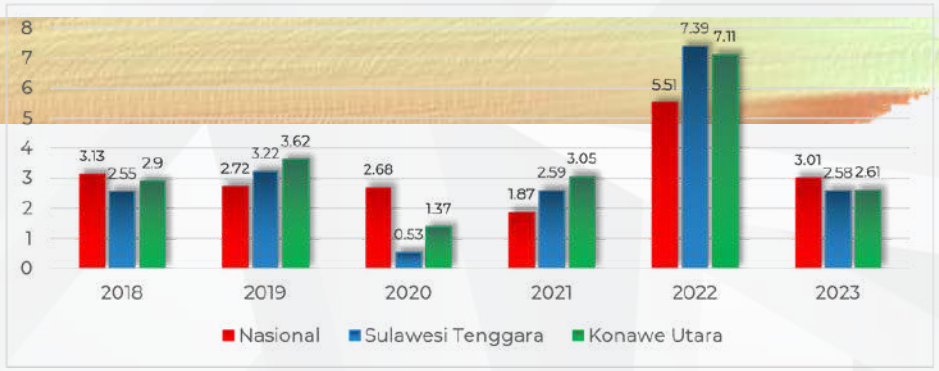
Memasuki tahun 2022 hingga 2023, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara pada terus mengalami trend peningkatan yang impresif. Ekonomi tumbuh sebesar 5,03 seiring dengan pertumbuhan sektor-sektor unggulan Kabupaten Konawe Utara. Capaian ini mendekati capain pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,04% (yoy).





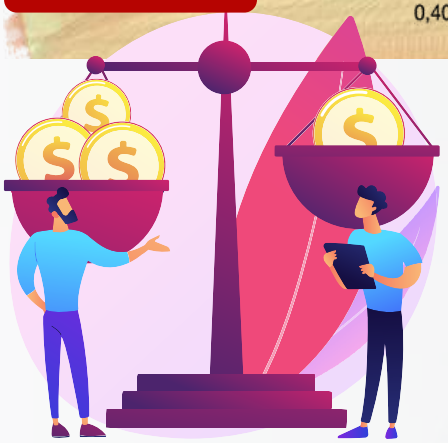
Laju Inflasi

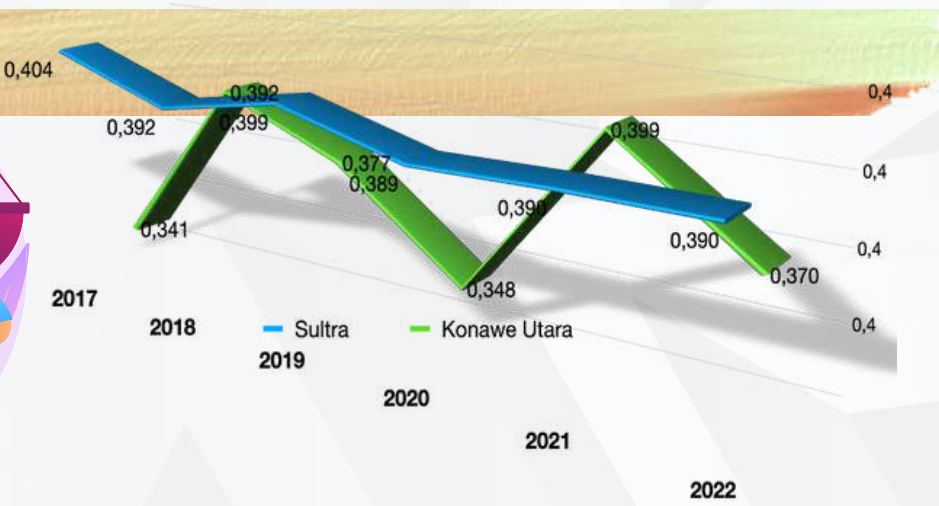




Inflasi di bawah 10% per tahun termasuk ke dalam kriteria inflasi ringan, yang mempunyai dampak positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik (meningkatkan pendapatan dan investasi). Keberhasilan ini dipengaruhi oleh strategi efektif yang dilakukan oleh Tim Pemantau dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Konawe Utara melalui; 1). Upaya menjaga keterjangkauan harga; 2). Menjaga ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok, cadangan pangan pemerintah daerah dan kelembagaan; 3). Mendorong kelancaran distribusi melalui kerja sama perdagangan antar daerah dan meningkatkan infrastruktur perdagangan; serta 4). Melakukan komunikasi efektif dengan perbaikan kualitas dan validitas data. Program Pengembangan Kebun Pekarangan (PPKP) yang telah berhasil dilaksanakan hingga Tahun 2022 salah satunya adalah penanaman cabai dan sayur-sayuran mampu menjadi penyetabil inflasi di Kabupaten Konawe Utara.

Koefesien Gini

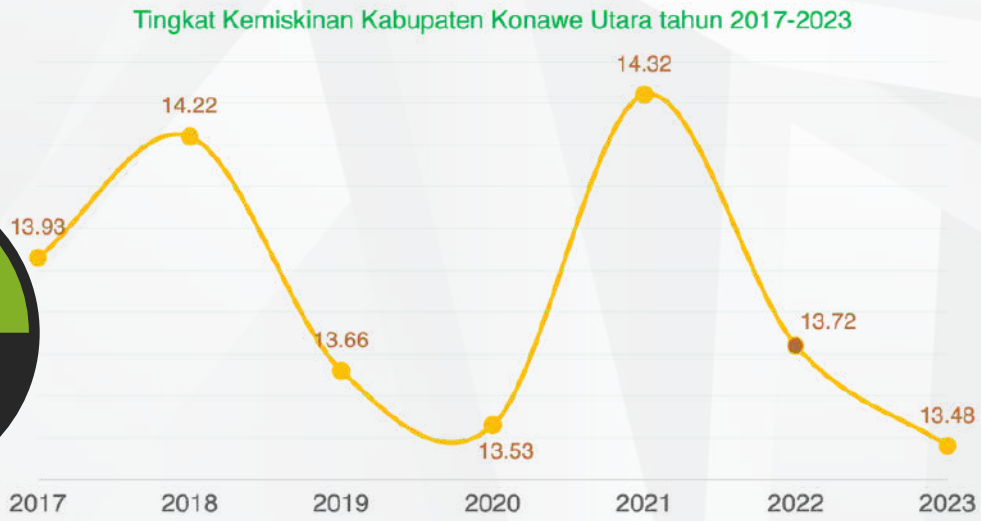




Indeks Gini Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2017-2023 mengalami perubahan yang fluktuatif. Secara keseluruhan, kecuali pada tahun 2017 yang mencapai 0,341 persen, maka ketimpangan di Kabupaten Konawe Utara masih termasuk dalam kriteria rendah. Indeks Gini sejak tahun 2022 masih berada pada posisi 0,370 persen lebih rendah dari indeks gini Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebesar 0,390. Indeks Gini di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 diharapkan bisa diturunkan dengan mendorong empat kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Konawe Utara, yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; lapangan usaha pertambangan dan penggalian; lapangan usaha penyediaan konstruksi; dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.

Tingkat Kemiskinan

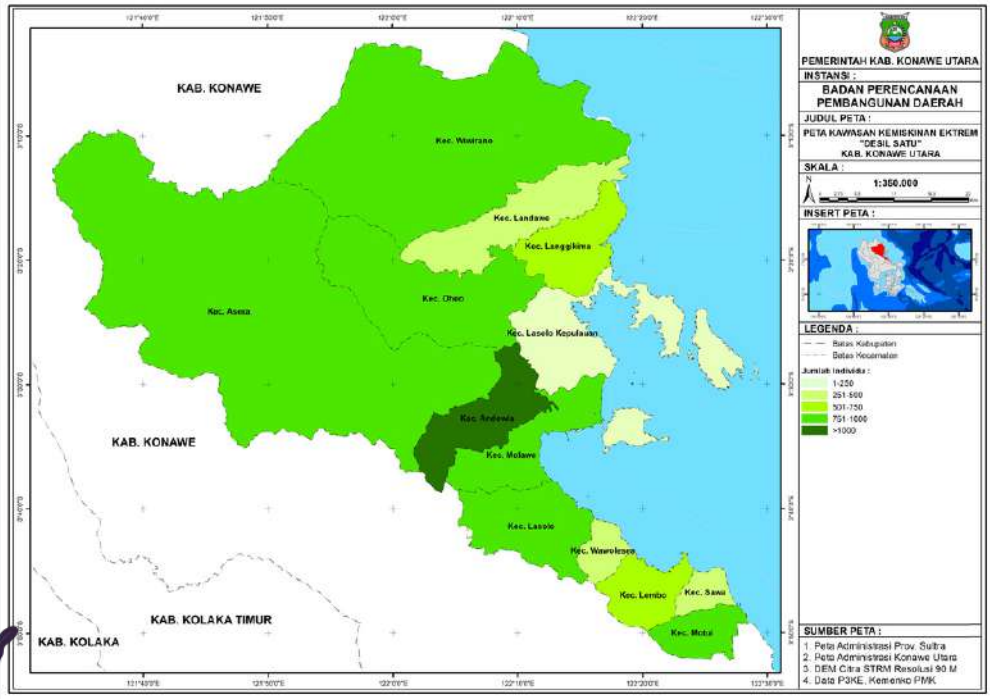




Dari tahun 2012 sampai dengan 2016 tingkat kemiskinan menunjukan kecenderungan menurun, kemudian mengalami peningkatan kembali menjadi 14,22% pada tahun 2017 dan menjadi sebesar 14,32% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 tingkat kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara kembali menurun menjadi 13,53%, kemudian meningkat kembali menjadi 14,32% pada tahun 2021. Di akhir tahun 2023, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 13,48 persen. Apabila dilihat dari garis kemiskinan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pengukuran dengan angka terakhir sebesar Rp. 381.620,- Hal ini menunjukkan pengeluaran penduduk miskin dan kesenjangan antara penduduk miskin belum mengalami perbaikan kualitas.

Pemetaan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Konawe Utara yang bersumber dari Data P3KE.





1.3.1.3. Aspek Strategis Pembangunan Kabupaten Konawe Utara

Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Konawe Utara.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah berdasarkan hasil identifikasi permasalahan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya permasalahan sektoral tersebut digabung menjadi satu rumusan masalah pembangunan di Kabupaten Konawe Utara. Suatu kebijakan pembangunan harus memiliki dasar rumusan permasalahan yang relevan sehingga kebijakan publik memiliki pertimbangan matang sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan yang baik akan menciptakan agenda utama pembangunan dan memberikan harapan baru bagi pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan pemerintahan, maka RPJMD tahun 2021-2026 dirumuskan menjadi lima permasalahan utama pembangunan Kabupaten Konawe Utara yaitu:



Keenam permasalahan utama tersebut menjadi pemicu utama belum maksimalnya pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Utara sehingga belum tercapainya kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

1.3.1.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara

Berangkat dari berbagai permasalahan daerah, isu internasional, isu nasional, isu regional dan amanat dalam RPJPD, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Konawe Utara melalui berbagai pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

SUMBER DAYA MANUSIA

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia berfokus pada:

- Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik secara merata di seluruh wilayah Kabupaten
- Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten
- Peningkatan kesehatan ibu dan anak.
- Mempromosikan budaya hidup sehat bagi semua segala usia.
- Mencapai kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak.
- Cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat

EKONOMI

Fokus Daya Saing Ekonomi Daerah

- Peningkatan Iklim Investasi Daerah
- Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran
- Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan dan perikanan melalui peningkatan kualitas benih akan menjadi prioritas, pemanfaatan teknologi, dan penciptaan inovasi bidang pertanian perkebunan dan perikanan;
- Mengembangkan nilai tambah (value added) melaui agroindustri komoditas unggulan yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan.
- Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk lokal berbasis online yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
- Penguatan ketahanan pangan melalui manajemen stok yang baik dan diversifikasi produk olahan sub sektor pertanian antara lain perikanan.
- Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan support bagi ekonomi masyarakat.
- Pengembangan pariwisata yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi bertumbuhkembangnya ekonomi lokal dan UMKM

INFRASTRUKTUR

Fokus Infrastruktur Wilayah dan Sarana Prasarana Kawasan Permukiman:

- Percepatan pengembangan jaringan jalan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara dan RDTR Kawasan Perkotaan Wanggudu.
- Pemantapan infrastruktur pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, Industri, perdagangan dan Jasa.
- Pengembangan saranan transportasi orang dan transportasi barang. - Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan dan aktivitas sosial ekonomi.
- Pengembangan sistem sanitasi yang terintegrasi untuk mewujudkan 100% terlayani sistem sanitasi.
- Penyediaan sarana prasarana umum (RTH, Landmark, Tempat Olah Raga, Balai Pertemuan, Tempat Ibadah, Pemakaman, dll) yang berkualitas dan merata.
- Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik.
- Pengembangan sistem sanitasi yang terintegrasi untuk mewujudkan 100% terlayani sistem sanitasi.
- Penyediaan sarana prasarana umum (RTH, Landmark, Tempat Olah Raga, Balai Pertemuan, Tempat Ibadah, Pemakaman, dll) yang berkualitas dan merata.
- Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik.



PEMERINTAHAN

Fokus Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik:

- Pengelolaan Pemerintahan yang Transparan, Bersih, dan Efektif
- Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Pengembangan kualitas ASN secara merit sistem.
- Pemantapan sistem informasi pemerintahan daerah yang transparan.

LINGKUNGAN HIDUP

Fokus Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana Alam

- Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.
- Pengurangan kerentanan bencana alam.
- Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana.
- Melatih dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana.

KEBUDAYAAN

Fokus Pembangunan Kebudayaan dan Kehidupan Keagamaan Masyarakat

- Kemajuan kebudayaan dengan membangun kapasitas kelembagaan masyarakat adat yang berkelanjutan (Lembaga Adat Tolaki, Lembaga Adat Bajo, Lembaga Adat Landawe, Lembaga Adat Culambatu, Lembaga Adat Muna Buton, Lembaga Adat Bugis - Makassar, Lembaga Adat Toraja, Lembaga Adat Jawa dan Sunda, Lembaga Adat Bali dan Lembaga Adat Flobamora) agar siap dipromosikan melalui pengembangan event budaya.



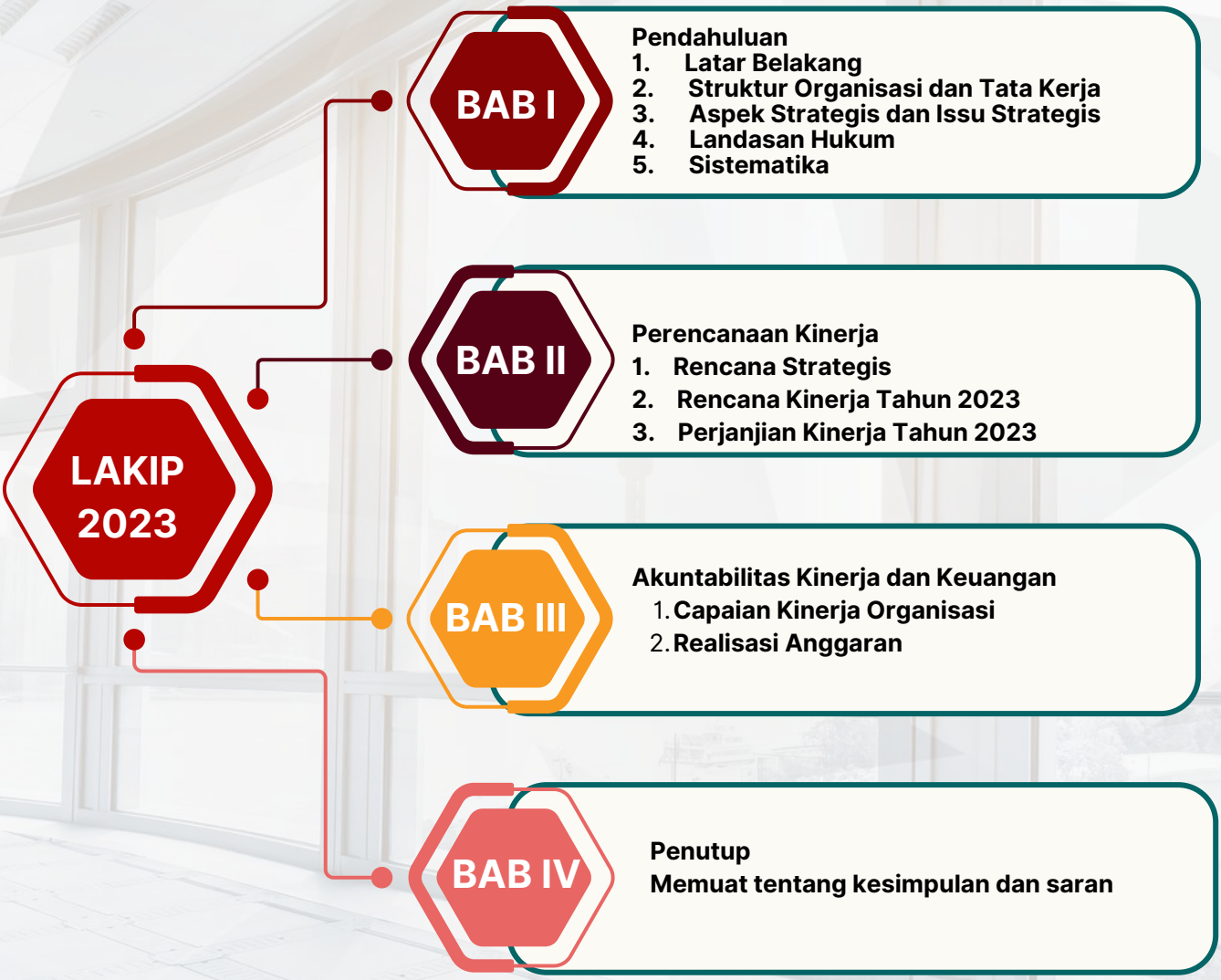
1.3.1.5. Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4689);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undangan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lemabran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan penglolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

1.3.1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.4.2. Sistematika Penulisan



BAB II
PERENCANAAN KINERJA



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangja menengah) yang menggambarkan Visi. Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan Daerah. RPJMD secara sistimatis mengedepankan isu isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026

.

Adapun visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah:



LEBIH SEJAHTERA



Konawe Utara merupakan salah satu Kabupaten yang terdiri dari daratan dan kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah di sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kelautan, Pertambangan dan Kehutanan seharusnya memiliki nilai tambah agar dapat memberikan kesejahteraan dan mendukung daya saing masyakat, sehingga memungkinkan terjadi kemandirian daerah. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya konkrit, sistematis dan lebih terfokus untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia melalui peningkatan nilai tambah, dalam upaya meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Periode 2021 – 2026, akan terus dilakukan upaya- upaya konkrit berupa peningkatan nilai tambah sumberdaya alam agar terwujud kesejahteraan, dan berdaya saing. Kesejahteraanmengandung makna keamanan dan keselamatan, kesenangan hidup dan kemakmuran. Sedang sejahtera yang merupakan kata dasar dari kesejahteraan mengandung makna aman sentosa dan makmur, selamat, terlepas dari segala kesukaran serta selamat tak kurang satu apapun.

BERDAYA SAING



dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetetif yang dimiliki Kabupaten Konawe Utara dalam mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas pada sektor ekonomi, sosial dan budaya untuk menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan daerah guna mensejahterakan masyarakat dan dalam mengembangkan lingkungan yang produktif bagi bisnis dan inovasi yang berkelanjutan.

Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan tahun 2023

MISI 1

1 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

1.1 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan

PRIORITAS :
- Peningkatan partisipasi pendidikan dan peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan melalui pendidikan karakter, peningkatan motivasi belajar, pemberian bantuan beasiswa bagi peserta didik, beasiswa KONASARA bagi pendidikan tinggi,
- Peningkatan sarana prasarana sekolah serta bahan ajar
- Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan wilayah

Arah Kebijakan Tahun 2023 : Peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi

1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

PRIORITAS :
- Peningkatan pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif).
- Penerapan hidup bersih dan sehat
- Pengendalian penyakit dan perbaikan status gizi masyarakat
- Perluasan jaminan kesehatan

Arah Kebijakan Tahun 2023 : Penguatan peran serta masyarakat dan keluarga secara aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat

1.3 Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak

PRIORITAS :
- Peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan perempuan, PUG, perlindungan perempuan, PUHA
- Meningkatkan pengendalian penduduk melalui intensifikasi program KB

Arah Kebijakan Tahun 2023 : Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan PUG dan PUHA serta penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan responsif anak

1.4 Meningkatnya Sumberdaya Manusia Yang Kompeten dan Produktif

PRIORITAS :
- Pelatihan tenaga kerja
- Perlindungan & pengawasan ketenagakerjaan

Arah Kebijakan Tahun 2023 : Perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka

1.5 Meningkatnya ketahanan pangan

PRIORITAS :
Penyediaan pangan dengan harga yang terjangkau dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan

Arah Kebijakan Tahun 2023 : Perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka

1.6 Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial

PRIORITAS :
Penurunan angka kemiskinan melalui program - program penanggulangan kemiskinan

Arah Kebijakan Tahun 2023 : Meningkatkan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha

Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan tahun 2023

MISI 2



2 MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH

2.1



Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah

PRIORITAS :

- Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan irigasi melalui pengembangan jaringan, pembangunan dan
- Penyediaan sarana prasarana perhubungan
- Percepatan pembangunan sarana prasarana kawasan perkotaan Wanggudu

Arah Kebijakan Tahun 2023 :

- Pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan kewenangan kabupaten dan jalan kawasan strategis
- Peningkatan sarana parasarana lalu lintas jalan dan pelabuhan/dermaga
- Pelaksanaan pembangunan jaringan jalan kawasan perkotaan Wanggudu

2.2



Terpenuhinya sarana parasarana kawasan permukiman

PRIORITAS :

- Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni dan jalan lingkungan permukiman
- Pembangunan dan rehailitasi rumah korban bencana
- Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, air limbah domestik, dan persampahan

Arah Kebijakan Tahun 2023 :

- Pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan kewenangan kabupaten dan jalan kawasan strategis
- Peningkatan sarana parasarana lalu lintas jalan dan pelabuhan/dermaga
- Pelaksanaan pembangunan jaringan jalan kawasan perkotaan Wanggudu
- Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
- Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, air limbah domestik, dan penanganan persampahan

Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan tahun 2023

MISI 3



3 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN DAYA SAING EKONOMI

3.1 Meningkatnya pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah



PRIORITAS :

- Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan bibit, sarana dan prasarana pertanian
- Peningkatan kapasitas petani/kelompok tani.
- Bantuan permodalan
- Pengembangan pertenakan melalui penyediaan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kesehatan hewan
- Meningkatkan produktivitas perikanan melalui pembinaan nelayan tangkap dan budidaya, penyediaan sarana prasarana, dan pengembangan pola kemitraan
- Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, promosi dan pemasaran
- Pengembangan kapasitas koperasi dan UMKM
- Mendorong pengembangan industri dan kawasan industri sesuai dengan potensi daerah
- Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan atraksi serta peningkatan destinasi wisata baru

Arah Kebijakan Tahun 2023 :

- Peningkatan pengelolaan sektor ekonomi unggulan daerah melalui peningkatan SDM, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi
- Peningkatan produksi peternakan untuk memenuhi komsumsi daerah dan kawasan industri
- Peningkatan pengelolaan sektor perikanan melalui pemberdayaan nelayan, akses permodalan, pemasaran dan daya saing produksi
- Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan dan peningkatan pemasaran produk unggulan daerah
- Penguatan kapasitas koperasi dalam memberikan akses permodalan bagi UMKM
- Fasilitasi pengembangan kawasan industri untuk penciptaaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi
- Peningkatan promosi daya tarik objek wisata serta pengembangan sarana prasarana

3.2 Meningkatnya investasi daerah



PRIORITAS :

- Peningkatan layanan perizinan, penyediaan informasi potensi dan peluang investasi
- Peningkatan kapasitas PERUMDA guna mendorong investasi berkualitas dengan melibatkan pengusaha lokal

Arah Kebijakan Tahun 2023 :

- Peningkatan iklim investasi daerah dan peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah

Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan tahun 2023

MISI 4

4

MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

4.1



Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah

PRIORITAS :

- Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan

Arah Kebijakan Tahun 2023 :

- Optimalisasi implementasi Reformasi Birokrasi

4.2



Terwujudnya birokrasi yang kapabel dan optimalnya implementasi SPBE, serta meningkatnya pelayanan publik yang terpercaya

PRIORITAS :

- Optimalisasi pengawasan intern, melalui peningkatan SDM APIP yang berkualitas dan peningkatan sistem pengawasan yang efektif
- Pengembangan sarana prasarana e-Gov untuk menunjang penerapan SPBE
- Peningkatan implementasi Satu Data
- Meningkatkan kinerja unit pelayanan informasi publik melalui penerapan SOP dan peningkatan SDM

Arah Kebijakan Tahun 2023 :

- Inovasi penerapan sistem pelayanan informasi publik

4.3



Meningkatnya kualitas manajemen ASN

PRIORITAS :

- Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan Sistem Merit dan penyesuaian jabatan fungsional

Arah Kebijakan Tahun 2023 :

- Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN

4.4



Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa

PRIORITAS :

- Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa, pengembangan BUMDes

Arah Kebijakan Tahun 2023 :

- Penguatan pemerintahan desa dan pengembangan potensi desa

Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan tahun 2023

MISI 5

5



MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

5.1



Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

PRIORITAS :
- Percepatan penetapan peraturan tentang rencana tata ruang

Arah Kebijakan Tahun 2023 :
- Peningkatan Pengendalian pemanfataan ruang

5.2



Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara

PRIORITAS :
- Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara, serta tertib hukum lingkungan

Arah Kebijakan Tahun 2023 :
- Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kapasitas daerah dalam implementasi PPLH

5.3



Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana

PRIORITAS :
- Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan (mitigasi, kesiapsiagaan, pra bencana), manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan

Arah Kebijakan Tahun 2023 :
- Pengurangan resiko bencana serta membangun komitmen bersama stakeholder PRB dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam PRB

Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan tahun 2023

MISI 6

6



MELESTARIKAN SENI BUDAYA LOKAL DAN MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG DILANDASI NILAI - NILAI KERUKUNAN BERAGAMA

6.1



Meningkatnya intensitas event seni budaya yang diselenggarakan

PRIORITAS :
- Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan event seni budaya

Arah Kebijakan Tahun 2023 :
- Peningkatan peran serta komunitas dan lembaga – lembaga adat dalam penyelenggaraan event seni dan budaya

6.2



Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial

PRIORITAS :
- Meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk antisipasi terhadap potensi konflik sosial di masyarakat

Arah Kebijakan Tahun 2023 :
- Peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan

6.3



Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama

PRIORITAS :
- Pembangunan dan rehabilitasi sarana keagamaan
- Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama
- Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial dalam kelompok keagamaan

Arah Kebijakan Tahun 2023 :
- Peningkatan kualitas pelayanan dan pehamanan agama serta kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan antarumat beragama

2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Perencanaan Kinerja setiap tahunnya mengacu pada RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026, termasuk indikator kinerja yang akan dijadikan acuan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026.

Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari Program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Tabel Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 - 2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumberdaya Manusia									
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia									
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,86	70,266	70,672	71,078	71,484	71,890	72,296	72,296
Sasaran 1 : Meningkatnya akses pendidikan									
2. Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	9,21	9,40	9,60	9,79	9,99	10,18	10,37	10,37
3. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,83	13,07	13,30	13,54	13,77	14,01	14,25	14,25
Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat									
4. Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,51	70,09	70,67	71,26	71,84	72,42	73,00	73,00
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan hak anak									
5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,17	86,41	86,66	86,90	87,14	87,39	87,63	87,63

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
6. Kota Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya
Sasaran 4 : Meningkatnya Sumberdaya Manusia Yang Kompeten dan Produktif									
7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	74,45	75,15	75,84	76,54	77,24	77,93	78,63	78,63
Sasaran 5 : Meningkatnya ketahanan pangan									
8. Skor Pola Pangan Harapan	Skor	79,60	80,52	81,53	82,56	83,56	84,58	85,58	85,58
Sasaran 6 : Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial									
9. Penurunan Persentase Warga Miskin (DTKS/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	Persen	13,53	12,87	12,21	11,55	10,23	9,57	9,57	9,57
Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman									
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas infrstruktur wilayah									
10. Persentase Keterhubungan/Konektivitas Wilayah	Persen	85,15	85,15	85,15	85,15	85,15	85,15	85,15	85,15
Sasaran 7 : Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah									
11. Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap	Persen	84,03	84,81	85,58	86,36	87,13	87,91	88,68	88,68
12. Persentase Daerah Irigasi (DI) Yang Terlayani Jaringan Irigasi	Persen	67,23	67,79	68,35	68,91	69,47	70,03	70,59	70,59
Sasaran 8 : Terpenuhinya sarana parasarana kawasan permukiman									
13. Persentase kawasan permukiman (Perkotaan/Perdesaan) yang tidak kumuh	Persen	78,45	81,58	84,72	87,85	90,99	94,12	97,26	97,26
14. Rasio Akses Air Minum Layak	Persen	48,33	56,86	56,86	56,86	56,86	56,86	68,79	68,79
15. Rasio Akses Sanitasi Layak	Persen	36,31	39,28	39,28	39,28	39,28	39,28	39,28	39,28
16. Cakupan layanan persampahan	Persen	15,38	18,63	21,88	25,13	28,38	31,63	34,88	34,88

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Misi 3 : Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi									
Tujuan 3 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi									
17. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,72	4,90	5,24	5,58	5,91	6,25	6,59	6,59
18. PDRB Perkapita	Rp. Juta/Jiwa /Tahun	60,8470	61,1776	61,5082	61,8388	62,1694	62,5000	62,8306	62,8306
19. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,79	3,75	3,70	3,66	3,62	3,58	3,53	3,53
20. Indeks Gini	Indeks	0,388	0,384	0,380	0,376	0,372	0,368	0,364	0,364
21. Tingkat Kemiskinan	Persen	13,53	13,40	13,27	13,14	13,01	12,88	12,75	12,75
Sasaran 9 : Meningkatnya pertumbuhan sektor - sektor unggulan daerah									
22. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	39,75	39,89	40,03	40,16	40,30	40,44	40,58	40,58
23. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian	Persen	21,24	21,29	21,34	21,39	21,44	21,49	21,54	21,54
24. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	11,78	11,80	11,82	11,85	11,87	11,89	11,91	11,91
25. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	1,13	1,14	1,15	1,15	1,16	1,17	1,18	1,18
26. Persentase PAD Sektor Pariwisata	Persen	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09
27. Nilai Omset Usaha Koperasi	Rp. ribu	705.375	741.587	777.799	814.011	850.223	886.435	922.647	922.647
Sasaran 10 : Meningkatnya investasi daerah									
28. Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA	Persen	11,86	13,49	15,12	16,74	18,37	20,00	21,63	21,63

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima									
Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien									
29. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50,08	50,24	50,40	50,57	50,73	50,89	51,05	51,05
Sasaran 11 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah									
30. Nilai SAKIP	Kategori	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
31. Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran 12 : Terwujudnya birokrasi yang kapabel, optimalnya implementasi SPBE, serta pelayanan publik yang terpercaya									
32. Indeks Maturitas Kelembagaan	Level	1	1	2	3	3	3	3	3
33. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,3	1,38	1,46	1,54	1,62	1,70	1,78	1,78
34. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,34	3,41	3,48	3,55	3,62	3,69	3,76	3,76
Sasaran 13 : Meningkatnya kualitas manajemen ASN									
35. Indeks Merit System	Indeks	162	177	192	207	222	237	252	252
Sasaran 14 : Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa									
36. Indeks Desa Membangun	Indeks	0,5855	0,5946	0,6037	0,6128	0,6218	0,6309	0,6400	0,6400
Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana									
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
37. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,84	59,67	60,50	61,33	62,16	62,99	63,82	63,82
Sasaran 15 : Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang									
38. Persentase Ketaatan terhadap Perencanaan Tata Ruang	Persen	80	80,49	80,98	81,47	81,96	82,45	82,94	82,94
Sasaran 16 : Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara									
39. Indeks Kualitas Air dan Udara	Indeks	92,58	93,32	94,06	94,80	95,54	96,28	97,02	97,02
Sasaran 17 : Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana									
40. Indeks Resiko Bencana	Indeks	172,4	170,71	169,02	167,33	165,64	163,95	162,26	162,26

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Misi 6 : Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan lokal									
Tujuan 6 : Melestarikan seni budaya lokal									
41. Persentase kapasitas lembaga adat yang dibina	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Sasaran 18 : Meningkatnya intensitas event seni budaya yang diselenggarakan									
42. Jumlah penyelenggaraan event seni budaya	Event	0	1	2	3	4	5	5	5
Sasaran 18 : Meningkatnya intensitas event seni budaya yang diselenggarakan									
43. Indeks kerukunan beragama	Indeks	73,92	74,29	74,66	75,03	75,40	75,77	76,14	76,14
Sasaran 19 : Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial									
44. Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026



Pada Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, dengan target kinerja yang dijadikan acuan adalah pada tahun ketiga target capaian dalam Indikator Kinerja Utama 2021-2026. Tentunya, target yang ditetapkan pada tahun 2023 juga mempertimbangkan capaian kinerja pada Tahun 2022, dengan melihat apakah capaian 2022 telah tercapai/tidak sehingga hasil dari laporan kinerja tahun sebelumnya menjadi pertimbangan dalam menentukan target tahun selanjutnya.

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kerja yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun anggaran, berdasarkan rencana strategis, kemapuan APBD dan kemampuan sumber daya lainnya. Tujuan dilakukan penetapan kinerja yaitu:



TUJUAN UMUM

Tujan umum ditetapkannya penetapan kinerja adalah intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel



TUJUAN KHUSUS

Tujuan khusus adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komponen pemerintah Bersama jajaran Sataun Kerja, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi

Adapun isi Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2023 sesuai dalam Lampiran Laporan ini adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Daya saing dan Sumber Daya Manusia					
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,078
1.1.1		Meningkatnya Akses pendidikan	Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	9.79
			Harpan Lama Sekolah	Tahun	13,54
1.1.2		Meningkstnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,26
1.1.3		Meningkatnya Kualitas hidup perempuan dan Pengarusutamaan hak anak	Indeks Pembanguna Gender	Indeks	86,90
			Kota Layak Anak	Kategori	Pratama
1.1.4		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan Produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	76,54
1.1.5		Meningktanya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	82,56
1.1.6		Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	Persen	11,55
Misi 2: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dasar dan sarana prasarana Kawasan Permukiman					
2.2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah		Persentase Keterhubungan /Konektifitas Wilayah	Persen	87,22
2.2.7		Meningkatnya Kapasitas infrastruktur wilayah	Proporsi Panjang Jalan dan Jemabatan Dalam Kondisi Mantap	Persen	86,36
			Persentase Daerah Irigasi (DI) yang terlayani Jaringan Irigasi	Persen	68,91
2.2.8		Terpenuhinya Sarana prasaranan Kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman (Perkotaan/Perdesaan) yang tidak kumuh	Persentase	87,85
			Rasio Akses Air Minum Layak	Persen	61,54
			Rasio Akses Sanitasi Layak	Persen	56,62
			Cakupan Layanan Persampahan	Persen	25,13
Misi 3. Mewujudkan keadilan social dan nilai tambah dalam pengelolaan sumber daya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi					
3.3	Meningkatkan pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi		Peertumbuhan Ekonomi	Persen	5,58
			PDRB Perkapita	Rp Juta/Jiwa/Tahun	61,838
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,66
			Indeks Gini	Indeks	0,376
			Tingkat Kemiskina	Persen	13,14
3.3.9		Menigkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektro Pertanian, kehutanan dan Peikanan	Persen	40,16
			Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian	Persen	21,39
			Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	Persen	11,85
			Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	1,15
			Presnetase PAD Sektor Pariwisata	Persen	0,06
			Nilai Omset Usaha Koperasi	Rb Ribu	814,011
3.3.10		Meningkatnya Invetasi Daerah	Pertumbuhan Investasi PMBDN dan PMA	Persen	16,74

MISI 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, mendorong Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Prima					
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4.4	Meningkatkan Kualitas tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Inkdeks	50,57
4.4.11		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai SAKIP	Kategori	BB
			OPINI BPK	Kategoriu	WTP
4.4.12		Terwujudnya Birokrsi yang kapabel, optimalnya implementasi SPBE, Serta pelayanan public yang terpercaya	Indeks Maturitas kelembagaan	Level	3
			Indeks SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,54
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,55
4.4.13		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	Indeks	207
		Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6128
Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana					
5.5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,33
		Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaata ruang	Persentase ketaatan terhadap perencanaan ruang	Persen	81,47
		Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara	Indeks kualitas air dan Udara	Indeks	94,80
		Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana	Indeks resiko bencana	Indeks	167,33
Misi 6 : Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilkai nilai keagamaan dan kebudayaan local					
6.6	Melestarikan seni dan budaya local		Persentase kapasitas Lembaga ada yang dibina	Persen	100
		Meningkatnya Investasi event seni budaya yang diselenggarakan	Jumlah penyelenggaraan event seni budaya	Nilai	3
6.7	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan beragama		Indeks kerukuna beragama	Indeks	75,03
6.7.19		Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Persen	100

Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023



Rp. 1.611.095.336.283

118 Program

670 Kegiatan

2.458 Sub Kegiatan

Sumber : Perjanjian Kinerja Bupati Konawe Utara tahun 2023

BAB III
AKUNTABLILITAS KINERJA



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dimaksudkan untuk menilai, menganalisa dan menginformasikan mengenai hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga untuk menjelaskan tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja yang dicapai instansi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Untuk meyakinkan bahwa kinerja, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dari waktu kewaktu menunjukkan peningkatan sehingga memudahkan untuk menilai apakah berhasil atau tidak berhasil

3.1.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DI BANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

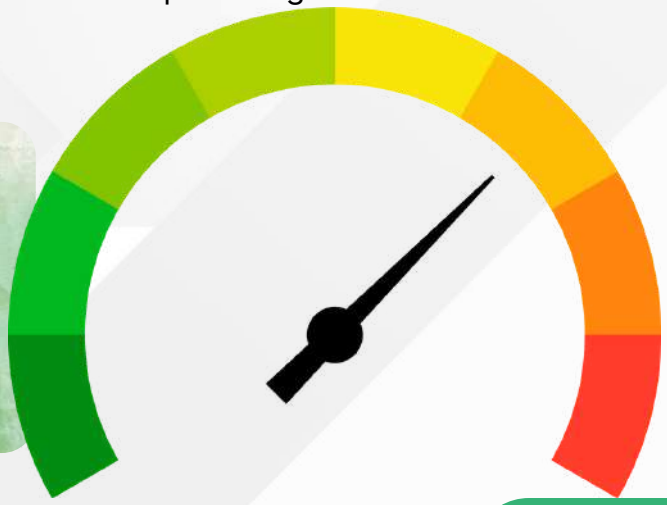
Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara menganalisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- > 95% - 100% : **Sangat Berhasil**
- > 80% - 95% : **Berhasil**
- > 50% - 80% **Cukup Berhasil**
- <50% : **Kurang Berhasil**

Pengukuran kinerja perlu dilakukan agar kita dapat mengetahui capaian sasaran strategis dan digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah yang mencangkup penilaian pencapaian target sasaran dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026. Capaian kinerja sasaran diukur dari capaian beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah kabupaten Konawe Utara Tahun 2023.

Program dan Kegiatan pada tiap Organisasi Perangkat Daerah merupakan aksi nyata didalam mewujudkan sasaran dan tahap pertama pembangunan sehingga keberhasilan capaian kinerja pada setiap program maupun kegiatan akan berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada capaian kinerja tiap-tiap sasaran pembangunan.

Dari 39 Indikator kinerja yang mendukung 19 sasaran Straegis, ada indikator kinerja sasaran telah yang mencapai target bahkan ada juga yang melebihi target atau cukup berhasil, berhasil, sangat berhasil dan ada beberapa indikator kinerja sasaran yang belum mencapai target atau tidak berhasil.



Ringkasan Capaian Tujuan

Tujuan 1
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

terdiri dari 6 (enam) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja. Adapun Indikator Kinerja yang sangat berhasil atau melebihi target diantaranya: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan realisasi kinerja sebesar 72,11% dan capaian kinerja 101,44%. Sedangkan indikator yang masih dianggap belum memenuhi target yang ditetapkan adalah Rata-Rata Lama Sekolah dengan realisasi kinerja sebesar 9,6% dan capaian kinerja 98,06%

terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja. Adapun Indikator Kinerja yang sangat berhasil atau melebihi target diantaranya: Persentase Keterhubungan/Konektifitas Wilayah dengan realisasi indikator kinerja sebesar 92,3 % dan capaian kinerja 105,82%.

Tujuan 2
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Tujuan 3
Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja dimana dua indiaktor tersebut melebihi target yaitu Nilai Omset Usaha Koperasi dengan capaian kinerja 107,84% dan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan capaian kinerja 102,36% sehingga dinilai cukup Berhasil.

Ringkasan Capaian Tujuan

Tujuan 4
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) Indikator Kinerja tersebut melebihi target yaitu Indeks Merit Sistem dengan capaian kinerja 108,7% dan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi mencapai capaian kinerja 101,32% walaupun mengalami penurunan nilai pada tahun sebeblumnya tetapi dinilai cukup berhasil. Sedangakan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dianggap menurun menjadi 45,35% yang belum melalmpaui target yang telah ditetapkan.

terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja dimana indiaktor Indeks Kualitas Air dan Udara melebihi target dengan capaian kinerja 100,26% dan Indikator Kinerja Indeks Resiko Bencana dengan capaian kinerja 98,59% sehingga dinilai cukup Berhasil.

Tujuan 5
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan 6
Melestarikan Seni dan Budaya Lokal

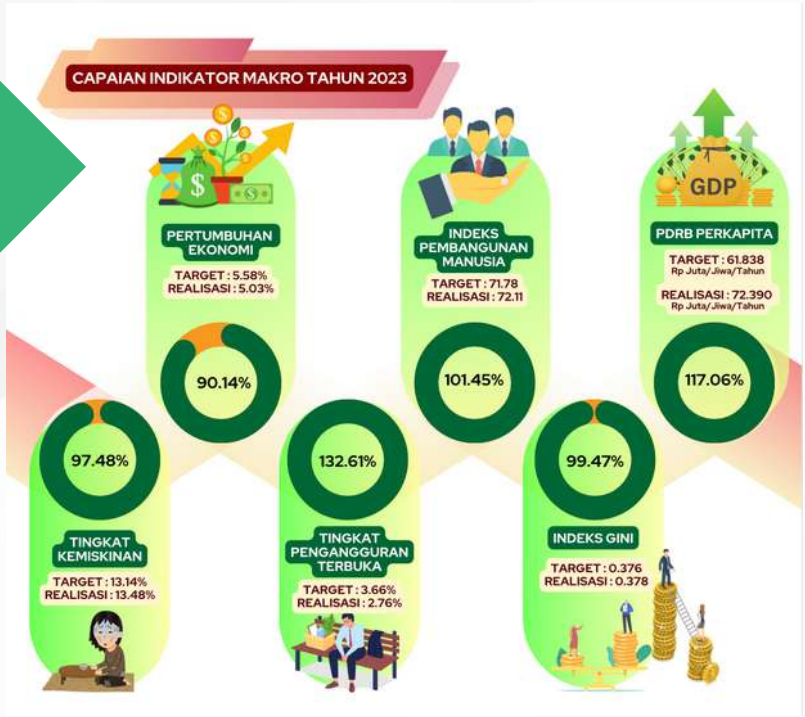
terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Indeks Kerukunan Beragama dengan capaian kinerja 100,63% dan indikator kinerja Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial mencapai capaian kinerja 100 % sehingga dinilai cukup berhasil.

Hal ini disebabkan karena adanya penyusunan program dan kegiatan yang memadai untuk meningkatkan indeks kerukunan umat beragama serta adanya upaya yang diambil untuk mengurangi keterhambatan program tersebut adalah menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda serta memeberikan pendidkan politik bagi masyarakat agar tidak mudah terpecah belah serta mendampingi dan mefasilitasi forum umat Bergama di Kabupaten Konawe Utara

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Makro

Capaian IKU 2023



No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Daya saing dan Sumber Daya Manusia							
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71.078	72.11	101.45
		Meningkatnya Akses pendidkan	Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	9.79	9.60	98.06
			Harpan Lama Sekolah	Tahun	13.54	13.12	96.90
		Meningkstnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71.26	70.53	98.98
		Meningkatnya Kualitas hidup perempuan dan Pengarusutamaan hak anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	86.9	86.90	100.00
			Kota Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama	100.00
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan Produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	76.54	70.75	92.44
		Meningktanya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	82.56	84.30	102.11
		Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	Persen	11.55	10.17	113.57

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
Misi 2: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dasar dan sarana prasarana Kawasan Permukiman							
2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah		Persentase Keterhubungan /Konektifitas Wilayah	Persen	87.22	92.30	105.82
		Meningkatnya Kapasitas infrastruktur wilayah	Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap	Persen	86.36	89.52	103.66
			Persentase Daerah Irigasi (DI) yang terlayani Jaringan Irigasi	Persen	68.91	76.24	110.64
		Terpenuhinya Sarana prasaranan Kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman (Perkotaan/Perdesaan) yang tidak kumuh	Persentase	87.85	78.45	89.30
			Rasio Akses Air Minum Layak	Persen	61.54	87.90	142.83
			Rasio Akses Sanitasi Layak	Persen	56.62	82.74	146.13
			Cakupan Layanan Persampahan	Persen	25.13	15.38	61.20
Misi 3. Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumber daya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi							
3	Meningkatkan pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi		Peertumbuhan Ekonomi	Persen	5.58	5.03	90.14
			PDRB Perkapita	Rp Juta/Jiwa/ Tahun	61.838	72.390	117.06
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.66	2.76	132.61
			Indeks Gini	Indeks	0.376	0.378	99.47
			Tingkat Kemiskinan	Persen	13.14	13.48	97.48
		Menigkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	Persen	40.16	37.15	92.50
			Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian	Persen	21.39	24.81	115.99
			Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	Persen	11.85	12.13	102.36
			Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	1.15	0.80	69.57
			Presentase PAD Sektor Pariwisata	Persen	0.06	0.036	60.00
			Nilai Omset Usaha Koperasi	Rb Ribu	814,011	877,800	107.84
		Meningkatnya Invetasi Daerah	Pertumbuhan Investasi PMBDN dan PMA	Persen	16.74	32.09	191.69

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
MISI 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, mendorong Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Prima							
4	Meningkatkan Kualitas tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Inkdeks	50.57	51.24	101.32
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (70.01)	B (65.45)	93.49
			Opini BPK	Kategoriu	WTP	WTP	100.00
		Terwujudnya Birokrsi yang kapabel, optimalnya implementasi SPBE, Serta pelayanan public yang terpercaya	Indeks Maturitas Kelembagaan	Level	3	3	100.00
			Indeks SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1.54	2.10	136.36
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.55	1.61	45.35
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	Indeks	207	225	108.70
		Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.6128	0.6757	110.26
Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana							
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61.33	58.85	95.96
		Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaata ruang	Persentase ketaanat terhadap perencanaan tata ruang	Persen	81.47	82.26	100.97
		Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara	Indeks kualitas air dan Udara	Indeks	94.8	95.05	100.26
		Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana	Indeks resiko bencana	Indeks	167.33	169.73	98.59
Misi 6 : Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilkai nilai keagamaan dan kebudayaan lokal							
6	Melestarikan seni dan budaya local		Persentase kapasitas Lembaga ada yang dibina	Persen	100	100	100.00
		Meningkatnya Investasi event seni budaya yang diselenggarakan	Jumlah penyelenggaraan event seni budaya	Nilai	3	4	133.33
	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan beragama		Indeks kerukunan beragama	Indeks	75.03	75.50	100.63
		Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Persen	100	100	100.00
					RATA-RATA CAPAIAN		**103.75**

3.1.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2023

PENGUKURAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA DAN TERGET AKHIR RPJMD

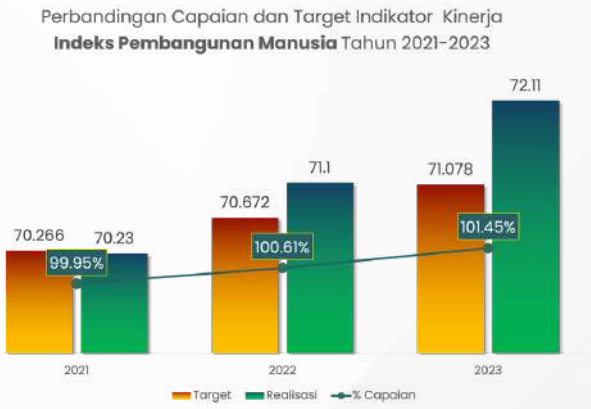
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBERDAYA MANUSIA

Tujuan 1 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

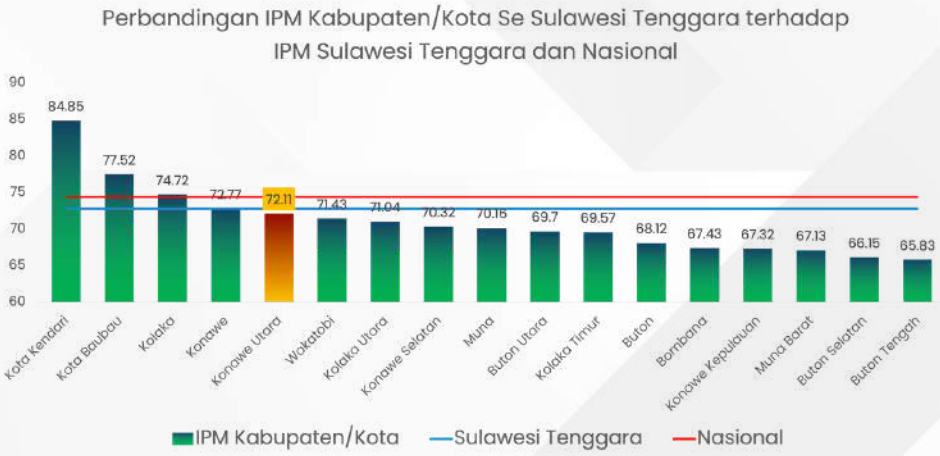
IKU-1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

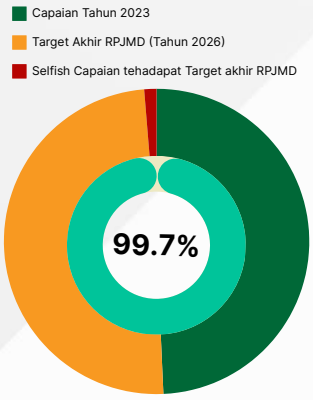
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungan yaitu umur Panjang dan hidup sehat diukur dengan angka harapan hidup saat lahir, pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata rata lama sekolah serta standar hidup layak yang dihitung dari pengetahuan perkapita.

Selama 3 Tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan diperoleh realisasi tahun 2021 sebesar 70,23, tahun 2022 sebesar 71,10% dan pada tahun 2023 sebesar 72,11% dari target 71,078% sehingga capaian kinerja indikator mencapai 101,44% dengan kategori Sangat Baik. **IPM Kabupaten Konawe Utara pada tahun ini menempati urutan ke-5** tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan terjadi peningkatan sebesar 1,88%.



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, Indeks Pembangunan Manusia sudah hampir mencapai target akhir tahun 2026. Tahun 2022 hingga 2023 capaian konsisten di atas target tahunan.





Berdasarkan hasil penghitungan IPM, dapat dilihat bahwa **selama tiga tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Konawe Utara menunjukkan perkembangan yang positif, namun masih dibawah angka rata-rata provinsi dan nasional**. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mulai dari 68,50 pada tahun 2018 hingga mencapai 72.11 pada tahun 2023, untuk ketiga kalinya termasuk dalam kategori tinggi (70 < IPM < 80). Tahun 2022 dan selanjutnya diharapkan dapat menembus target kategori sangat tinggi pada akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026. Hal ini dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara pada tahun-tahun mendatang harus terus memberikan dampak positif terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduk Kabupaten Konawe Utara.

IPM Kabupaten Konawe Utara masih dapat ditingkatkan antara lain dengan **peningkatan laju pertumbuhan indeks kesehatan** yaitu lebih mengutamakan perbaikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kemudahan akses sarana kesehatan yang tersedia, penggunaan air bersih, keberadaan fasilitas MCK penduduk dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal penduduk; **peningkatan laju pertumbuhan indeks pengetahuan yaitu dengan meningkatkan partisipasi sekolah** penduduk melalui upaya semua anak usia sekolah (SD-SLTP) bisa bersekolah dan tidak putus sekolah; **peningkatan laju pertumbuhan indeks pengeluaran dengan meningkatkan daya beli penduduk melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita**, **membuka lapangan usaha baru, dan adanya program bantuan sosial pemerintah** seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dll.



Upaya yang dilakukan

- Penambahan jumlah pendidik dan tenaga pendidik
- Perbaikan sarana dan prasarana
- Pemberian Beasiswa dari Jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tingga (Beasiswa Konasara)



Masalah yang dihadapi

- Distribusi pendidik yang tidak merata
- Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan



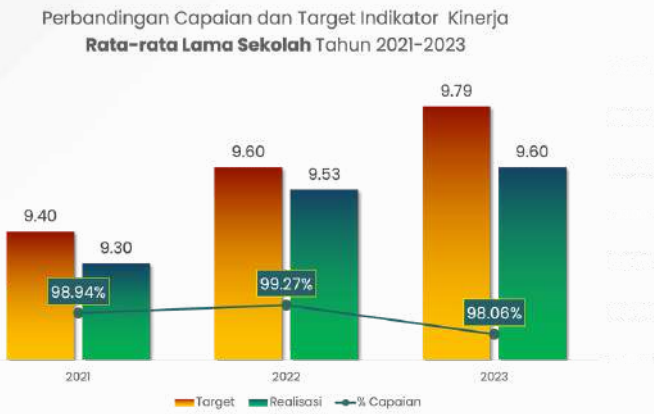
Solusi

- Penambahan jumlah guru di Kabupaten Konawe Utara agar mancapai rasio ideal antara guru dan sekolah serta guru dan murid,
- Sistem manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu menjamin terdistribusinya jumlah guru yang memenuhi angka rasio ideal di setiap Kecamatan yang ada.
- Kegiatan yang mampu meningkatkan kompetensi guru.

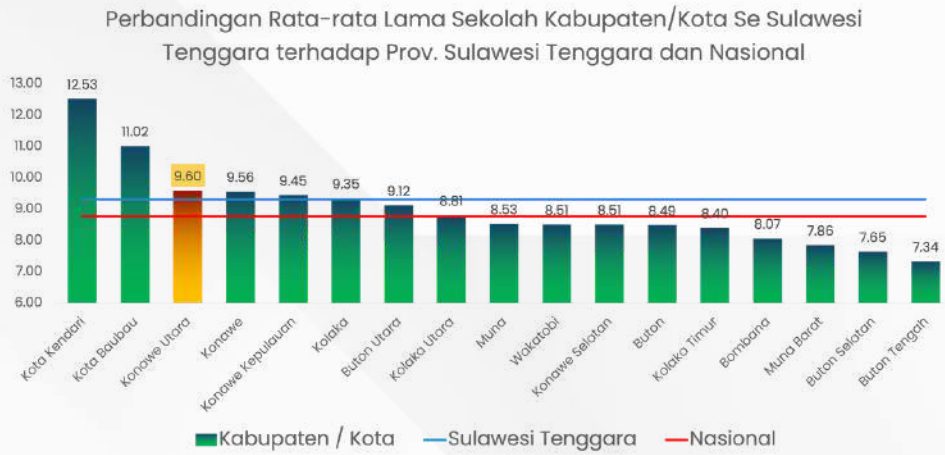
Sasaran 1 **MENINGKATNYA AKSES PENDIDIKAN**

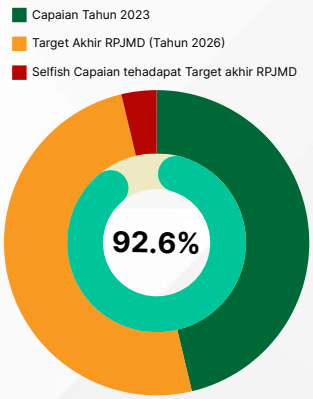
IKU-2 **RATA - RATA LAMA SEKOLAH**

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Konawe Utara terus mengalami peningkatan, dari 9,30 tahun pada tahun 2021 menjadi 9,60 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat, meskipun angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Konawe Utara bersekolah hanya setingkat SLTP.



Pencapaian Tahun 2021-2023 sedikit dibawah target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. dengan capaian sedikit berfluktuatif namun selalu diatas 98%. Posisi capaian rata Lama sekolah Konawe Utara **menempati urutan ke-3 Untuk Kabupaten/Kota** se Sultra, hanya tertinggal dari Kota Kendari dan Kota Bau-bau. **Capaian rata-rata lama sekolah Konawe Utara tertinggi untuk Kabupaten di Sulawesi Tenggara, dengan capaian diatas rata-rata provinsi dan Nasional.**





Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, Rata-rata Lama Sekolah Hampir mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023, hanya berselisih 0.77 tahun dari target sebesar 10,37 tahun.

Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Konawe Utara tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menekan angka putus sekolah melalui kebijakan Beasiswa untuk siswa SD - SMP - SMA dan beasiswa Konasara bagi mahasiswa perguruan tinggi.





Upaya yang dilakukan

- Menerapkan program-program berbasis rapor pendidikan daerah
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terus berjalan
- Pemberian Beasiswa hingga keluar negeri
- Meningkatkan kesejahteraan pendidik melalui pemberian TPP dan Sarana 1 Guru Satu Laptop.



Masalah yang dihadapi

Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana sehingga harus memaksimalkan sarana prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah Daerah.



Solusi

- Memberikan bimtek maksimal dalam penggunaan sarana, dan fokus memperbaiki rapor pendidikan daerah yang masih merah.
- Pemerintah daerah melakukan pemetaan penerimaan bantuan Pendidikan dengan aplikasi Konasara *Smart*.
- Pemberian TPP tertinggi se Sultra termasuk Guru PPPK



ANUGERAH DWIJA PRAJA NUGRAHA

OLEH PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) ATAS KOMITMEN DALAM **MEMULIAKAN GURU DAN MEMAJUKAN DUNIA PENDIDIKAN DI KABUPATEN KONAWE UTARA**

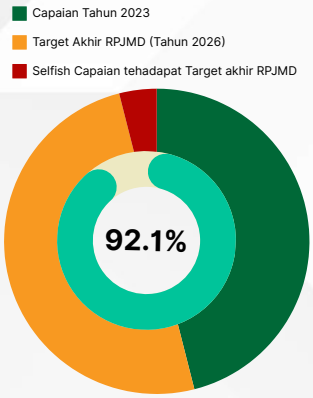
IKU-3 HARAPAN LAMA SEKOLAH

Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Rata- rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun yang ditetapkan belum tercapai. Pada tahun 2022 rata - rata lama sekolah ditargetkan mencapai 9,79% pada tahun 2023, realiasasi pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah penduduk baru mencapai 9,53 Tahun 2022 dengan persentase capaian indikator kinerja sebesar 9,30 dan tahun 2023 sebesar 9,60 dan realisasi sebesar 98,06% dengan kategori Sangat Baik walaupun capaian tahun ini tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

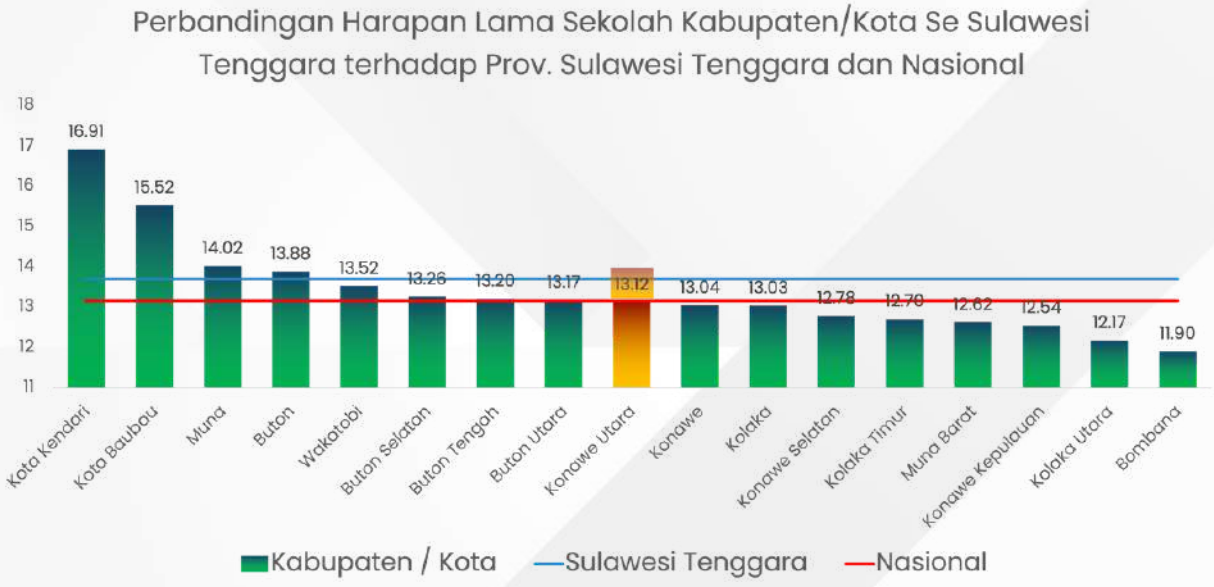


Pencapaian Tahun 2021-2023 sedikit dibawah target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. dengan capaian cenderung namun selalu diatas 90%. Posisi capaian Harapan Lama sekolah Konawe Utara **menempati urutan ke-9 Untuk Kabupaten/Kota** se Sultra, dengan realisasi yang lebih rendah dari rata-rata capaian provinsi Sultra dan Nasional



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, Rata-rata Lama Sekolah cenderung meningkat dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026 .

Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk mengutamakan program pembangunan di bidang pendidikan.





Upaya yang dilakukan

- Menerapkan program-program berbasis rapor pendidikan daerah
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terus berjalan
- Pemberian Beasiswa hingga keluar negeri
- Meningkatkan kesejahteraan pendidik melalui pemberian TPP dan Sarana 1 Guru Satu Laptop.



Masalah yang dihadapi

Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana sehingga harus memaksimalkan sarana prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah Daerah.



Solusi

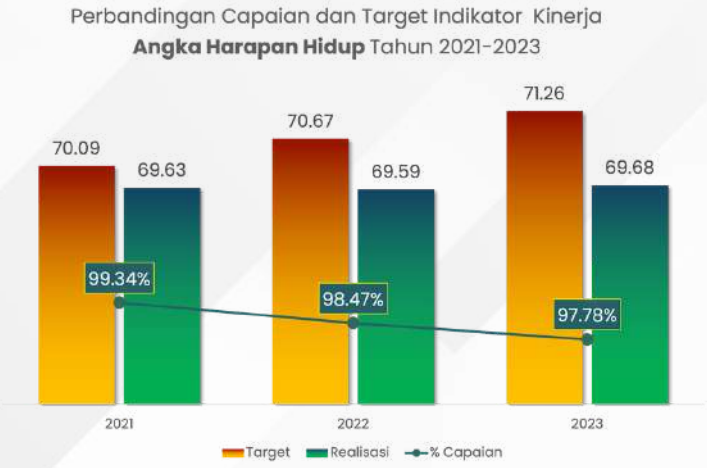
- Memberikan bimtek maksimal dalam penggunaan sarana, dan fokus memperbaiki rapor pendidikan daerah yang masih merah.
- Pemerintah daerah melakukan pemetaan penerimaan bantuan Pendidikan dengan aplikasi Konasara *Smart*.
- Pemberian TPP tertinggi se Sultra termasuk Guru PPPK



Bupati Raih Penghargaan Inovasi Membangun Negeri Tahun 2023 dari TV One kategori pemerintah kota dan kabupaten sebagai pelopor pengembangan sumber daya manusia bagi pendidikan.

Sasaran 2 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

IKU-4 ANGKA USIA HARAPAN HIDUP

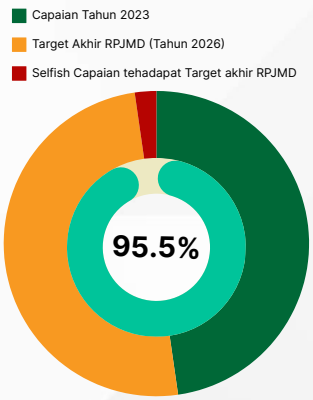


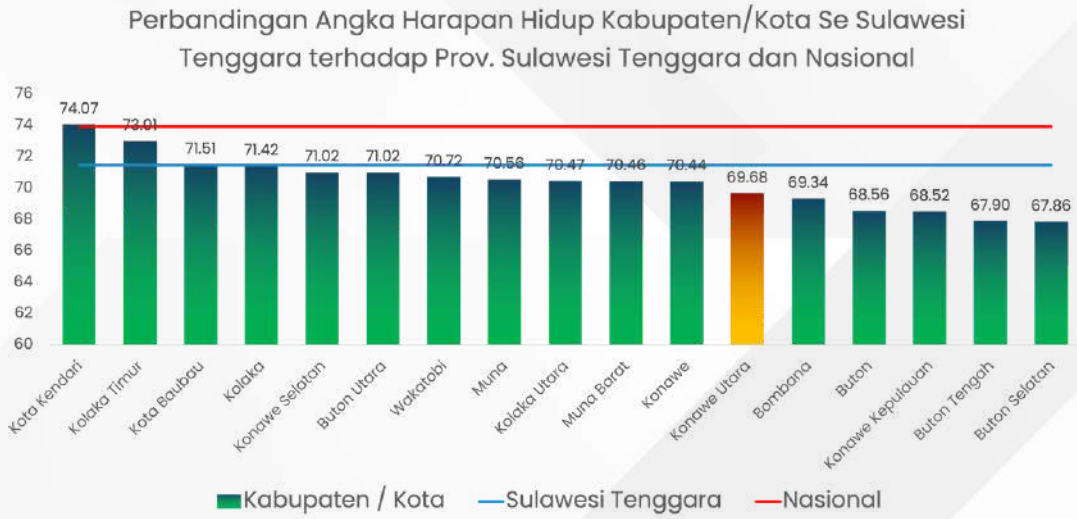
Usia harapan hidup menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan terutama bidang kesehatan memberi arti bahwa semakin panjangnya usia harapan hidup penduduk disuatu daerah mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah tersebut dalam menjaga Kesehatan, kecukupan gizi serta Kesehatan lingkungan.

Cakupan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada tahun 2021 sebesar 69,63, tahun 2022 69,59 dan tahun 2023 sebesar 69.68 tahun walaupun belum melampaui target yang dapat dilihat dari capaian 99,98 % dari target 71,26% dengan kategori Sangat Baik meskipun capaian tahun ini tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan

Pencapaian Tahun 2021-2023 sedikit dibawah target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. dengan capaian cenderung menurun namun selalu diatas 97%. Posisi capaian Angka Usia Harapan Hidup Konawe Utara **menempati urutan ke-12 Untuk Kabupaten/Kota** se Sultra, dengan realisasi yang lebih rendah dari rata-rata capaian provinsi Sultra dan Nasional

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, Angka Usia Harapan Hidup cenderung meningkat dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 95.5%.







Upaya yang dilakukan

- Penerapan pendekatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan (continuum of care). Melalui pelayanan kesehatan terhadap seluruh tahapan siklus hidup manusia (life cycle) dimana sejak masih dalam kandungan, sampai lahir menjadi bayi, tumbuh menjadi anak balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa (usia produktif), dan usia lanjut.
- Pengawasan mulai di lakukan saat wanita usia subur tercatat sebagai catin, dilakukan penapisan pemeriksaan kelayakan kehamilan melalui program elsimil, dilanjutkan penapisan tripel eliminasi saat kunjungan pertama kehamilan, dan di adakan kelas ibu hamil sebagai wadah edukasi ibu-ibu untuk memenuhi pengetahuan tentang kehamilan yang sehat, selanjutnya penekanan ibu hamil melakukan USG minimal 2 kali selama kehamilan hingga tercapai Kunjungan ANC (K6).
- Melakukan pelayanan kesehatan penyakit menular dan penyakit tidak menular, dalam rangka menurunkan angka kematian.



Masalah yang dihadapi

- Masih adanya persalinan 4T (Melahirkan Terlalu Muda, Terlalu Banyak Anak, Terlalu Rapat Jarak Lahiran, dan Terlalu Tua) di Kabupaten Konawe Utara.
- Masih adanya persalinan yang dilakukan di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Pemberian ASI Eksklusif masih rendah.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya posyandu lansia.
- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengontrol penyakit yang diderita.
- Masih adanya penyakit menular yang terlambat terdeteksi karena masyarakat tidak memeriksakan diri.
- Masih kurangnya Masyarakat untuk memeriksakan dan berobat teratur pada penyakit Hipertensi, DM, Jantung, dll (Penyakit Tidak Menular)
- Kurangnya kunjungan posyandu



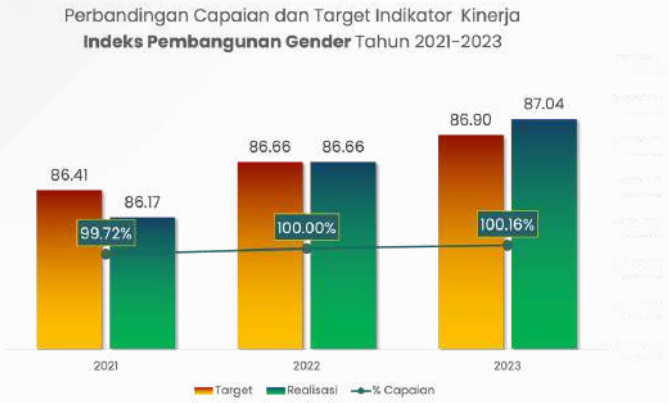
Solusi

- Bidan mulai mengawasi kehamilan mulai dari kunjungan pertama dan melakukan USG minimal 2 kali selama kehamilan dngan inovasi "Kring-Kring persalinan.
- Melakukan pemeriksaan triple eliminasi pada ibu hamil.
- Melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil guna pemeriksaan kehamilan.
- Menganjurkan pada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan USG pada awal kehamilan dan pada trimester III.
- Melakukan pemeriksaan golongan darah pada anggota keluarga ibu hamil guna memastikan tersedianya calon pendonor darah pada saat dibutuhkan.
- Melakukan upaya peningkatan pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan makanan pendamping ASI (MP-ASI) agar mendukung tumbuh kembang anak terutama peningkatan berat badan pada bayi balita.
- Melakukan pemgawasan minum obat secara tepat dan teratur oleh petugas.
- Melakukan KIE kepada masyarakat tentang pentingnya tinggi protein bagi pertumbuhan anak.
- Melakukan inovasi " Gerakan Patuh Jaga Tekanan Darah (Gertuh Janda) " kepada masyakarat sehingga penyakit yang seharusnya bosa dikontrol, dapat terkontrol demgan baik.
- Bidan dan petugas laboratorium berkolaborasi untuk pemeriksaan HIV, MALARIA, HEPATITIS B, HB dalam hal intergrasi program KIA.
- Pelayanan Persalinan Fasyankes Cepat dan Tepat.
- Pemeriksaan Laboratorium Gratis.
- Menyediakan antar jemput ibu bersalin gratis agar ibu bersalin mau melakukan persalinan di fasyankes

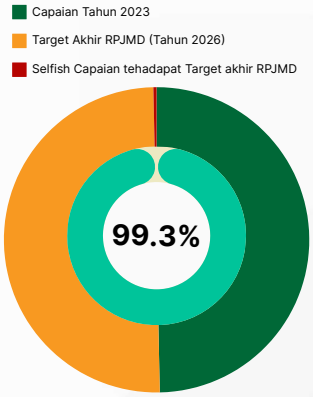
Sasaran 3 — MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK

IKU-5 — INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

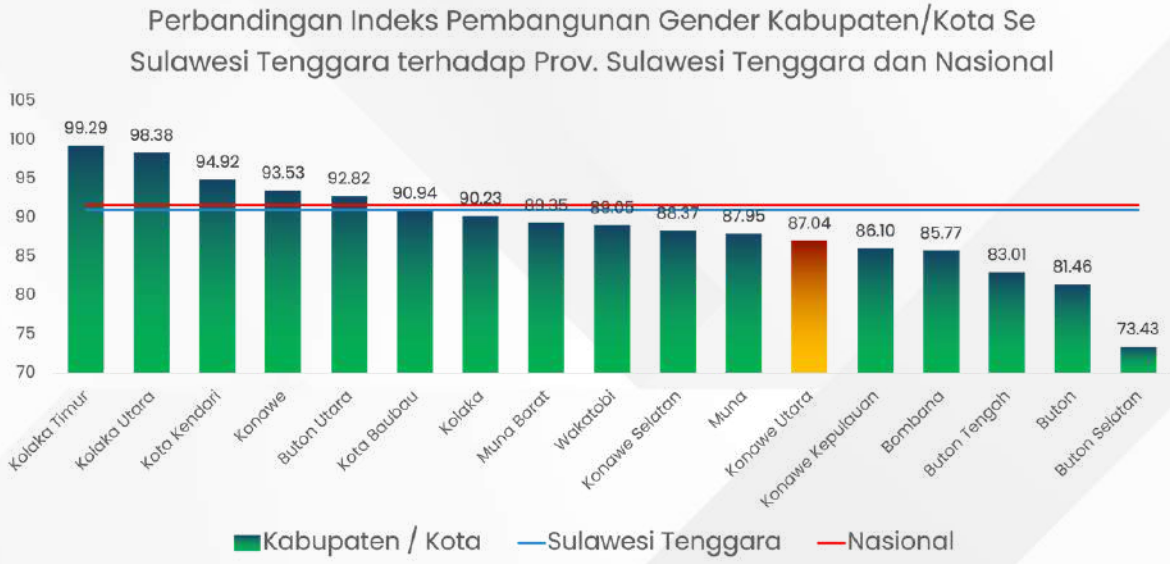
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi. Indeks Pembangun Gender (IPG) pada tahun 2021 sebesar 86,17%, tahun 2022 sebesar 86,66 dan tahun 2023 sebesar 87,04% dan hal ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan 86,90%. IPGdi Kabupaten Konawe Utara mencapai 86,90% dari target tahun 2023 dengan realisasi 100,00% dengan kategori Sangat Baik pada tahun ini



Pencapaian Tahun 2021-2023 telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. dengan capaian cenderung meningkat selama dua tahun terakhir diatas 100%. Posisi capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Konawe Utara **menempati urutan ke-12 Untuk Kabupaten/Kota** se Sultra, dengan realisasi yang lebih rendah dari rata-rata capaian provinsi Sultra dan Nasional



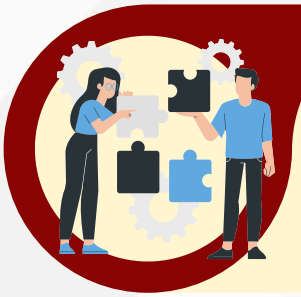
Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, Indeks Pembangunan Gender cenderung meningkat dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 99.3%.





Upaya yang dilakukan

- Meningkatkan jumlah perempuan ddalam kegiatan ekonomi atau bidang ketenaga kerjaan
- Meningkatkan jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan
- Menerapkan wajib belajar 12 tahun
- Meningkatkan kualitas layanan Kesehatan terhadap ibu dan anak



Masalah yang dihadapi

- Dari Faktor ekonomi keluarga miskin cenderung lebih mengutamakan pendidikananak laki-laki dari padaanak perempuan
- Faktor social perempuan sering kalidipaksa untuk menikah dini sehingga tidak dapat melanjutkan Pendidikan
- Perempuan seringkali kurang menyadari pentingnya kesehatan
- Perempuan seringkali mengalami diskriminasi dalam pekerjaan
- Belum optimalnya layanan informasi bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat Kecamatan Desa/ Kelurahan



Solusi

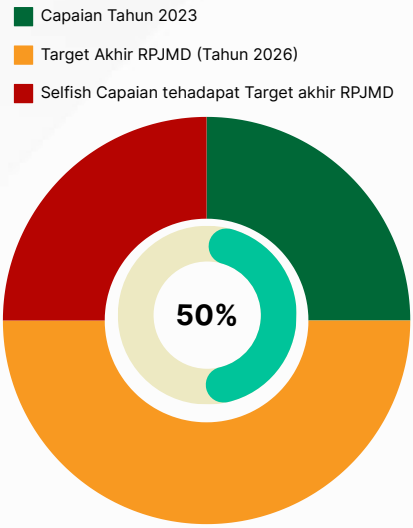
- Perlunya sosialisasi tentang kesetaraan gender untuk mengubah pola fikir masyarakat dan adat istiadat yang memebatasi perean perempuan
- Perlu menyediakan akses yang sama bagi perempuan untuk mendapatkan Pendidikan, pekerjaan dan layanan Kesehatan
- Masyarakat perlu didorong untuk menyadari pentingnya kestaraan gender dan menolak diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan
- Menyediakan sarana untuk pengaduan yang cepat dan mudah diakses



IKU-6 KOTA LAYAK ANAK

Kota Layak Anak dan atau Kota Ramah Anak kadang-kadang kedua istilah ini dipakai dalam arti yang sama oleh beberapa ahli dan pejabat dalam menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak. Kota Layak Anak di Kabupaten Konawe Utaramencapai kategori Pratama dengan kategori Baik dengan capaian di tahun 2021 adalah pratama, tahun 2022 yaitu pratama dan tahun 2023 berada pada titik pratama sesuai target yang telah ditetapkan.

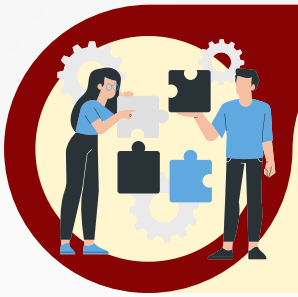
Pencapaian Tahun 2021-2023 telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Diharapkan pada tahun 2024-2026 mampu mencapai tingkat Madya.





Upaya yang dilakukan

- Membentuk generasi yang cerdas, sehat dan berkualitas
- Memberikan perlindungan seluruh hak anak agar mampu menjadi pemimpin masa depan yang baik dan berdaya saing



Masalah yang dihadapi

- Pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha memiliki system pembangunan berbasis anak melalui sitem pengintegrasian komitmen dan sumber daya



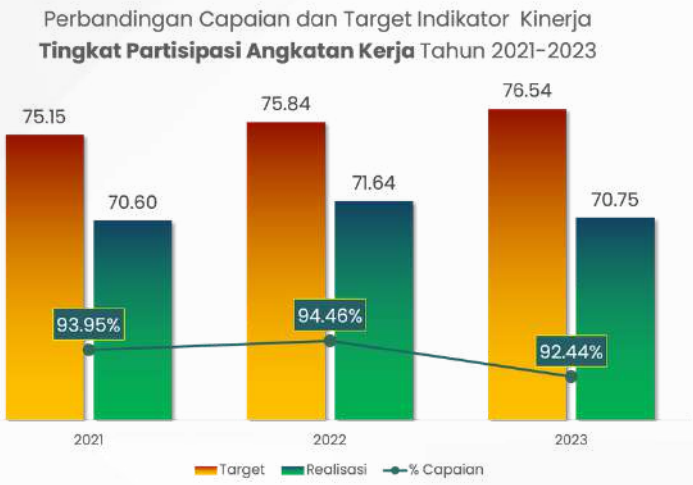
Solusi

- Pemerintah Daerah telah menyiapkan regulasi berupa Perda tentang kabupaten Layak anak yang menjamin terpenuhinya hak hak atas anak
- Menyediakan sarana bermain sekolah Serta pelayanan Kesehatan
- Menyediakan hak sipil anak yaitu akte kelahiran dan Kartu identitas anak

Sasaran 4 MENINGKATNYA SUMBERDAYA MANUSIA YANG KOMPETEN DAN PRODUKTIF

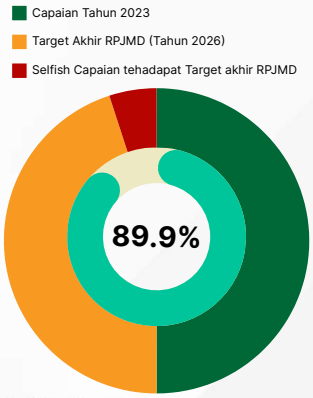
IKU-7 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

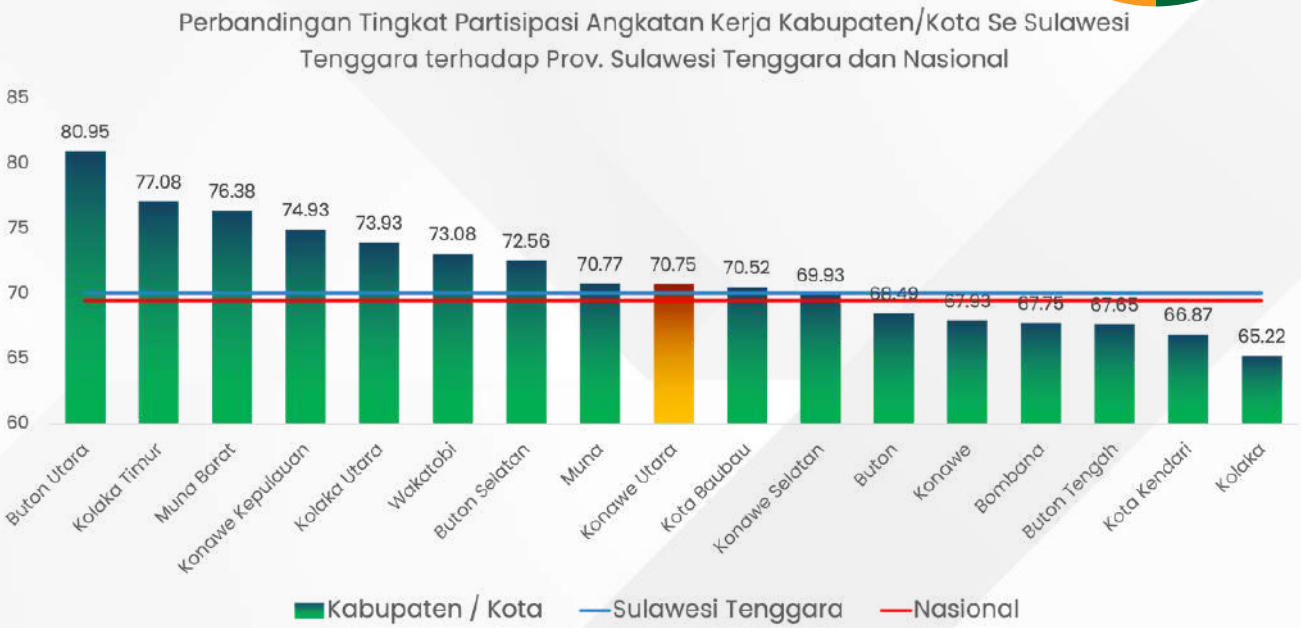
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Penghitungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjadi Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2021mencapai 70,6%, tahun 2022 mencapai 71,64% dan tahun 2023 mencapai 70,75 % dari target 75,84% tahun 2023 dengan realisasi 92,44 % dengan kategori Sangat Baik meskipun realisasi capaian tahun ini tidak tercapai berdasarkan target yang telah ditetapkan



Posisi capaian TPAK Kabupaten Konawe Utara **menempati urutan ke-12 Untuk Kabupaten/Kota** se Sultra, dengan realisasi yang lebih rendah dari rata-rata capaian provinsi Sultra dan Nasional

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, TPAK cenderung fluktuatif dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 89.9%.

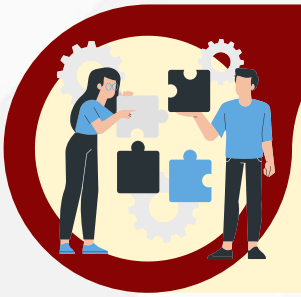






Upaya yang dilakukan

- Memberikan pelatihan berbasis kompetensi dan bantuan sarana usaha untuk peningkatan terbentuknya tenaga kerja mandiri.



Masalah yang dihadapi

- Palatihan yang dilaksanakan oleh UPTD BLK tidak sesuai dengan pasar kerja yang tersedia
- Pelatihan yang dilaksanakan oleh UPTD BLK tidak sesuai dengan pasar kerja yang tersedia



Solusi

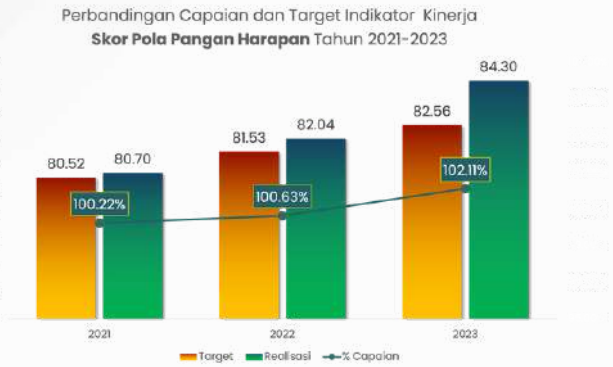
- Lebih intens melakukan koordinasi dengan dunia usaha dan berusaha menyediakan peralatan pelatihan yang bisa mendukung kebutuhan pasar kerja

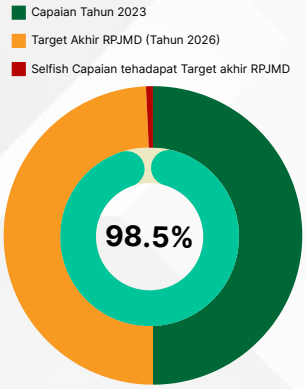


Sasaran 5 MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN

IKU-8 SKOR POLA PANGAN HARAPAN

Program Pemanfaatan Kebun Pekarangan (PPKP) merupakan program prioritas Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam rangka menjamin ketersedian pangan, menumbuhkan perekonomian daerah, dan mencegah inflasi, yang telah sosialisasikan ke seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara dengan melibatkan peran rumah tangga dalam mewujudkan kemandirian pangan. Saat ini kelompok tani binaan sudah melakukan penanaman semangka dan melon, selanjutnya akan disusul penanaman cabe besar dan cabe keriting hingga tanaman sayuran.





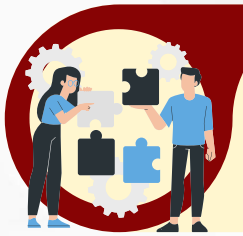
Pola Pangan Harapan merupakan acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Penghitungan Skor Pola Pangan Harapan di KabupatenKonawe Utara pada tahun 2021 mencapai 80,7%, tahun 2022 mencapai 82,03% dan tahun 2023 mencapai 84,3% dari target 82,56% dengan realisasi 102,11% dengan kategori **Sangat Baik** pada tahun ini.

Capaian Kinerja Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target tahun terakhir Capaian RPMD Tahun 2026, telah mencapai 98.5%.



Upaya yang dilakukan

- Adanya Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pagan bebrbasis sumber daya local
- Adanya sosialisasi dan pemahaman lebih lanjut tentang pangan bergizi, berimbang, sehat dan aman kepada masyarakat



Masalah yang dihadapi

- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman



Solusi

Melakukan program pemanfaatan kebun pekarangan

- Kelompok tani binaan memanfaatkan kebun pekarangan

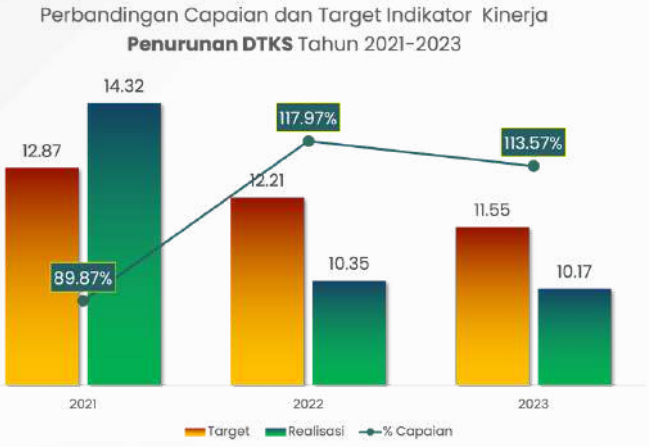
Sasaran 6

MENINGKATNYA PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

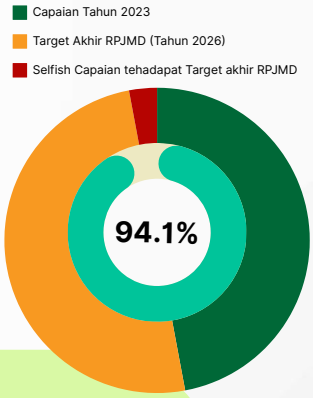
IKU-9

PENURUNAN PERSENTASE WARGA MISKIN (DTKS/DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL)

Presentase Penurunan Warga Miskin merupakan program Daerah yang dananya bersumber dari APBD kemudian ditunjang dengan dana APBD dengan sasaran keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.



Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran "Presentase Penuruan Warga Miskin" dengan indikator Tingkat Kemiskinan (%) seperti yang tergambarkan pada tabel di atas, bahwa realisasi kinerja indikator pada tahun 2021 14,32%, tahun 2022 sebesar 10,35 % dan tahun 2023 sebesar 10,17% dari target yang telah ditetapkan sebesar 11,55% dengan angka capaian sebesar 113,57%. Semakin kecil angka penurunan mengartikan bahwa masyarakat semakin hidup dalam kesejahteraan. Angka capaian untuk indikator ini termasuk dalam kategori "Sangat Baik

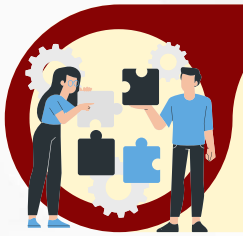


Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026,Penurunan DTKS cenderung sesuai target dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2026. Capaian hingga tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 94.1%.



Upaya yang dilakukan

- Peningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dengan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki termasuk pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan untuk usaha mikro dengan memberikan bantuan usaha



Masalah yang dihadapi

- Adanya laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, meningkatnya pengangguran dan pendidikan yang rendah



Solusi

- Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan guna memperkuat keterampilan masyarakat agar lebih siap menghadapi persaingan di pasar kerja serta dengan

MISI 2 : MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN SARANA PRASARANA KAWASAN PERMUKIMAN

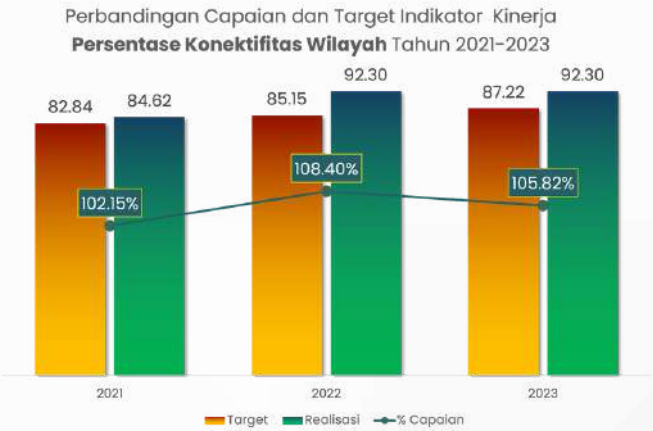
Tujuan 2 MENINGKATKAN KUALITAS INFRSTRUKTUR WILAYAH

IKU-10 PERSENTASE KETERHUBUNGAN/KONEKTIVITAS WILAYAH

Dengan adanya keterhubungan /konektivitas wilayah maka memberi dampak yang positif bagi masyarakat di Kabupaten Konawe Utara yaitu:

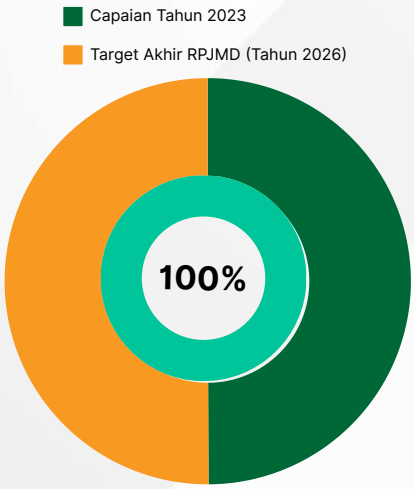
1. Dapat untuk mengangkut hasil pertanian atau memindahkan barang;
2. Mempelancar masyarakat untuk berpergian dari daerah asal ke daerah tujuan;
3. Mempermudah akses masyarakat untuk melakukan interaksi sosial maupun kegiatan politik
4. Mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur" dengan indikator Persentase Keterhubungan/Konekvitas Wilayah seperti yang tergambarkan pada tabel di atas, bahwa tahun 2021 mencapai 84,62%, tahun 2022 mencapai 92,30% dan tahun 2023 mencapai 92,30% lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 87,22% dengan angka capaian sebesar 105,82%. Angka capaian untuk indikator ini termasuk dalam kategori "Sangat Baik"



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, Persentasen Konektifitas wilayah sudah mencapai target akhir tahun 2026. Tahun 2022 hingga 2023 capaian konsisten di atas target tahunan.

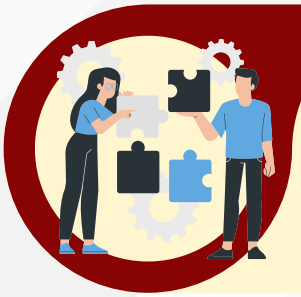






Upaya yang dilakukan

- Memprioritaskan pembangunan Jalan dan Jembatan dalam penyusunan anggaran/APBD;
- Menggandeng DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan Jalan dan Jembatan.



Masalah yang dihadapi

- Dana APBD yang terbatas
- Kebijakan dalam Pembahasan Anggaran oleh DPRD terkadang bergeser dari prioritas pembangunan



Solusi

- Malakukan Pinjaman Daerah untuk pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan
- Meyakinkan DPRD untuk bersama-sama berkomitmen memfokuskan anggaran dalam pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan konektivitas wilayah









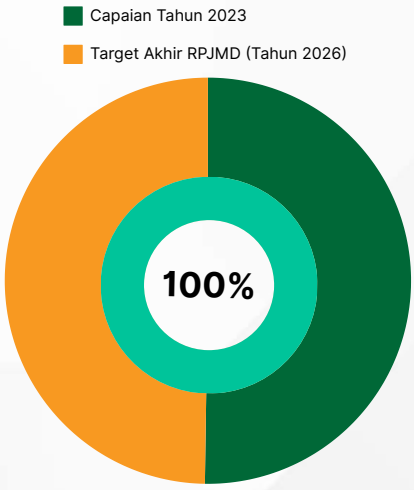
Sasaran 7 MENINGKATNYA KAPASITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH

IKU-11 PROPORSI PANJANG JALAN DAN JEMBATAN DALAM KONDISI MANTAP

Panjang jalan kabupaten tahun 2023 di Kabupaten Konawe Utara secara keseluruhan adalah 699,94 km, yang terdiri dari jalan beraspal sepanjang 132,17 km, dan kerikil 324,75 km, tanah 227,82 km, dan lainnya 5,20 km. Bila dilihat dari kondisinya, jalan yang dalam kondisi baik sepanjang 118,20 km, 188,10 km dalam kondisi sedang, 314,15 km dalam kondisi rusak ringan dan 69,49 dalam kondisi rusak berat.



Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur" dengan indikator Proporsi Jalan dan Jembatan dalam keadaan Mantap seperti yang tergambarkan pada tabel di atas, bahwa realisasi kinerja indikator pada tahun 2021 sebesar 89,52% , tahun 2022sebesar 16,28% dan tahun 2023 mencapai 89,52% lebih rendah dari target yang telah ditetapkan sebesar 86,36% dengan angka capaian sebesar 103,66%. Angka capaian untuk indikator ini termasuk dalam kategori "Sangat Baik".

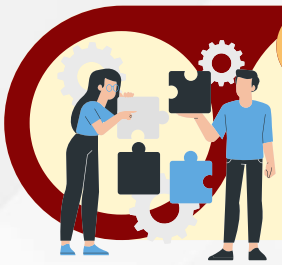


Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap telah mencapai target akhir tahun 2026. Tahun 2022 hingga 2023 capaian konsisten di atas target tahunan.



Upaya yang dilakukan

- Mengajak pihak perusahaan untuk ikut serta dalam pembangunan jalan yang dapat digunakan baik pihak perusahaan maupun masyarakat yang berada di sekitar area perusahaan tidak melakukan pungutan dengan alasan pembangunan jalan tanpa diatur dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (PERDES)
- Meningkatkan akses ekonomi masyarakat dan mewujudkan harapan seluruh masyarakat pesisir



Masalah yang dihadapi

- Menyediakan jalan yang baik dengan tolak ukur kemantapan jalan
- Fokus pada monitoring dan control dari pada hasil



Solusi

- Adanya dana APBN yang membiayai pekerjaan jalan dan jembatan

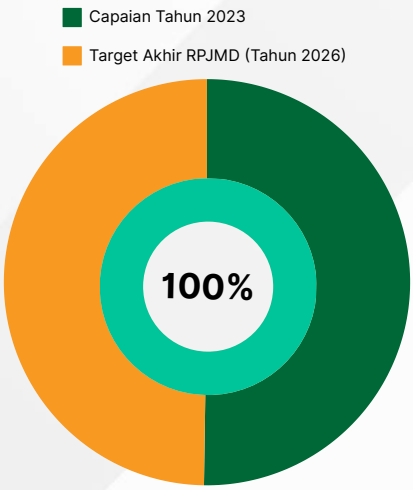
IKU-12 PERSENTASE DAERAH IRIGASI (DI) YANG TERLAYANI JARINGAN IRIGASI

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Sampai dengan Tahun 2022, di wilayah Kabupaten Konawe Utara terdapat 22 Daerah Irigasi (DI) dengan total luas 3.941 Ha. Kondisi jaringan irigasi primer dalam kondisi baik tahun 2022 adalah 75,34% (8.683,10 m), sedangkan irigasi sekunder sebesar 75,22% (1.569,80 m). Data capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah.



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, Persentase Daerah Irigasi (DI) Yang Terlayani Jaringan Irigasi telah mencapai target akhir tahun 2026. Tahun 2021 hingga 2023 capaian konsisten di atas target tahunan.





Upaya yang dilakukan

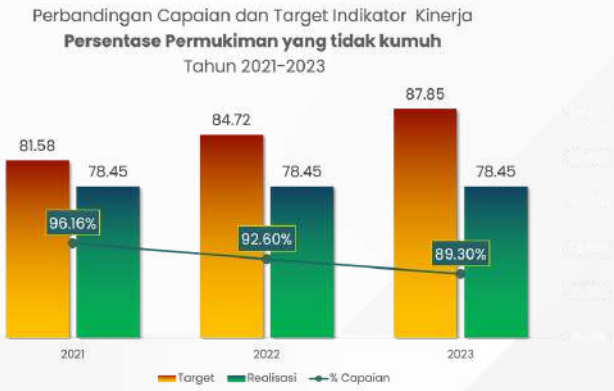
- Meningkatkan perekonomian masyarakat
- Melakukan percepatan pembangunan irigasi pertanian
- Pemberdayaan dan pembinaan peningkatan fungsi koordinasi dan komunikasi antar pemerintah dan petani penguna jaringan irigasi
- Adanya peningkatan dari sisi penganggaran yang sangat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta tersedianya anggaran untuk pembangunan jalan baru dan seiring dengan program pembangunan infrastruktur yang terus digalakkan oleh pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam program Konasara melalui program kegiatan Pengelolaan SDA dan bangunan pengamanan pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota.

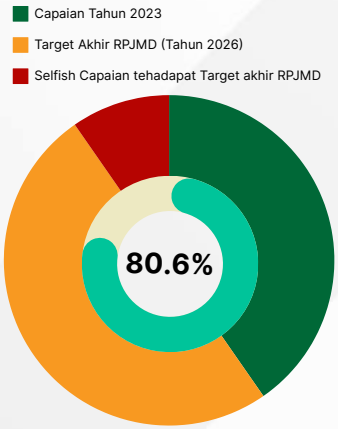
Sasaran 8 TERPENUHINYA SARANA PARASARANA KAWASAN PERMUKIMAN

IKU-13 PERSENTASE KAWASAN PERMUKIMAN (PERKOTAAN/PERDESAAN) YANG TIDAK KUMUH

Berdasarkan digitasi citra satelit dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara, luas kawasan permukiman di Kabupaten Konawe Utara sebesar 2.450,45 Ha. Permukiman kumuh di Kabupaten Konawe Utara di berdasarkan SK Bupati Konawe Utara No. 397/2019 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab. Konawe Utara seluas 112.669 Ha dengan Kawasan yang tersebar di 44 titik kawasan kumuh. Selanjutnya, hasil verifikasi luas kawasan pemukiman kumuh pada kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Tahun 2021 diketahui bahwa luasan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Konawe Utara seluas 528,13 Ha. Dengan demikian, dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Konawe Utara mengacu pada data tersebut.

Pencapaian Indikator ini rata-rata pada tahun 2021 sebesar 78,45%, tahun 2022 mencapai 78,45 dan tahun 2023 mencapai 92% dari target sebesar 87,85% dengan capaian realisasi sebesar 89,30% terhadap target yang ditetapkan atau dengan kata lain belum memenuhi target yang telah ditetapkan.



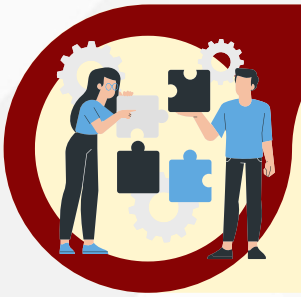


Capaian Indikator ini masih jauh dibawah target akhir RPJMD, dengan capaian sebesar 80%. Perlu upaya ekstra untuk mencapai target tahun 2026.



Upaya yang dilakukan

- Memprioritaskan penanganan kumuh dalam RKPD Tahun 2023
- Mengusulkan penanganan Kawasan Kumuh kepada Pembiayaan oleh APBN



Masalah yang dihadapi

- Terkendala dalam penyiapan RC untuk penanganan dari Pemerintah Pusat
- APBD terbatas jika digunakan untuk penanganan kawasan kumuh
- adanya banjir yang mengancam dan mampu menjadi pemicu kawasan kumuh yang baru



Solusi

- Mendorong percepatan penyusunan dokumen terkait RC pengusulan penanganan melalui APBN
- Memperkuat mitigasi bencana

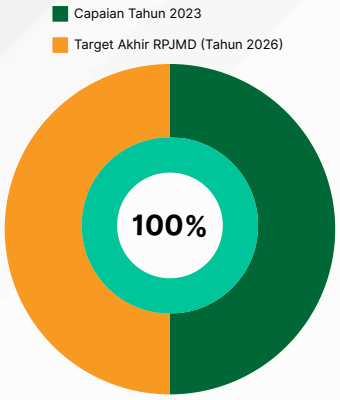
IKU-14 RASIO AKSES AIR MINUM LAYAK

Penyediaan Air minum dilaksanakan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Konawe Utara (Tirta Lasolo) bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Dalam rangka penanganan di desa rawan kekeringan dan belum terjangkau jaringan PDAM, selama lima tahun terakhir telah dibangun Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Adapun lingkungan kawasan perkotaan dibangun Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) di masing - masing.

Sumber air minum sebagian besar berasal dari air tanah, baik air tanah dangkal yang berupa sumur gali maupun sumur dalam dan PDAM. Penduduk menggunakan sumur gali baik terlindungi maupun tak terlindungi, mencapai 11,01%, penduduk yang menggunakan mata air baik terlindungi maupun tak terlindungi 43,87%, sisanya menggunakan air dalam kemasan 0,64%, hanya sebagian kecil menggunakan air dari PDAM yang bersumber dari sumur dalam (lebih kurang 2,47%).

Pengukuran pada indikator Rasio Akses Air Minum Layak juga mengalami peningkatan dari tahun 2021-2023 dimana pada tahun 2021 mencapai 65,04%, ditahun 2022 sebesar 66,73% dan tahun 2023 mencapai 87,90% dari target yang telah ditentukan sebesar 61,54% atau sebesar 142,83% dengan kategori "Sangat Baik"





Capaian tahun 2023 dibanding target akhir RPJMD sudah tercapai dan akan terus ditingkatkan.

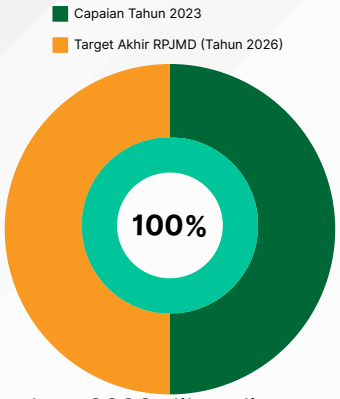
Upaya Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dengan mekanisme sharing APBN di daerah yang rawan air bersih. Instalasi yang terbangun tersebut selanjutnya diserahkan kepada masyarakat setempat untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dipelihar

IKU-15 RASIO AKSES SANITASI LAYAK

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia, yang mana fasilitas sanitasi layak merupakan fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu dan dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki spetik. Sanitasi yang dimaksud dapat berada di dalam rumah, halaman rumah, atau komunal. Asalkan jaraknya yang terjangkau (dekat dari rumah) dan dapat melayani seluruh anggota keluarga.

Persentase penduduk berakses sanitasi yang layak di 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2021 sebesar 42,61%, tahun 2022 sebesar 77,90% dan tahun 2023 sebesar 82,74% dari target yang ditetapkan sebesar 56,62% atau realisasi capaian sebesar 146,13% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Baik" Pencapaian sanitasi yang layak di Konawe Utara di tempuh melalui pelaksanaan program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM).





Capaian tahun 2023 dibanding target akhir RPJMD sudah tercapai dan akan terus ditingkatkan.



Upaya yang dilakukan

- Pelaksanaan program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM).
- Menjaga kelestarian air alam dari ancaman limbah insdustri



Masalah yang dihadapi

- Kondisi air di pemukiman masih terganggu oleh Limbah Rumah Tangga
- Terjadi Pencemaran air
- Kurangnya sarana dan prasarana



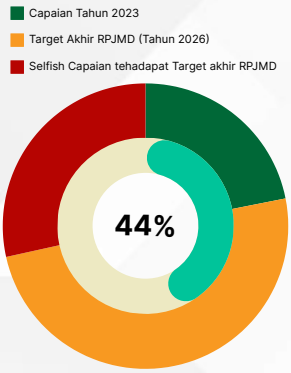
Solusi

- Adanya pendanaan dari APBD dan APBN melalui Program Penyedian Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
- Membuang sampah pada tempatnya
- Melakukan penghijauan
- Mencegah praktik pabrik buang limbah sembarangan
- Membuat sirkulasi pengelolaan air limbah toilet dengan benar

IKU-16 CAKUPAN LAYANAN PERSAMPAHAN

Persentase layanan persampahan tahun 3 tahun terkahir ini yaitu tahun 2021 sebesar 15,35%, tahun 2022 sebesar 5,60% dan tahun 2023 sebesar 15,38% yang jauh dibawah target yang telah di tentukan yaitu 25,13% atau realisasai capaian sebesar 61,20% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja "Kurang". Pencapaian sanitasi yang layak di Konawe Utara di tempuh melalui pelaksanaan program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)





Capaian tahun 2023 sangat jauh dibanding target akhir RPJMD pada Tahun 2026, saat ini baru mencapai 44%. Masih ada selisih 56% sebagai fokus pembangunan di Tahun 2024-2026.



Upaya yang dilakukan

- Adanya Kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah daerah
- Dukungan regullasi terkait
- Adanya bantuan dari kementerian lingkungan hidup
- Melakukan pengujian kualitas air sungai



Masalah yang dihadapi

- Kurangnya peran serta masyarakat dalam program pengendalian pencemaran lingkungan
- Kurangnya peningkatan SDM
- Keterbatasan sarpras untuk bekerja



Solusi

- Adanya dukungan tim pengelolaan persampahan
- Adanya kendaraan operasional yang mendukung dalam pengelolaan persampahan
- Adanya pembinaan secara terarah dan konsisten kepada masyarakat
- Pengembangan petugas pendamping dan pengembangan masyarakat
- Pengembangan masyarakat dalam mengolah sampah

MISI 3 :
MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DAN NILAI TAMBAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI

Tujuan 3 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN DAYA SAING EKONOMI

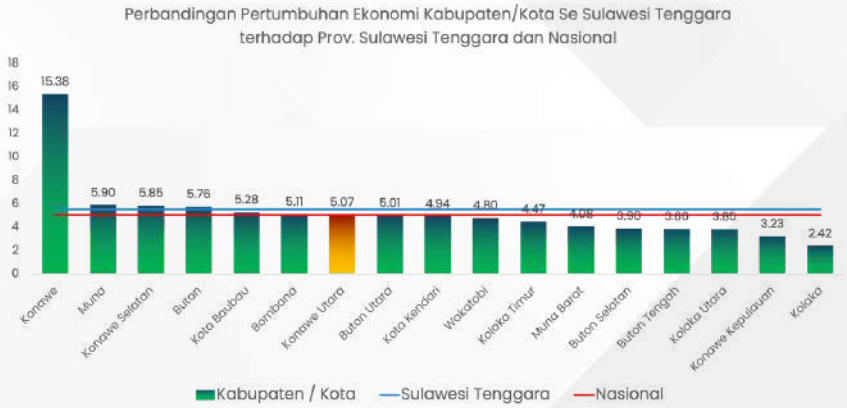
IKU-17 PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021, ekonomi Kabupaten Konawe Utara tumbuh 4.59 persen, meningkat menjadi 5.03% pada tahun 2023.

Sumber utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara terutama didukung oleh kinerja pada sektor : (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, (2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (3) Pengadaan listrik dan gas, (4) Jasa pendidikan, (5) Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kelima sumber-sumber tersebut yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2023.

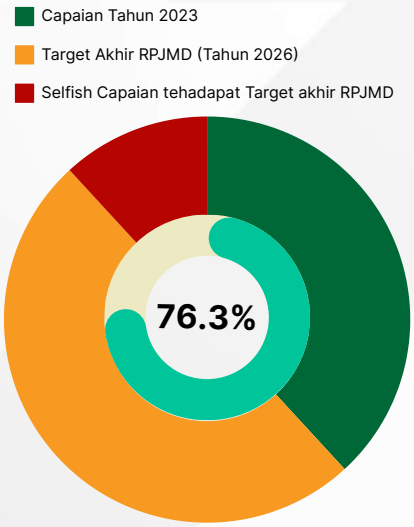
Hasil evaluasi capaian kinerja indikator Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2021 mencapai 4,59%, tahun 2022 mencapai 5,07% dan tahun 2023 mencapai 5,03% dengan target 5,58% atau capaian 96,14% termasuk dalam kategori capaian "Sangat Baik" meskipun belum melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026.

Pertumbuhan Ekonomi Konawe Utara sedikit diatas Capaian national dan berada pada urutan ke-7 tertinggi dari 17 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara





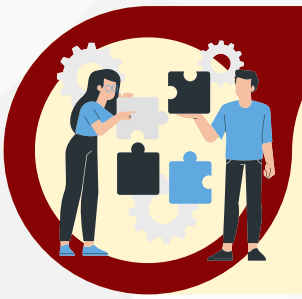
Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, Persentasen pertumbuhan Ekonomi masih jauh dari target akhir tahun 2026. Tahun 2021 hingga 2023 capaian cendrung berfluktuasi namun masih cukup baik.





Upaya yang dilakukan

- Memfokuskan pengembangan potensi daerah, antara lain Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan peternakan, pariwisata dan pertambangan;
- Meningkatkan iklim investasi;
- Adanya peraturan dan insentif dari pemerintah
- Melakukan Promosi Pariwisata hingga ke tingkat nasional.
- Proses perizinan dilakukan. Secara on line



Masalah yang dihadapi

- Masih terdapat penganguran
- Adanya Kesenjangan Penghasilan



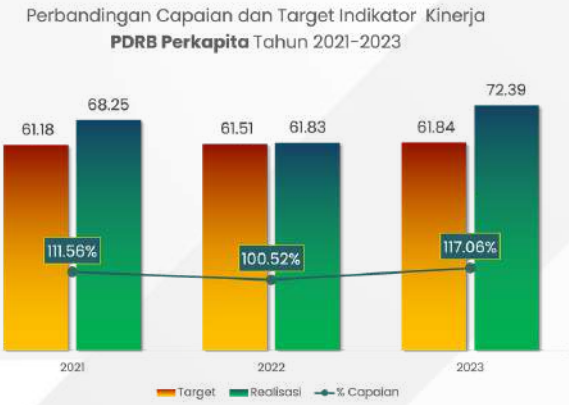
Solusi

- Memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha
- Melakukan pelatihan untuk pengembangan SDM
- Memberikan relaksi pajak agar iklim usha berjalan kondusif
- Pemberian Pupuk, Bibit dan Sarana Prasarana pertanian lainnya;
- Peningkatan kapasitas dan kualitas pendamping/penyuluh desa untuk bisa mengembangkan potensi ekonomi di desa.

IKU-18 PDRB PERKAPITA

Standar Pertumbuhan Kemakmuran Pendapatan per kapita merupakan standar umum untuk membandingkan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan suatu daerah dari tahun ke tahun.Apabila pendapatan per kapita meningkat, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator Pertumbuhan Perkapita pada3 tahun terakhir ini yaitu tahun 2021 mencapai 61,83%, tahun 2022 mencapai 68,25% dan tahun 2023 mencapai 72,39% dengan target 61,838% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 117,06% termasuk dalam kategori capaian “Sangat Baik” sudah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026.

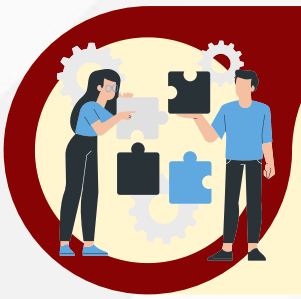


Sejak Tahun 2021 hingga tahun 2023, PDRB Perkapita Kabupaten Konawe Utara selalu mencapai target kinerja dengan capaian di atas 100%, bahkan telah melampaui target RPJMD pada tahun 2026.



Upaya yang dilakukan

- Meningkatkan produksi tanaman palawija khususnya jagung
- Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah
- Adanya pengaggaran yang mendukung program kegiatan yang pro kepada pertanian dalam arti luas
- Penguatan Program Pengembangan Kebun Pekarangan (PPKP).



Masalah yang dihadapi

- Masih minim antuasias masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya
- Investasi masih berfokus pada pertabangan, belum banyak yang menyasar investasi di biang pertanian, perikanan dan pariwisata.



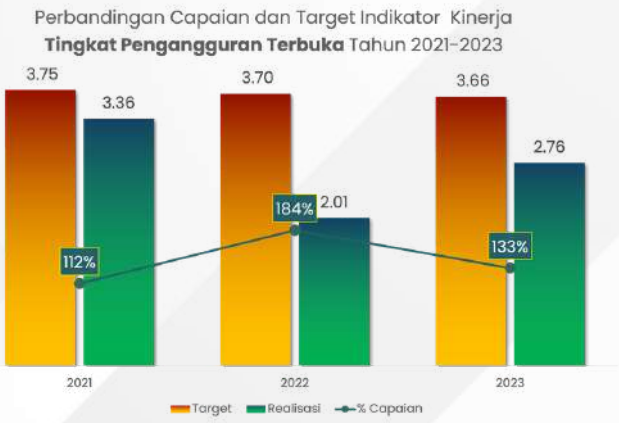
Solusi

- Meningkatkan pertumbuhan perkapita dengan cara pentapan LP2B, karena pertanian menyumbang PDRB terbesar di Konawe Utara.
- Menyediakan sarana produksi baik benih maupun pupuk.
- Pemeberian motivasi kepada petani untuk mengembangkan komoditi tersebut.

IKU-19 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran.

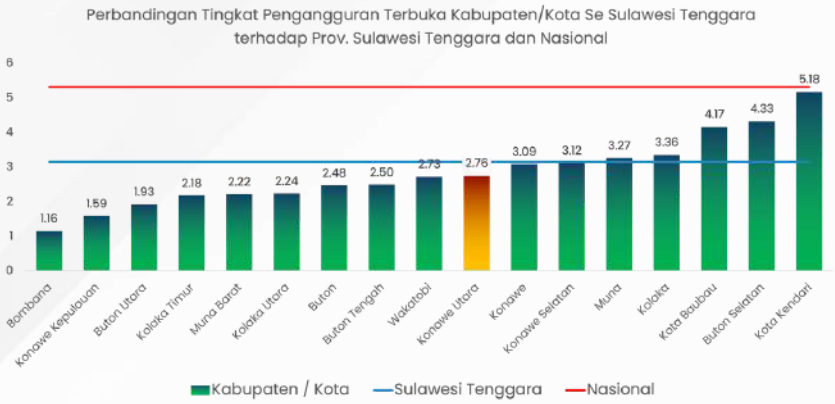
Hasil evaluasi capaian kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka 3 tahun terakhir dimulai dari tahun 2021 sebesar 3,36%, tahun 2022 sebesar 2,01% dan tahun 2023 mencapai 2,76% dengan capaian 132,61% dari target yang telah ditentukan yaitu 3,65% yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya namun termasuk dalam kategori capaian "**Sangat Baik**" karena telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 pada tahun 2023 yaitu terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka.



Sejak Tahun 2021 hingga tahun 2023, TPT Kabupaten Konawe Utara selalu mencapai target kinerja dengan capaian di atas 100%. dan telah berhasil mencapai target akhir RPJMD sebesar 3.53%.

Beberapa upaya berupa program kegiatan yang telah dilakukan yaitu: Program Peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja. Pelatihan-pelatihan kewirausahaan dilaksanakan dalam upaya mengurangi pengangguran serta meningkatkan sektor-sektor ekonomi utamanya sektor industri kecil dan menengah. Pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe Utara salah satunya adalah pelatihan/kursus program asisten pembuat pakaian.

Konawe Utara menempati urutan ke-10 dengan TPT terendah dari 17 Kab/Kota Se Sulawesi Tenggara. Capaian ini lebih baik dari rata-rata capaian provinsi maupun nasional.





Upaya yang dilakukan

- Adanya kelompok kelompok IKM yang dibentuk oleh masyarakat sehingga memudahkan dalam membentuk lapangan usaha
- Semangat dalam membuat IKM guna memberikan tambahan penghasilan
- Adanya dukungan dari pimpinan
- Melakukan pembinaan secara berkelanjutan



Masalah yang dihadapi

- Penertiban pertambangan di Kabupaten Konawe Utara mengakibatkan penurunan aktivitas pertambangan yang berdampak pada pemberhentian/PHK para pekerja.
- Jumlah Angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada dan mampu menyerapnya.
- Pendidikan yang rendah dan kurang memiliki ketrampilan

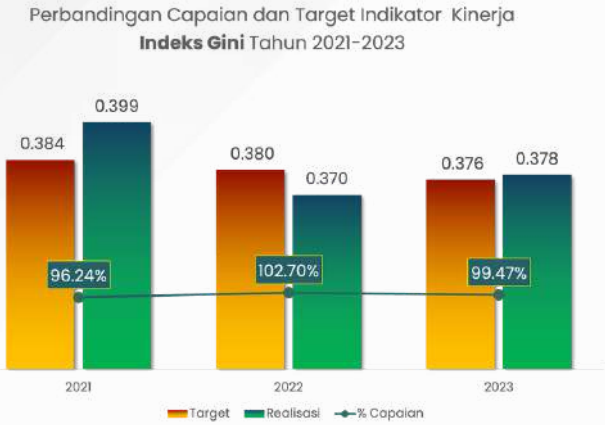


Solusi

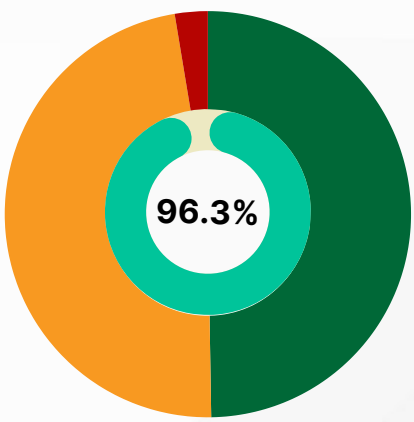
- Meningkatkan kualitas SDM
- Menciptakan Lapangan kerja baru
- Mengembangakn UMKM
- Meningkatkan kegiatan ekonomi informal
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

IKU-20 INDEKS GINI

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin timpang.

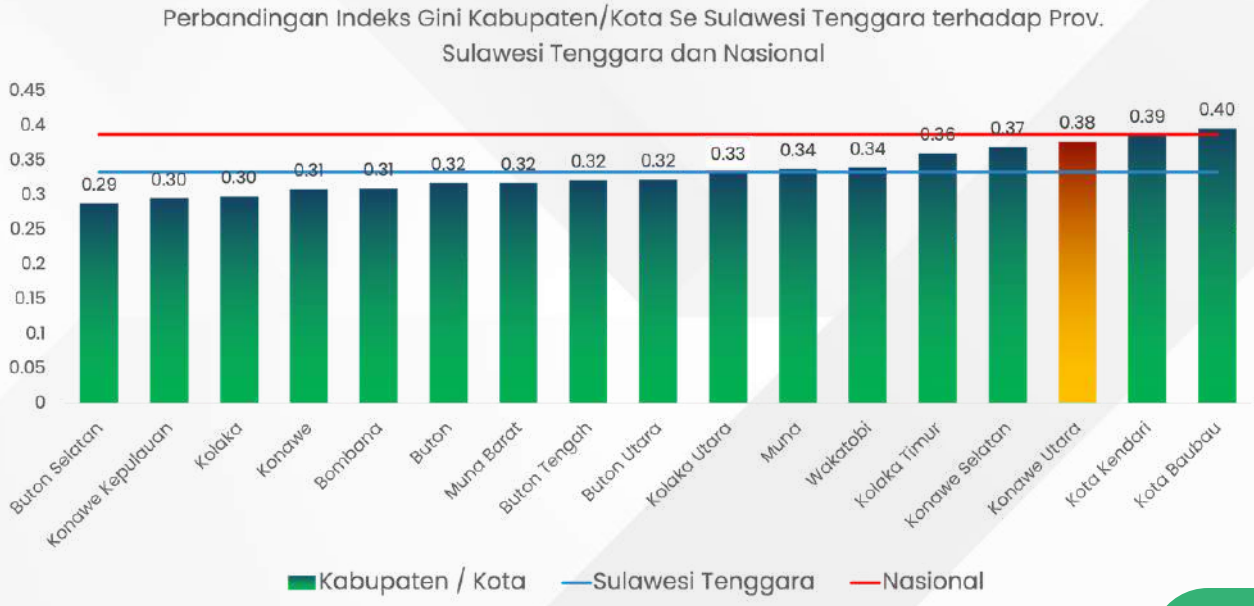


Hasil evaluasi capaian kinerja indikator Indeks Gini di 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021 mencapai 0,399%, tahun 2022 mencapai 0,370% dan tahun 2023 mencapai 0,378% dengan target sebesar 0,376% di tahun terakhir termasuk dalam kategori capaian "Sangat Baik" walaupun pada tahun 2023 belum mambu melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026.



Grafik capaian Indeks Gini menunjukkan Indeks Gini Konawe utara mengalami penurunan yang artinya ketimpangan di Konawe Utara mampu dipersempit dan menuju pemerataan pendapatan.

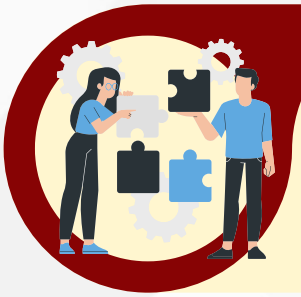
Posisi Kabupaten Konawe Utara menjadi yang ketiga tertinggi di Sulawesi Tenggara, diatas rata-rata provinsi namun masih di bawah nilai nasional. Untuk perbandingan terhadap target Akhir RPJMD, memiliki capaian sebesar 96,3%. Indeks Gini di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 diharapkan bisa diturunkan dengan mendorong empat kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Konawe Utara, yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; lapangan usaha pertambangan dan penggalian; lapangan usaha penyediaan konstruksi; dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.





Upaya yang dilakukan

- Penurunan stunting agar kualitas generasi emas dapat tercapai.
- Penurunan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem.
- Perluasan lapangan kerja
- menguatkan industri berbasis rakyat



Masalah yang dihadapi

- Kualitas SDM masih belum mampu bersaing dalam dunia kerja dan daya saing.
- Lapangan kerja belum mampu ditingkatkan secara signifikan
- Kendala permodalan untuk dasar usaha rakyat kecil
- Adanya kenyamanan hidup dibawah kemiskinan untuk selalu memperoleh bantuan dari pemerintah

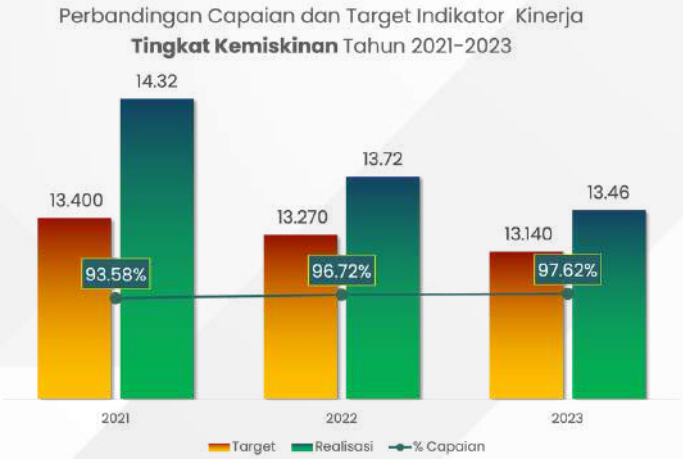


Solusi

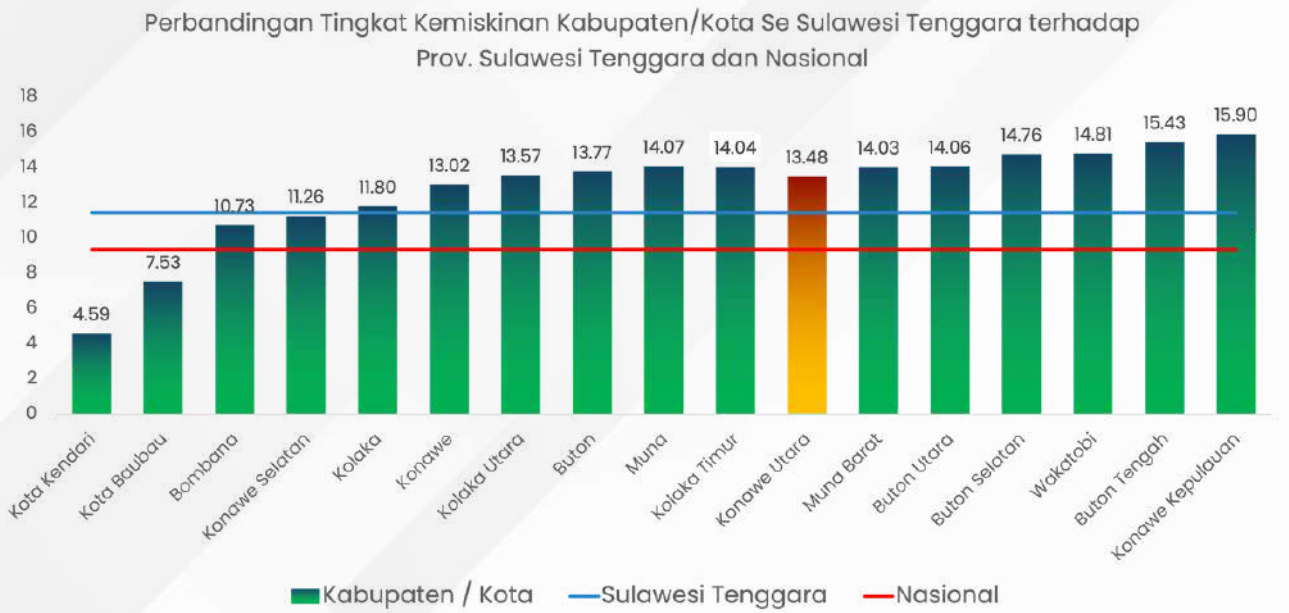
- peningkatan kualitas pelayanan dasar publik di tingkat lokal (air bersih, sanitasi, gizi, pengetahuan ibu,pelayanan kesehatan).
- Stabilisasi harga pangan, pengurangan beban penduduk miskin, dan subsidi tepat sasaran (program-program bantuan sosial).
- peningkatan keahlian dan sertifikasi, magang, kemitraan tentang industri, dan investasi yang menyerap tenaga kerja besar.

IKU-21 TINGKAT KEMISKINAN

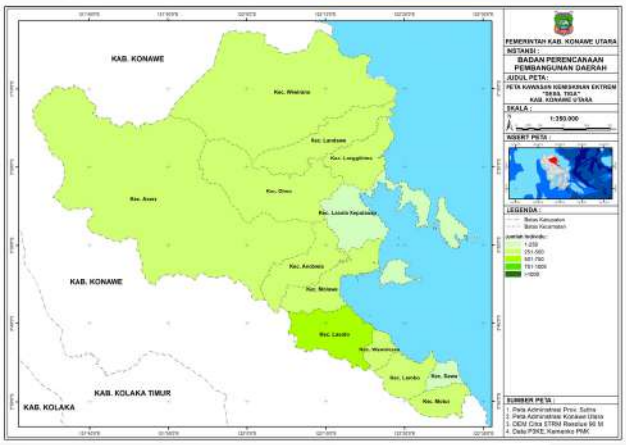
Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Kebutuhan dasar makanan merupakan pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2.100 kkal perkapita perhari (52 jenis komoditi), sedang kebutuhan dasar non makanan merupakan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lainnya (51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non makanan di pedesaan).

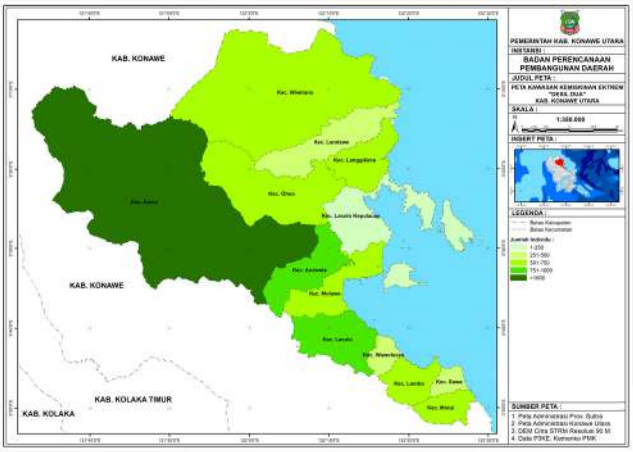


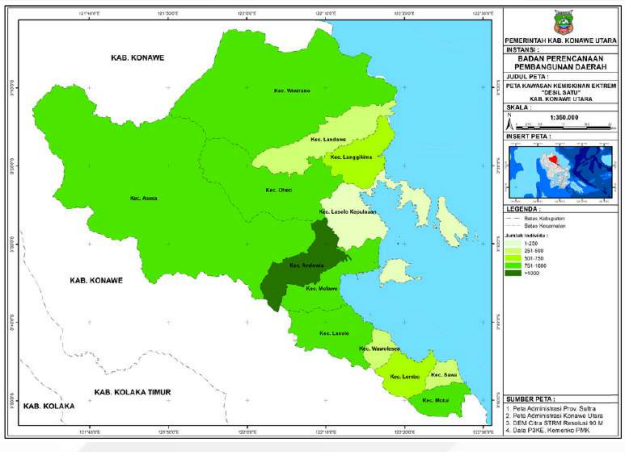
tahun 2021-2023 Kemiskinan terus mengalami penurunan. Hasil evaluasi capaian kinerja indikator Tingkat Kemiskinan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 mencapai 14,32%, tahun 2022 mencapai 13,72% dan tahun 2023 mencapai 13,46% termasuk dalam kategori capaian "Sangat Baik" yang berarti mengalami penururan setiap tahunya



Pada tahun 2023, Pemda Konawe Utara telah menyusun Rencana Penurunan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2028. Kebijakan yang dirumuskan melibatkan lintas sektor dan juga berfokus pada penurunan kemiskinan ekstrem. Data yang digunakan adalah Data Pensasaran Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemko PMK. Berdasarkan pemetaan dan pemutakhiran, telah diperolah data Desil 1-4 Kemiskinan di Konawe Utara. Selanjutnya akan menjadi sasaran pada Tahun 2023-2028.





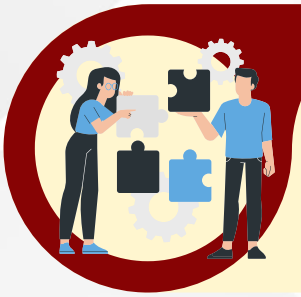


Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian penduduk berpendapatan menengah ke bawah akan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun peningkatan pemerataan pendapatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi dukungan dari masyarakat bergolongan ekonomi tinggi sangat diperlukan.



Upaya yang dilakukan

- Membuka peluang pertumbuhan kegiatan - kegiatan ekonomi baru yang berbasis masyarakat seperti pengembangan obyek wisata yang berbasis alam dan pengembangan usaha-usaha kuliner baru
- Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, hal ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras;
- Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin dengan pemberian bantuan untuk kegiatan produktif skala usaha mikro;
- Memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat serta pendampingan program yang berkelanjutan;
- Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan
- Membangun serta menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, seperti pemberian beras untuk warga miskin lansia.
- Pembentukan Unit Reaksi Cepat Penanggulangan kemiskinan ekstrem (URC-KIS) yang langsung menyasar target masyarakat miskin berdasarkan data P3KE by name by addres diharapkan mampu menghapus kemiskinan ekstrem sampai dengan tahun 2024 di Kabupaten Konawe Utara.



Masalah yang dihadapi

- Penurunan Kemiskinan cenderung lambat.
- bantuan Kemiskinan tidak tepat sasaran/tidak mengubah kondisi penerima.
- Potensi Ekonomi daerah belum maksimal dikembangkan.
- Peningkatan pemerataan pendapatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi dukungan dari masyarakat bergolongan ekonomi tinggi sangat diperlukan



Solusi

- Inovasi pengembangan aplikasi Dashboard pemantauan URC-KISS.
- Pengembangan obyek wisata yang berbasis alam dan pengembangan usaha-usaha kuliner baru
- Mengembangkan potensi daerah dengan mengusulkan Proyek Strategis Nasional masuk di Konawe Utara.
- Meningkatkan kerja sama dengan Investor di Bidang potensial Daerah.



Sasaran 9 MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR - SEKTOR UNGGULAN DAERAH

IKU-22 PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya.

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan sejak 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan yaitu pada tahun 2021 mencapai 39,76%, tahun 2022 mencapai 39,23% dan tahun 2023 mencapai 37,151% dari target yang telah ditetapkan sebesar 40,16%, termasuk dalam kategori capaian "Sangat Baik" walaupun belum melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 pada tahun 2023.



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, Indikator ini masih jauh dari target akhir tahun 2026 yang sebesar 40,58%. Tahun 2021 hingga 2023 capaian cendrung menurun, dalam arti pergeseran dari sektor primer ke sekunder.



Upaya yang dilakukan

- Adanya penyediaan sarana dan prasarana pertanian, Pelayanan kesehatan hewan, Ekstensifikasi pertanian dan peningkatan dan pengembangan kapasitas penyuluhan kepada penyuluh dan pelaku utama pertanian.
- Memaksimalkan kinerja penyuluh perkebunan dan hortikultura.
- Mengoptimalkan penggunanan sarana dan prasarana Perkebunan dan Hortikultura yang ada



Masalah yang dihadapi

- Realisasi APBD dalam penyediaan sarana pertanian, pemanfaatan lahan belum optimal dan SDM pelaku utama pertanian.
- Serang hama dan penyakit
- Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana



Solusi

- pengadaan sarana baik terutama benih tanaman menjadi prioritas di triwulan 1, penggaran optimalisasi lahan dan pengembangan lahan komoditi tanaman pangan, serta capacity building petani.
- Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha tanaman perkebunan dan hortikultura, adanya ketersediaan dana yang cukup, serta penggunaan benih varietas unggul yang bermutu dan berkualitas.

IKU-23 PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

PDRB Sektor ini meliputi usaha penggalian, pengeboran, pencucian, pengambilan dan pemanfaatan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di dalam tanah, baik yang berupa benda padat, benda cair maupun gas.

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator Pertumbuhsn PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian pada 3 tahun terakhir ini yaitu tahun 2021 mencapai 20,98%, tahun 2022 mencapai 22,13% dan tahun 2023 mencapai 24,81% dari target yang telah ditetapkan pada tahun ini yaitu 24,81% dengan capaian realisasi sebesar 115,99% serta termasuk dalam kategori capaian "Sangat Baik" sudah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026

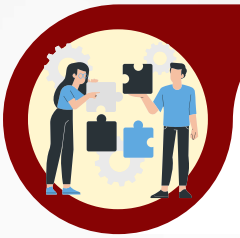


Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, Indikator ini telah melampaui target akhir tahun 2026 yang sebesar 21,54%%. Tahun 2021 hingga 2023 capaian cendrung meningkat dalam arti pergeseran dari sektor primer ke sekunder.



Upaya yang dilakukan

- Meningkatkan iklim investasi dengan memberikan kepastian hukum bagi investor
- Mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional di Kecamatan Motti (Smelter)



Masalah yang dihadapi

- Terbentur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk kawasan pertambangan dan peruntukkan lainnya.
- Banyaknya aksi demo akibat kerusakan alam pasca tambang



Solusi

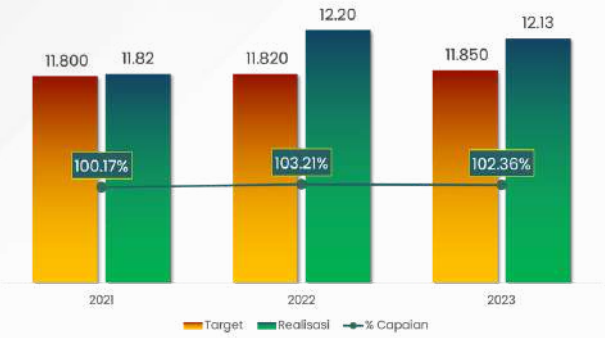
- Percepatan Revisi RTRW Kabupaten Konawe Utara.
- Perketat pemantauan dan pelaksanaan penghijauan pasca tambang.

IKU-24 PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERDAGANGAN

Kegiatan perdagangan terdiri dari perdagangan besar meliputi kegiatan pembelian dan penjualan kembali barang baik yang baru maupun yang bekas oleh pedagang dari pihak produsen atau importer kepada pedagang lain, perusahaan, lembaga atau konsumen tanpa merubah bentuk, dalam partai besar. Perdagangan eceran meliputi kegiatan pembelian dan penjualan kembali barang, umumnya melayani konsumen perorangan ataupun rumah tangga tanpa merubah bentuk, baik barang baru ataupun bekas secara eceran.

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan pada 3 tahun terakhir ini yaitu tahun 2021 mencapai 11,82%, tahun 2022 mencapai 12,2% dan tahun 2023 mencapai 12,13% dari target yang telah ditetapkan pada tahun ini yaitu 21,39% dengan capaian realisasi sebesar 102,36% serta termasuk dalam kategori capaian "Sangat Baik" sudah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026.

Perbandingan Capaian dan Target Indikator Kinerja
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2021-2023

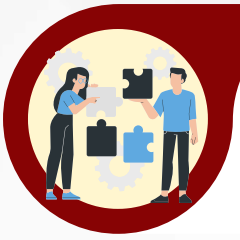


Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, Indikator ini telah melampaui target akhir tahun 2026 yang sebesar 11,91%. Tahun 2021 hingga 2023 capaian cendrung meningkat dalam arti pergeseran dari sektor primer ke sekunder dan tersier.



Upaya yang dilakukan

1. Monitoring harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat
2. Tersedianya barang lokal yang menjadi produk unggulan
3. Semakin meningkatnya daya beli masyarakat pasca pandemic



Masalah yang dihadapi

- Pengeluaran Pemerintah Daerah (dana Belanja Tidak terduga);
- Daya saing dan kualitas pemasaran



Solusi

- Pembangunan pasar-pasar baru dengan desain yang modern sehingga kenyamanan bertransaksi bagi pembeli dan penjual
- Menjaga harga stabilitas di pasar
- melakukan monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting Rutinnya lainnya

IKU-25 PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

PDRB sektor ini meliputi usaha kegiatan pengolahan bahan organik atau pun anorgaik menjadi produk baru yang lebih tinggi mutunya. Baik dilakukan dengan tangan, mesin atau proses kimiawi.

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator Pertumbuhsn PDRB Sektor Industri Pengolaanpada 3 tahun terakhir ini yaitu tahun 2021 mencapai 1,11%, tahun 2022 mencapai 1,03% dan tahun 2023 mencapai 0,80% dari target yang telah ditetapkan pada tahun ini yaitu 1,15% dengan capaian realisasi sebesar 69,56% serta termasuk dalam kategori capaian "Cukup baik" dan belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026.

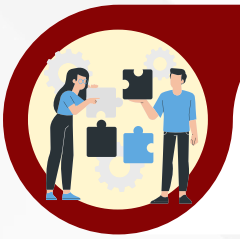


Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, Indikator ini sangat jauh dari target akhir tahun 2026 yang sebesar 1,18%. Tahun 2021 hingga 2023 capaian cendrung menurun.



Upaya yang dilakukan

- Bantuan kepada pelaku usaha industri kecil dan menangah
- Adanya kelompok - kelompok IKM yang dibentuk masyarakat desa



Masalah yang dihadapi

- Data IKM dan UMKM belum mutakhir
- Daya Saing IKM masih rendah dan belum sepenuhnya didukung permodalan yang memadai.



Solusi

- Melakukan Pemutakhiran data IKM dan UMKM
- Memberikan bantuan modal maupun sarana dan prasarana
- membuka lapangan usaha untuk indudtri kecil dan menengah.
- Menjalin kerjasama dengan perbankan untuk pesrmodalan.

IKU-26 PERSENTASE PAD SEKTOR PARIWISATA

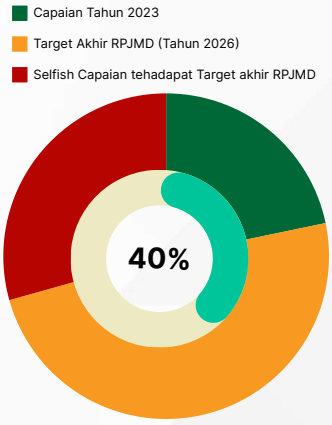
Sektor pariwisata dapat menjadi salah satu kegiatan dalam upaya pembangunan perekonomian karena memberikan dampak terhadap perekonomian di daerah yang dikunjungi wisatawan.

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator Pertumbuhsn PDRB Sektor Industri Pengolaan pada 3 tahun terakhir ini cenderung menurun yaitu tahun 2021 mencapai 0,043%, tahun 2022 mencapai 0,036% dan tahun 2023 mencapai 0,036% dari target yang telah ditetapkan pada tahun ini yaitu 0,06% dengan capaian realisasi sebesar 60,00% serta termasuk dalam kategori capaian "Cukup Baik" belum mampu melampaui target kinerja tahun 2023.

Sama halnya dengan sektor lainnya, pariwisata juga berpengaruh terhadap perekonomian di suatu daerah atau negara tujuan wisata. Selain itu, sektor pariwisata merupakan upaya pembangunan yang menghasilkan PAD bagi pemerintah. Sektor pariwisata berkontribusi terhadap PAD melalui penerimaan pada pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang bersumber dari daerah itu sendiri, yang pemungutannya berdasarkan perundang-udangan yang berlaku.



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, Indikator ini sangat jauh dari target akhir tahun 2026 yang sebesar 0,09%. Tahun 2021 hingga 2023 capaian cendrung menurun, dengan perbandaingan terhadap target akhir RPJMD sebesar 40%



Konawe Utara memiliki daya tarik pariwisata alam yang dapat dikembangkan seperti Pantai Taipa, Permandian Air Panas Wawolesea, Telaga Ladori, Telaga Tiga Warna, Pulau Labengki dan lainnya sehingga menjadi tujuan wisatawan domestic maupun mancanegara.



Desa Labengki di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra) raih peringkat ke-6 sebagai Desa Wisata Nasional 2023. Penghargaan tersebut diserahkan langsung dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI di Lombok, kepada Kepala Dinas Pariwisata Konut Riyas Aritman saat Malam Apresiasi Pemenang Lomba Desa Wisata Nusantara 2023, di Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Jumat, 24 November 2023. Penetapan Desa Labengki sebagai salah satu nominasi Desa Wisata Nasional, berdasarkan hasil penilaian presentasi, wawancara, dan verifikasi lapangan Lomba.



Upaya yang dilakukan

Meningkatkan pembangunan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata seperti Pemandu wisata, ekonomi kreatif



Masalah yang dihadapi

Kurangnya anggaran yang direalisasikan
Kurangnya kesadaran pengelola wisata dalam meningkatkan PAD Pariwisata



Solusi

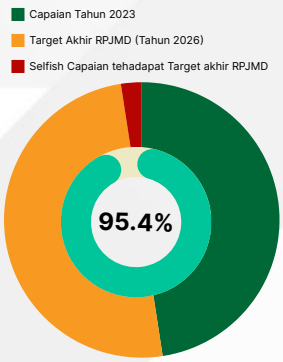
pembinaan atau pelatihan kepada pengelola wisata lebih ditingkatkan lagi.

IKU-27 NILAI OMSET USAHA KOPERASI

Jumlah omset yang dihasilkan dari usaha sektor koperasi adalah banyaknya omset yang dihasilkan dari usaha disektor koperasi yang dihasilkan selama kurun waktu. Hasil capaian kinerja omset yang dihasilkan dari usaha sektor koperasi pada 3 tahun terakhir ini yaitu tahun 2021 mencapai Rp. 682.260,-, tahun 2022 mencapai Rp. 816.192,-, dan tahun 2023 mencapai Rp.877.800,- dari target yang telah ditetapkan pada tahun ini yaitu Rp. 814.011,-, dengan capaian realisasi sebesar 107,84% serta termasuk dalam kategori capaian "Sangat Baik" sudah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, Indikator ini sangat jauh dari target akhir tahun 2026 yang sebesar 0,09%. Tahun 2021 hingga 2023 capaian cendrung menurun, dengan perbandaingan terhadap target akhir RPJMD sebesar 40%





Upaya yang dilakukan

Sosialiasi Kepada Masyarakat tentang Perkoperasian
Pembinaan dan Penyuluhan Koperasi secara terus-menerus
Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi
Pelatihan-Pelatihan Kapasitas SDM Koperasi



Masalah yang dihadapi

Masih kurang optimalnya volume usaha koperasi.
Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan bagi Koperasi
Jenis usaha koperasi yang kurang variatif dan masih rendahnya minat masyarakat untuk bergabung dalam keanggotaan sebuah Lembaga koperasi (masih fokus di simpan pinjam)
Kurangnya Pelatihan bagi SDM Koperasi



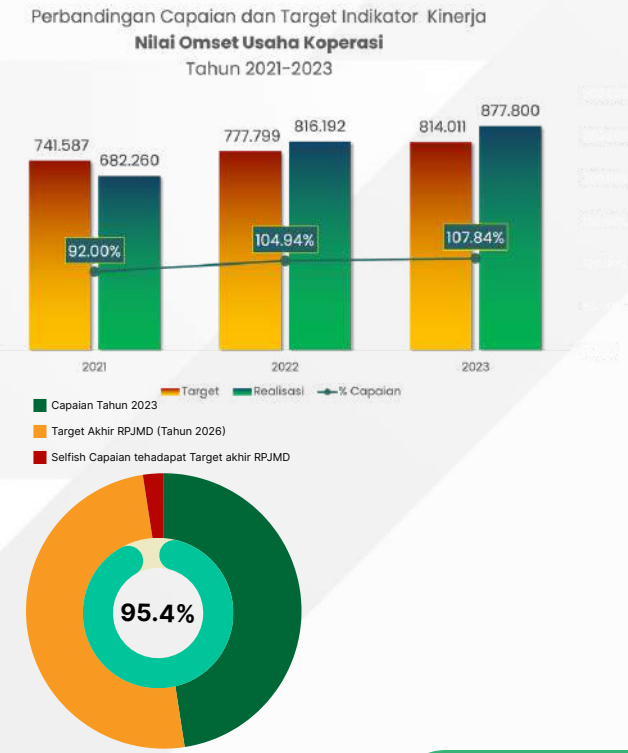
Solusi

Sosialiasi Kepada Masyarakat tentang Perkoperasian
Pembinaan dan Penyuluhan Koperasi secara terus-menerus
Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi
Pelatihan-Pelatihan Kapasitas SDM Koperasi

IKU-27 NILAI OMSET USAHA KOPERASI

Jumlah omset yang dihasilkan dari usaha sektor koperasi adalah banyaknya omset yang dihasilkan dari usaha disektor koperasi yang dihasilkan selama kurun waktu. Hasil capaian kinerja omset yang dihasilkan dari usaha sektor koperasi pada 3 tahun terakhir ini yaitu tahun 2021 mencapai Rp. 682.260,-, tahun 2022 mencapai Rp. 816.192,-, dan tahun 2023 mencapai Rp.877.800,- dari target yang telah ditetapkan pada tahun ini yaitu Rp. 814.011,-, dengan capaian realisasi sebesar 107,84% serta termasuk dalam kategori capaian "Sangat Baik" sudah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, Indikator ini sangat jauh dari target akhir tahun 2026 yang sebesar 0,09%. Tahun 2021 hingga 2023 capaian cendrung menurun, dengan perbandaingan terhadap target akhir RPJMD sebesar 40%



Sasaran 10 MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH

IKU-28 PERTUMBUHAN INVESTASI PMDN DAN PMA

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.
Kabupaten Konawe Utara yang kaya dengan berbagai potensi sumber daya alam, menjadi perhatian khusus bagi para penanam modal dalam negeri (1) maupun penanam modal asing (PMA) untuk berinvestasi.

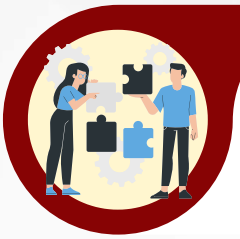


Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026, Indikator ini sudah melampaui target akhir tahun 2026 yang sebesar 21,63%. Tahun 2021 hingga 2023 capaian meningkat pesat, akibat realisasi investasi yang masuk di Konawe Utara



Upaya yang dilakukan

- Menciptakan iklim usaha yang serhat dan nyaman bagi investor
- Mempermudah perizinan
- Peraturan yang mendukung iklim usaha
- Percepatan dukungan infrastruktur untuk menyambut proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Motui.



Masalah yang dihadapi

- Masih cukup tingginya angka kriminalitas, demonstrasi dan kasus sosial lainnya.
- Belum ada progress kemajuan pelaksanaan PSN di Motui.



Solusi

- Menjaga ketertiban dan memaksimalkan fungsi Trantibunlinmas.
- Mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional untuk memperluas lapangan investasi.
- Berkoordinasi ke Pemerintah Pusat terkait kendala dan apa yang harus disiapkan oleh pemda.



MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL. MENDORONG REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

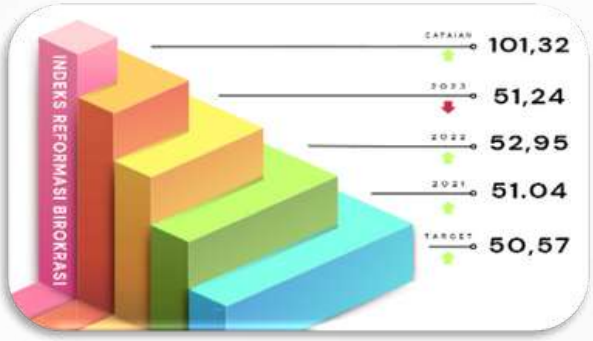
Tujuan 4 — MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

IKU-29 — INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek - aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.

Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe Utara di 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021 mencapai nilai 51,04, tahun 2022 mencapai nilai 52,95 dan tahun 2023 mencapai nilai 51,24 yang telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 50,57 dalam RPJMD dengan kategori “Sangat Baik”.

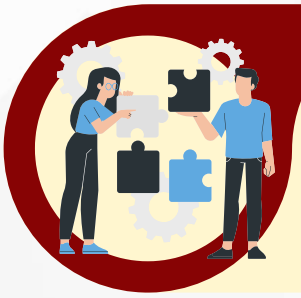


Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe Utara menunjukkan bahwa Pemerintah telah berupaya mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan lanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.



Upaya yang dilakukan

- Menyiapkan data Dukung yang diperlukan dalam penilaian
- Menindaklanjuti hasil evaluasi KemenPAN RB
- Menyusun rencana aksi RB General dan Tematik



Masalah yang dihadapi

- Pola fikir dan birokrat masih menempatkan diri sebagai penguasa bukan pelayan publik
- Budaya afliasi yang melekat sehingga mendorong terjadinya praktik KKN
- Komitmen pimpinan dalam modernisasi birokrasi dalam menerapkan system informasi



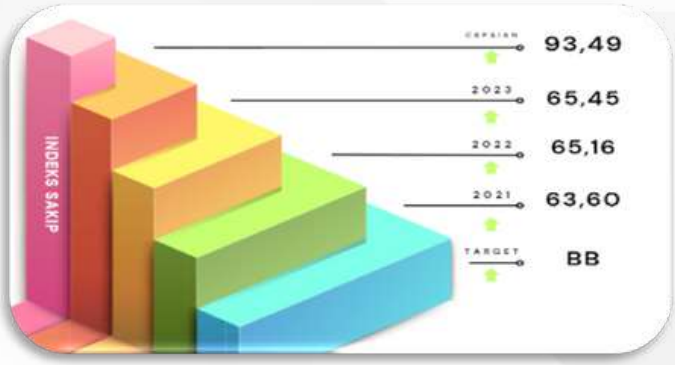
Solusi

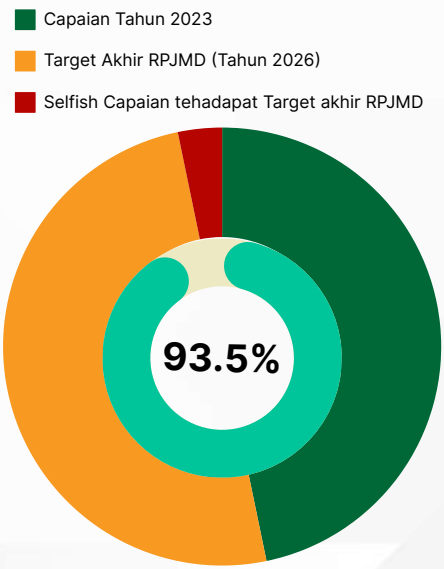
- Menerapkan system informasi dalam Pelayanan dan Kinerja
- Menyederhanakan prosedur yang rumit
- Mempercepat pelayanan kepada masyarakat
- Memberikan pelayanan yang berdampak kepada masyarakat

Sasaran 11 — MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

IKU-30 NILAI SAKIP

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terus mengalami peningkatan sejak 3 tahun terakhir telah mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2021 mencapai nilai 63,60, tahun 2022 mencapai nilai 65,16 dan tahun 2023 mencapai nilai 65,45 dengan realisasi capaian sebesar 93,49%. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.



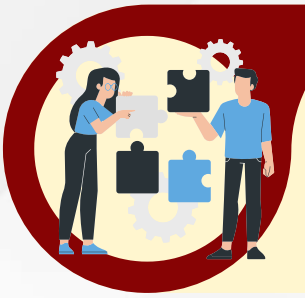


Capaian tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD mencapai 93.5%.



Upaya yang dilakukan

- Melaksanakan Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan PNS dalam upaya peningkatan dan penyusunan SAKIP



Masalah yang dihadapi

- Kurangnya komitmen dalam mengepankan akuntabilitas dari sis kinerja sehingga akuntailitas belum mendapat perhatian besar
- Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi pemerintah yang tidak menerapkan akuntabiltas kinerja
- Adanya keterbatasan SDM di bidang akuntabiltas kinerja dilingkungan pemda
- Belum terintegarasinya system SAKIP dengan system perencanaan nasional dan system penganggaran

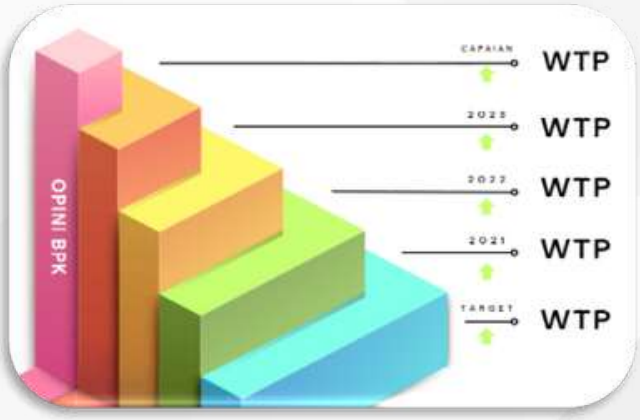


Solusi

- Menyusun dan mendorong penyusnan Peraturan perundag-undangan mengenai akuntabilitas kinerja
- Melaksanakan sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan SAKIP kepada OPD secara terus menerus dan berkelanjutan
- Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi SAKIP dan menilai kinerja unit kerja serta mendorong kualitas implementasi SAKIP
- Mendorong Penerapan prinsip good governance sehingga wilayah tersebut dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas
- Menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

IKU-31 OPINI BPK

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sejak 3 tahun terakhir ini yaitu dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)", Berdasarkan Laporan Hasil Pemerikasaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 tanggal 17 Mei 2023 Dengan demikian capaian indikator kinerja "Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah" tercapai 100%. Opini WTP telah diperoleh PemerintahKabupaten Konawe Utara sebanyak 6 kali berturut-turut sejak tahun 2017-2023. Realisasi target 100% dapat dikatakan bahwa pencapaian pada indikator ini memiliki kategori "Sangat Baik"





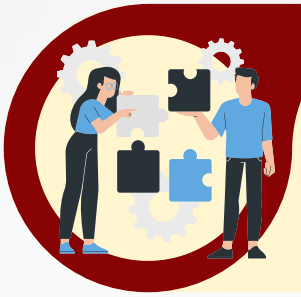
Opini tersebut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan informasi yangdisajikan dalam laporan keuangan telah cukup dan bebas dari salah saji yang material serta pelaporan keuangan yang telah berbasis akrual (accrual basis) yaitu akuntansi yang memberikangambaran lebih akurat dan komplek atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumla h hutang dan piutang, dalam laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan, telah memenuhi syarat- syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.





Upaya yang dilakukan

- Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI).
- Penyempurnaan Regulasi Tentang Kebijakan Akuntansi Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah,
- Meningkatkan Kapasitas Apartur Penyusun Laporan Keuangan dan Pengurus barang Pada Perangkat Daerah
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Aset dan Penyempurnaan Sistem Pengelolaan keuangan dan aset Daerah



Masalah yang dihadapi

- Sistem informasi keuangan daerah yang belum optimal
- Terlambatnya OPD dalam penyelesaian Laporan Keuangan di tingkat SKPD
- Adanya ketidaktepatan waktu OPD dalam pelaksanaan pelaporan yang sudah di jadwalkan.



Solusi

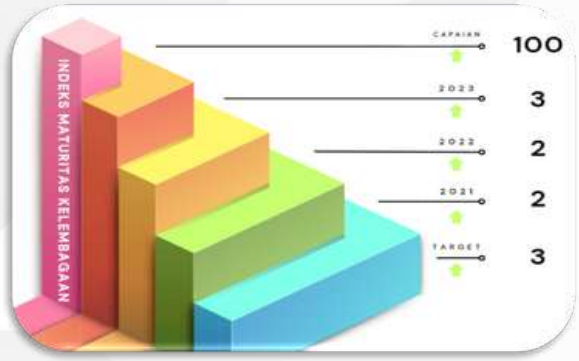
- Melakukan koordinasi antara pejabat penatausahaan keuangan (PPK) dan Bendahara OPD
- Melakukan Konsultasi Kepada Kementrian terkait.
- Memberikan Surat peringatan kepada OPD terkait yang telat menyampaikan laporan akuntabilitas

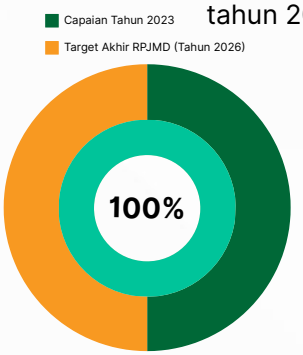
Sasaran 12 **TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG KAPABEL. OPTIMALNYA IMPLEMENTASI SPBE. SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG TERPERCAYA**

IKU-32 **INDEKS MATURITAS KELEMBAGAAN**

Indikator Level Kapabilitas APIP mencapai kinerja sebesar 100 % dengan capaian pada Level 3. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan adanya peningkatan signifikan kapabilitas APIP di Seluruh Indonesia dari level 1 hingga menjadi level 3 serta Grand Design dan Roadmap yaitu peningkatan kapabilitas APIP yang berkelas dunia.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada Tahun 2021, 2022, dan 2023 terlihat bahwa indikator mengalami peningkatan capaian kinerja dimana realisasi capain kinerja menjadi Level 3 atau 100%, dengan kategori Sangat Baik yang melampaui target yang telah ditetapkan pada RPJMD tahun 2021-2026.



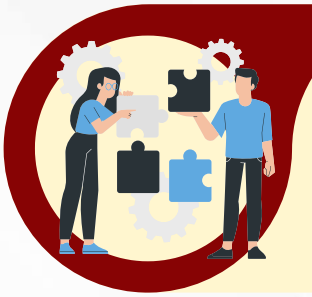


Capaian tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD mencapai 100%. (level 3).



Upaya yang dilakukan

- Sebagian PNS yang belum bersertifikat auditor yang ada di di perbantukan sebagai Auditor;
- Anggaran Belanja yang kelola TIM Pengawasan Kabupaten Konawe Utara digunakan semaksimal mungkin.
- Waktu pelaksanaan pengawasan dan monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan digunakan sesuai dengan Anggaran Belanja yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara.



Masalah yang dihadapi

- Masih kurangnya tenaga auditor dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan;
- Sering terlambatanya realisasi anggaran yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan;
- Waktu pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan serta monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara masih kurang maksimal, sehingga hasil yang diperoleh di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan



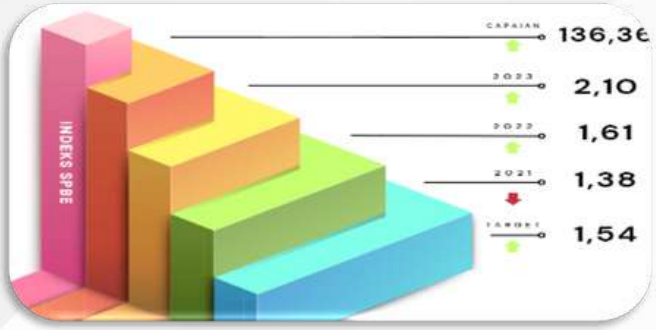
Solusi

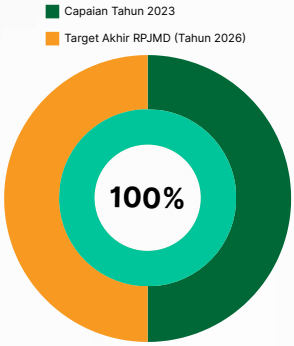
- Mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia aparatur yang dimiliki sesuai dengan tugasnya masingmasing dalam pelayanan masyarakatPencapaian tersebut didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Tim Pengawasan Kabupaten Konawe Utara dan seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara serta adanya peningkatan dari sisi penganggaran yang sangat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

IKU-33 INDEKS SPBE (SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan Layanan kepada Pengguna SPBE. Kebijakan pelaksanaan Program Aplikasi Informatika termuat dalam Rencana Induk pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Kabupaten Konawe Utara.

Capaian realisasi Indeks SPBE di 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 mencapai nilai 1,38, tahun 2022 mencapai nilai 1,61 dan tahun 2023 mencapai nilai 2,10 dari target yang telah ditetapkan yaitu 1,54 dengan mutu pelayanan Sangat Baik



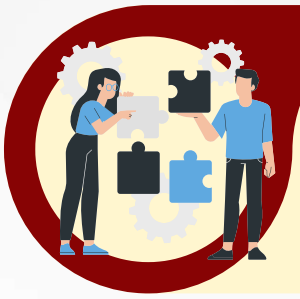


Capaian tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD mencapai lebih dari 100%. (2,10 dari target 1,78).



Upaya yang dilakukan

- Meningkatkan Pengelolaan SPBE melalui Peningkatan Infrastruktur dan SDM bidang TIK.



Masalah yang dihadapi

- Masih membutuhkan SDM bidang TIK
- Kurangnya SDM Jafung bidang Barang dan Jasa



Solusi

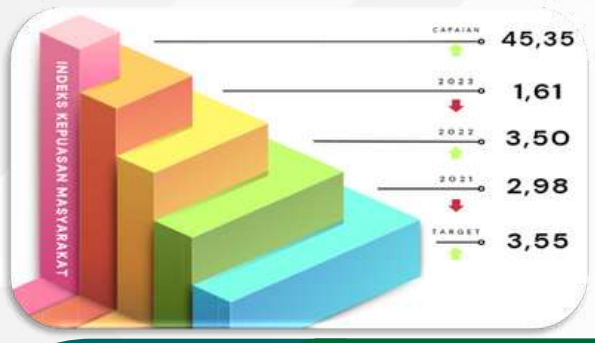
- Adanya Bimbingan teknis dan pelatihan bidang TIK tahun 2024.
- Pembukaan PPPK atau CPNS Jabatan Fungsional di Bagian Barang dan Jasa.

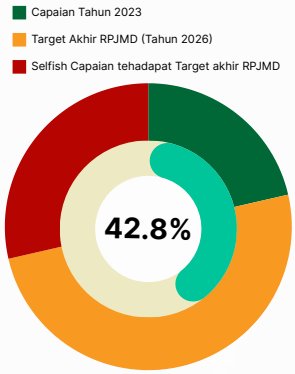
IKU-34 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Pencapaian ini didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara serta adanya peningkatan dari sisi penganggaran yang sangat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Gambaran capaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada 3 tahun terakhir ini yaitu tahun 2021 mencapai 2,98%, tahun 2022 mencapai 3,50 dan tahun 2023 mencapai 1,61% dari target sebesar 3,55%. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:





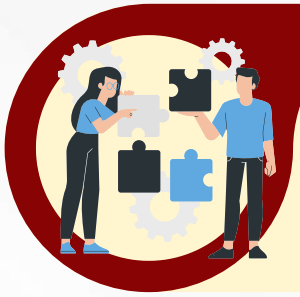


Capaian tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD masih dibawah 50%.



Upaya yang dilakukan

- Melakukan sosialisasi dan konsolidasi tentang pengembangan minat baca dan pentingnya tertib arsip sebagai memori dan rekam kerja yang akuntabel dan Layanan Jemput Bola di Desa & Kecamatan, Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), & Layanan Adminduk Via online.



Masalah yang dihadapi

- Kurangnya pemahaman tentang pentingnya berliterasi baik literasi baca tulis, budaya, ekonomi maupun digital, serta rendahnya pemahaman masyarakat pentingnya suatu arsip baik itu yang vital maupun arsip dinamis dan Gangguan jaringan komunikasi.



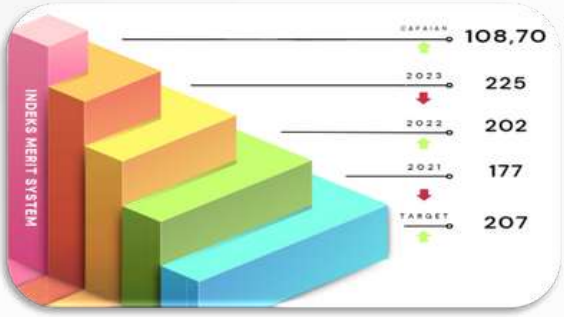
Solusi

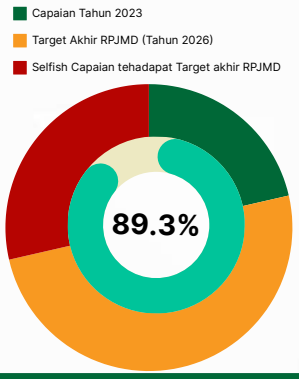
- Memberikan penguatan baik di tingkat sekolah maupun masyarakat serta di tingkat OPD tentang pentingnya penertibaan dan pengelolaan arsip yang baik dan benar sebagai rekam pengelolaan kinerja suatu Lembaga serta adanya pelayanan diluar jam kerja.

Sasaran 13 MENINGKATNYA KUALITAS MANAJEMEN ASN

IKU-35 INDEKS MERIT SYSTEM

Merit System ASN adalah merupakan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara berdasarkan prestasi kerja. Disadari atau tidak, kualitas ASN di Indonesia masih banyak bermental priyai daripada bermental melayani. ASN adalah pilar utama yang bertugas melayani kepentingan publik dan bersinggungan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu sudah semestinyalah tiap aparatur memiliki kualitas yang baik agar mampu menjalankan tugasnya secara tepat dan benar. Nilai capaian realisasi Indeks Merit System mulai tahun 2021 mencapai 177%, tahun 2022 mencapai 202% dan tahun 2023 mencapai 225% dari target yang telah ditetapkan sebesar 207% dengan kategori "Sangat Baik





Capaian tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD sebesar 89.3% (nilai 225 dari target 252)



Upaya yang dilakukan

- Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan pegawai
- Menetapkan standar kompetensi dan membangun instrument pendukungnya.
- Membangun target kinerja individu yang selaras dengan target kinerja unit



Masalah yang dihadapi

- Rendahnya pemahaman ASN mengenai penerapan Sitem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN
- Rendahnya anggaran dan fasilitasi pendukung yang dimiliki oleh instansi
- Kuatnya intervensi poltik



Solusi

- Membuat buku pedoman, juklak dan juknis penilaian penerapan system merit
- Menjadikan instasni pemerintah yang telah mendapat kategori baik untuk menjadi mitra KASN
- Melaksanakan BIMTEK kepada Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit

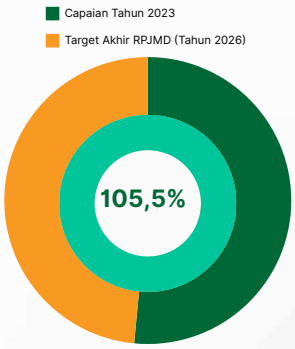
Sasaran 14 MENINGKATNYA KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA

IKU-36 INDEKS DESA MEMBANGUN

Indeks Desa Membangun adalah gambaran tentang data dasar pembangunan serta penetapan status kemajuan dan kemandirian desa. Indeks Desa Membangun dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia terhadap upaya pemerintah dalam menangani Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa Mandiri. Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).



capaian Indeks Desa Membangun tahun 2021 sebesar 0,6254% dan tahun 2022 sebesar 0,6545% dan tahun 2023 sebesar 0,6757% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,6128% dengan kategori "Sangat Baik. Capaian tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD sebesar melebihi 100%.





Upaya yang dilakukan

- Menggali permaslaahan yang ada di desa dan mencari solusi demi terlaksananya Percepatan Pembangunan desa
- Meningkatkan Kualitas pelaksanaan Pembangunan Desa



Masalah yang dihadapi

- Penyebaran Penduduk belum merata sehingga daerah yang padat penduduknya tidak memiliki tanah Garapan
- Perbedaan adat kebiasaan dan tingkat social ekonomi disetiap desa
- Matoritas penduduk desa bermata pencaharian belum tetap



Solusi

- Komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten, Kecamtan, Desa dan Tenaga Pendamping Desa untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan Pembangnan Desa untuk memajukan dan memandirikan masyarakat menjadi sejahtera

MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA

Tujuan 5 MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

IKU-37 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah sebuah alat untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. IKLH menggabungkan beberapa parameter lingkungan hidup seperti kualitas udara, kualitas air, keberlanjutan sumber daya alam, dan kebersihan lingkungan, serta faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kualitas lingkungan.



Realisasi kinerja terhadap indikator Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara tahun2021 sebesar 59,67%, tahun 2022 sebesar 62,72 % dan tahun 2023 58,85% dari target 61,33%, sehingga capaian kinerja indikator sebesar 95,96%. masuk dalam kategori “Sangat Baik”.

Pembangunan wilayah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan pelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat, serta penataan ruang.



Upaya yang dilakukan

- Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air
- Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan Pembangunan air limbah ke badan air sesuai perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar
- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasaranan pengelolaan air limbah dometik dan USK khususnya untuk masyarakat
- Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestik
- Meningkatkan pelibatan Masyarakat, usaha dan/atau kegiatan, serta Lembaga K/L lain terhadap usahan peningkatan kualitas air
- Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah

Sasaran 15 TERJAGANYA KUALITAS PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

IKU-38 PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PERENCANAAN TATA RUANG

Peninjauan Kembali (PK) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 Kabupaten Konawe Utara tentang RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032 telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Hasil rekomendasi PK RTRW yaitu dilakukan review RTRW. Namun sampai dengan tahun 2021 karena keterbatasan anggaran dan panjangnya proses penyusunan hingga penetapan, untuk itu perlu dilakukan upaya dan langkah percepatan dalam penyelesaian revisi RTRW Kabupaten Kabupaten Konawe Utara 2012-2032 pada tahun 2023.

Realisasi kinerja terhadap indikator Ketaatan Terhadap `Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Konawe Utara 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021 mencapai 80%, tahun 2022 mencapai 82,34% dan tahun 2023 mencapai 82,26% dari target 81,47%, sehingga capaian kinerja indikator sebesar 100,97% masuk dalam kategori “Sangat Baik”.



Penerbitan izin kesesuaian pemanfaatan ruang untuk berbagai peruntukkan di laksanakan melalui mekanisme pengajuan permohonan, pembahasan di tingkat Tim Koordinasi Ruang Daerah (TKPRD) sampai pada keluarnya rekomendasi kesesuaian tata ruang. Metode analisis penentuan kesesuaian pemanfaatan ruang dan faktor perubahan kesesuaian pemanfaatan ruang dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan analisis overlay dengan bantuan Sistem Informasi Geografi (SIG). Cek lapangan dilakukan untuk mencocokan antara data pemanfaatan ruang hasil interpretasi Peta Citra yang ada dengan keadaan sebenarnyadilapangan beserta dokumentasi bentuk pemanfaatan ruang di lapangan, sehingga dapat digunakan untuk uji akurasi/ketelitian interpretasi, serta untuk membatasi pemanfaatan ruang aktual dan perubahannya.



Bupati Konawe Utara Usulkan Berbagai Hal Saat Rakor RTRW Sultra 2023-2043 di Jakarta



Upaya yang dilakukan

- Peningkatan kepatuhan pemangku kepentingan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan



Masalah yang dihadapi

- Adanya konflik kepentingan antar sector
- Terjadinya penjimpangan pemanfaatan ruang
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang
- Terjadinya konflik kepentingan



Solusi

- Meningkatkan sinkronisasi perencanaan
- Mengevaluasi anggaran perencanaan
- Merevisi tata ruang wilayah sesuai permintaan

Sasaran 16 **MENURUNNYA TINGKAT PENCEMARAN AIR DAN UDARA**

IKU-39 **INDEKS KUALITAS AIR DAN UDARA**

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. bergantung pada standar kualitas udara di negara masing-masing. Dari tabel capaian pengukuran terhadap indikator Indeks Kualitas Air dan Udara di atas, diketahui bahwa dari targetIndeks Kualitas Air dan Udara sebesar 94,80%, yang tercapai dari tahun 2021 mencapai 93,317%, tahun 2022 sebesar 95,48% dan tahun 2023 mencapai 95,05% atau sekitar 100,26% dengan kategori "Sangat Baik", ini berarti bahwa setiap tahun Tingkat Pencemaran Air dan Udara di Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan yang signifikan.



Pemantauan kualitas air sungai merupakan bagian dari upaya pengelolaan kualitas air yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas air sungai di Kabupaten Konawe Utara. Pengambilan sampel kualitas air sungai dilaksanakan oleh Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sedangkan pengujian sampel dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah terakreditasi. Pemantauan kualitas air sungai meliputi kegiatan pengambilan sampel, pengukurun debit, dan pengamatan kondisi sekitar sungai. Yang selanjutnya akan diuji di laboratorium untuk mengetahui nilai per parameternya.



Dari beberapa desa yang ada di kabupaten Konawe Utara yang dialiri sungai maka ditetapkan 10 lokasi desa yang dijadikan sampel pengujian kualitas air.

Hasil uji kualitas air sungai untuk setiap parameter selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu kualitas air sungai sesuai dengan kelas peruntukannya. Berdasarkan analisa hasil uji pemantauan yang dilakukan pada Laboratorium Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diketahui bahwa Status Mutu Kualitas Air di Kabupaten Konawe Utara tidak melebihi baku mutu kualitas air sungai atau dengan kategori **Tidak Tercemar.**

1. Air Sungai Landawe Hulu di Desa Tetewatu
2. Air Sungai Landawe Hilir di Desa Landiwo
3. Air Sungai Wiwirano Hulu di Desa Lamonae
4. Air Sungai Wiwirano Hilir di Desa Hialu
5. Air Sungai Oheo Hulu di Desa Linomoiyo
6. Air Sungai Oheo Hilir di Desa Linomoiyo
7. Air Sungai Asera Hulu di Desa Asera
8. Air Sungai Asera Hilir di Desa Asera
9. Air Sungai Andowia Hulu di Desa Laronanga
10. Air Sungai Andowia Hilir di Desa Laronanga



Upaya yang dilakukan

- Rutin melalkuka upaya pembersihan Sumber air
- Memeperluas gerakan penghijauan



Masalah yang dihadapi

- Kurangnya kesadaran diri untuk membuang sampah pada temaptnya
- Kurangnya system drainase dijalan-jalan
- Limbah Pabrik mengalir ke sungai



Solusi

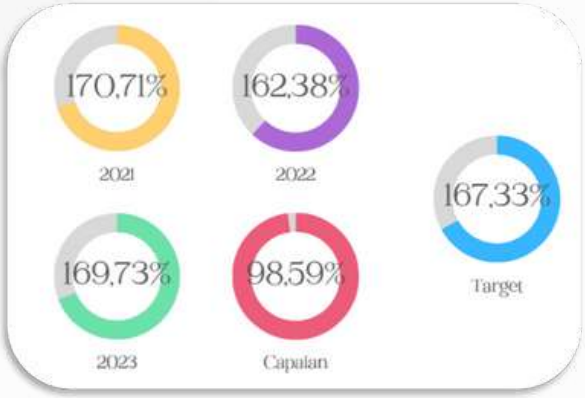
- Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap masyarakat dan perusahaan tentang arti lingkungan hidup secara intens
- Menggunakan bahan bahan yang ramah lingkungan
- Tidak membuang sampah disungai atau sumber air lainnya
- Memberikan tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran lingkungan

Sasaran 17 TERWUJUDNYA TATA KELOLA DAN MANAJEMEN BENCANA

IKU-40 INDEKS RESIKO BENCANA

Indeks Resiko Bencana menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas suatu daerah, sehingga hasil akhir dari acara sosialisasi dan lokakarya yang berupa IRBI sangat penting untuk menyusun rencana pembangunan.

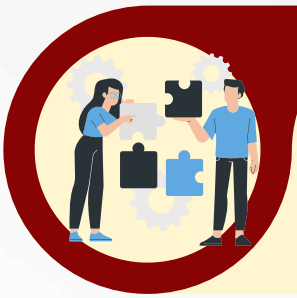
Berdasarkan data IRBI diketahui bahwa dari target Indeks Resiko Bencana sebesar 167,33%, yang tercapai pada 3 tahun terakhir ini yaitu tahun 2021 mencapai 170,71%, tahun 2022 mencapai 170,71 2022 sebesar 162,38% dan tahun 2023 mencapai 169,73% atau sekitar 101,43.





Upaya yang dilakukan

- Adanya dukungan dari pemerintah Pusat
- Semangat gotong royong masyarakat dan kebersamaan masyarakat yang tinggi
- Penyedian sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui program pemda dan pusat
- Adanya dukungan dana rehabilitas pasca bencana untuk kerusakan



Masalah yang dihadapi

- Luasnya cakupan wilayah
- Belum terpenuhinya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi dalam penaggulangan bencana
- Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas maupun kualitas



Solusi

- Melaksanakan simulasi
- Membangun koordinasi dengan berbagai stakeholders melalui forum pengurangan resiko bencana
- Memfasilitasi TIM Teaksi Cepat dalam evakuasi bencana



MISI 6 : MEMBANGUN PERADABAN MASYARAKAT YANG BERTUMPU PADA NILAI - NILAI KEAGAMAAN DAN KEBUDAYAAN LOKAL

Tujuan 6 MELESTARIKAN SENI BUDAYA LOKAL

IKU-41 PERSENTASE KAPASITAS LEMBAGA ADAT YANG DIBINA

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan- peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. Peningkatan kapasitas lembaga adat penting untuk dilakukan guna mendukung pembangunan sumber daya manusia, sejak di tingkat Nagari sehingga memiliki kualitas untuk bersaing di tingkat nasional

Dari tabel capaian pengukuran terhadap indikator Kapasitas Lembaga Adat yang dibina di atas, diketahui bahwa dari target Kapasitas Lembaga Adat yang di bina sebsar 100%, yang tercapai sejak tahun 2021-2023 adalah sebesar 100%.





Disaksikan Kakanwil Kemenag Sultra dan Bupati Konawe Utara, Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki melaunching Kampung Moderasi Beragama (KMB) pada dua Kecamatan di Kab. Konawe Utara, Rabu 26 Juli 2023.
Dua KMB di Konawe Utara yang dilaunching yakni Desa Watumelewe Kec. Wiwirano dan Desa Pariama Kec. Langgikima. Turut menyaksikan seluruh jajaraan Forkopimda, perwakilan para tokoh dan majelis agama, tokoh masyarakat se Prov. Sultra dan pengurus FKUB Prov. Sultra.program ini adalah langkah yang sangat positif dalam mempromosikan perdamaian toleransi moderasi dalam beragama. Ditengah masyarakat kita dengan kompleksnya masalah yang dihadapi dunia saat ini penting untuk bersama menjaga kerukunan dan keberagaman serta melibatkan banyak masyarakat secara aktif dalam membangun moderasi beragama di lingkungan masing-masing. Ini mencerminkan pengakuan akan kekuatan dan peran masyarakat dalam menciptakan perubahan positif dengan melibatkan warga setempat kita bisa menciptakan hasil lebih baik dan berkelanjutan.

Sasaran 18 MENINGKATNYA INTENSITAS EVENT SENI BUDAYA YANG DISELENGGARAKAN

IKU-42 JUMLAH PENYELENGGARAAN EVENT SENI BUDAYA

Penyelenggaraan festival seni dan budaya merupakan indikator untuk mengukur capaian sasaran strategis dalam penguatan kebudayaan sebagai identitas daerah di Kabupaten Konawe Utara. Realisasi rasio Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2023 telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 4 dari 3 target yaitu sebesar 133,33% dengan Kategori "Sangat Baik".



Jumlah Event Pariwisata di tahun 2023 terdiri dari 4 Event/Kegiatan yakni Festival KonasaraEvent Hut ke 17, Jalan Sehat Konasara Sultra-Kendari Pos, dan Carnaval Budaya Tahun 2023.
Hallo Sultra merupakan agenda tahunan dalam rangka merayakan hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tenggara, Prinsip dasar integrasi pengembangan Pembangunan di semua sektor adalah menjadikan wilayah Konawe Utara sebagai salah satu Kabupaten unggulan serta penopang "Masa Depan Indonesia".

Terkait dengan agenda besar yang dicanangkan pemerintah Konawe Utara, salah satu yang menjadi prioritas adalah promosi daerah dengan segala sumber dayanya, dimana salah satu agenda adalah :

- **Menjadikan Hari ulang Tahun Sulawesi Tenggara di setiap tahunnya sebagai agenda rutin yang berskala Nasional dan Internasional**. Dimana dalam program ini, agenda utama di dalamnya meliputi Pameran produk unggulan, Pemilihan Putra-Putri Pariwisata, Festival tenun Karnaval, Lomba Kuliner dll, semua yang terkait dengan promosi sumber daya alam.



- Selain itu, Pemerintah Konawe Utara juga **berperan dalam event berskala nasional Pameran Kemilau Sulawesi** dengan menampilkan berbagai wisata minat khusus seperti Arung Jeram Lalindu, tracking wisata mangrove sebagai penunjang **Obyek Daya Tarik Wisata unggulan yang ada di Konawe Utara yang akan semakin memperluas kemitraan, ajang promosi, investasi dan membuka peluang kerjasama bisnis, dan silaturahim bagi sesama**, mengingat Konawe Utara saat ini tengah menjalin kerjasama dengan Perusahaan dari mancanegara yang akan berpengaruh pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di destinasi Konawe utara.
- **Penyelenggaraan Festival Konasara dan Ekspo Konasara Tahun 2023**, dimana dalam festival tersebut, ditampilkan keunggulan-keunggulan atau ciri khas Daerah Kabupaten Konawe Utara kepada baik dalam negeri maupun manca negara, salah satu keunggulan daerah kabupaten konawe utara adalah dalam bidang pariwisata. Pariwisata kabupaten konawe utara sangat dikenal di nusantara dan manca negara, sehingga sangat memungkinkan parawisatawan berinisiatif untuk datang ke konawe utara dalam berwisata, dan ini dapat meningkatkan pendapatan daerah kabupaten konawe utara.
-

IKU-43 INDEKS KERUKUNAN BERAGAMA

Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia sangat dinamis. Ini menjadi salah satu potensi besar dalam keberagaman. Maka perlu upaya untuk meningkatkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan termasuk juga di Kabupaten Konawe Utara. Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia sangat dinamis. Ini menjadi salah satu potensi besar dalam keberagaman.

Dari tabel capaian pengukuran terhadap indikator Indeks Kerukunan Beragama dari Tahun 2021 mencapai 74,29%, tahun 2022 mencapai 79,9% dan tahun 2023 mencapai 75,5% dari target yang telah ditentukan yaitu 75,03% atau realisasi capaian sebesar 100,63%.



Indeks kerukunan dimaksud dibentuk dari tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesataraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.
Data terhimpun dari Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa pada tahun 2023 terdapat 229 tempat ibadah di Konawe Utara yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan rincian 188unit Masjid, 7 Mushola, 18 Gereja dan 16 Pura

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap ketersediaan sarana tempat ibadah dan jumlah penduduk tahun 2023 dapat diketahui bahwa rasio Tempat ibadah per satuan penduduk, dengan formula indikator Jumlah tempat ibadah dikali 1.000 dibanding jumlah penduduk pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 4 tempat ibadah per 1.000 penduduk di Kabupaten Konawe Utara. Program yang konsisten dilaksanakan oleh Pemerintah Konawe Utara untuk mendukung capaian sasaran ini adalah melalui Program Peningkatan Pelayanan.



Upaya yang dilakukan

- Menigkatkan pemahaman tentang agama dan beragama
- Menghindari penyebaran berita hoaks yang berkaitan dengan agama
- Meningkatan partisipasi dalam kegiatan lintas agama
- mendampingi dan memfasilitasi forum kerukunan umat beragama



Masalah yang dihadapi

- Kurangnya memahami ajaran agama dan peraturan pemerintah dalam hal kehidupan beragama
- Perbedaan latar belakang dan identitas suku agama masyarakat yang rentan digunakan sebagai pemecah persatuan melalui politik



Solusi

- menanamkan nilai-nilai ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda serta memberikan pendidikan politik politik bagi masyarakat agar tidak mudah terpecah belah.
- Menerapakan sikap toleransi dan tenggang rasa dengan melaksanakan sejumlah kegiatan Bersama-sama (gotong royong).
- Mengedepankan musyawarah.

Sasaran 19 MENINGKATNYA PENGELOLAAN POTENSI KONFLIK SOSIAL

IKU-43 PERSENTASE PENGELOLAAN POTENSI KONFLIK SOSIAL

Berdasarkan pada tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada indikator kinerja persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial, dari awal tahun 2021sampai dengan tahun 2023 seluruh target perencanaan mencapai 100 % dengan kategori Sangat Baik, dengan jumlah konflik sebesar 17 konflik . Sehingga dengan demikian jika dicermati secara seksama tabel diatas maka secara keseluruhan persentase capaian kinerja sasaran strategis Badan Kesbangpol Kab. Konawe Utara "Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial" dimana pada periode perencanaan awal tahun sampai pada tahun 2023 mencapai 100% , dengan demikian rata-rata capaian kinerja pada kurun waktu tersebut adalah 100 %. Hal ini disebabkan karena adanya rasa solidaritas dan kekompakan seluruh stakeholder Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab. Konawe Utara.





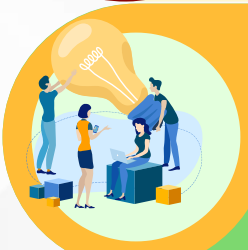
Upaya yang dilakukan

- Adanya Komitmen dan keteladanan Pimpinn
- Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara Negara
- Adanya pematauan dan Evaluasi atas setiap konflik yang ada



Masalah yang dihadapi

- Perbedaan tujuan /tidak sepaham antara individu dan kelompok
- Saling bergantungan dalam pekerjaan



Solusi

- Kompromi dimana pihak masing masing yang terlibat mengurangi tuntutan
- Saling menghargai dan menghormati pendirian masing masing pihak
- (Konversi) Mau mengalah dan menerima pendirian pihak lain
- Konsiliasi mempertemukan pihak-pihak yang bertentangan dalam sebuah perundingan uantuk memperoleh kesepakatan bersama

3.1.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL KINERJA YANG TELAH DICAPAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan yang terdiri atas efiseinsi sumber daya biaya dan sumber daya manusia serta dukungan sarana dan prasaran. Berikut diuraikan analisis mengenai efiseinsi penggunaan sumber daya dalam pencapaian setiap tujuan misi Kabupaten Konawe Utara.

Tujuan 1 **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Terdiri atas 6 Sasaran Strategis yaitu :

Sasaran 1 **Meningkatnya Akses Pendidikan**

Terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 41.011.455.231,- dengan realisasi Rp. 34.385.889.303,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 83,84%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permaslahan diantaranya Refocussing Program dan kegaiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 2 **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

Terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Angka Usia Harapan Hidup. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp.44.103.248.757,- dengan realisasi Rp. 40,733.904.210,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 92,36%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permaslahan diantaranya Refocussing Program dan kegaiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 3 **Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak**

Terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Indeks Pembagunan Gender dan Kota Layak Anak. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 21.240.558.800,- dengan realisasi Rp. 21.190.212.600,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 99,76%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permaslahan diantaranya Refocussing Program dan kegaiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 4 **Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Produktif**

Terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Indeks Pembagunan Gender dan Kota Layak Anak. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 21.240.558.800,- dengan realisasi Rp. 21.190.212.600,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 99,76%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permaslahan diantaranya Refocussing Program dan kegaiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 5 **Meningkatnya Ketahanan Pangan**

Terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Skor Pola Pangan Harapan. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp.6.510.896.890,- dengan realisasi Rp. 5.508.878.500,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 84,61%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permaslahan diantaranya Refocussing Program dan kegaiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 6 **Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial**

Terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Presentase Penurunan Warga Miskin. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp.10.763.358.300,- dengan realisasi Rp. 10.180.009.000,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 94,58%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permaslahan diantaranya Refocussing Program dan kegaiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah dittapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Tujuan 2 **Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan Kawasan Permukiman**

Terdiri atas 2 Sasaran Strategis yaitu :

Sasaran 1 **Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah**

Terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu Presentase keterhubungan/Konetivitas Wilayah, Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap dan Presentase DI yang Terlayani Jaringan Irigasi. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 359.594.412.291,- dengan realisasi Rp. 296.248.665.063,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 82,38%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permaslahan diantaranya Refocussing Program dan kegaiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 2 **Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman**

Terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu Presentase kawasan Pemukiman Perkotaan/Pedesaan yang, Rasio Akses Air Minum, Rasio Akses Sanitasi Layak dan Cakupan Layanan Persampahan. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 29.041.012.942,- dengan realisasi Rp. 28.839.581.000,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 99,31%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permaslahan diantaranya Refocussing Program dan kegaiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Tujuan 3 **Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi**

Terdiri atas 2 Sasaran Strategis yaitu :

Sasaran 1 **Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah**

Terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Perkapita, Tingkat Penagngguran Terbuka, Indeks Gini dan Tingkat Kemiskinan. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp.138.080.533.101,- dengan realisasi Rp. 132.125.095.548,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 95,69%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permaslahan diantaranya Refocussing Program dan kegaiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 2 **Meningkatnya Investasi Daerah**

Terdiri dari 6 (enam) Indikator Kinerja yaitu Pertumbuhan PDRB sektor Kehutanan dan Perikanan, Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, Presentase PAD Sektor Pariwisata dan Nilai Omset Usaha Koperasi. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp.2.380.532.000,- dengan realisasi Rp. 2.258.125.000,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 94,86%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permaslahan diantaranya Refocussing Program dan kegaiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Tujuan 4 **Meningkatkan Kulaitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**

Terdiri atas 2 Sasaran Strategis yaitu :

Sasaran 1 **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Opini BPK. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp.292.311.947.186,- dengan realisasi Rp. 160.577.585.662,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 54,93%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permaslahan diantaranya Refocussing Program dan kegaiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 2 **Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Optimalnya Implementasi SPBE, serta Pelayanan Publik yang Terpercaya.**

Terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu Indeks Maturitas Kelembagaan, Indeks SPBE dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 58.622.976.521,- dengan realisasi Rp. 55.691.837.620,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 95,00%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permaslahan diantaranya Refocussing Program dan kegaiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 3 **Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN**

Terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Indeks Merit System. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 7.749.523.875,-dengan realisasi Rp. 7.030.020.837,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 90,72%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permaslahan diantaranya Refocussing Program dan kegaiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 4 **Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa**

Terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Indeks Desa Membangun (IDM). Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp.5.718.238.567,- dengan realisasi Rp. 5.483.846.950,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 95,90%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permaslahan diantaranya Refocussing Program dan kegaiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Tujuan 5 **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana**

Terdiri atas 3 Sasaran Strategis yaitu :

Sasaran 1 **Terjaganya Kualitas Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Ketaatan terhadap Perencanaan Tata Ruang. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 2,941.300.000,- dengan realisasi Rp. 2.568,683.050,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 87,33%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permaslahan diantaranya Refocussing Program dan kegaiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 2 **Menurunnya Tingkat Pencemaran Air dan Udara**

Terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Indeks Kualitas Air dan Udara. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 39.718.007.714,- dengan realisasi Rp. 27.974.443.300,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 70,43%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permaslahan diantaranya Refocussing Program dan kegaiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 3 **Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana**

Terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Indeks Resiko Bencana. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 150.596.230.124,- dengan realisasi Rp. 131.554.704.634,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 87,36%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permaslahan diantaranya Refocussing Program dan kegaiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran

Tujuan 6 **Melestarikan Seni Budaya Lokal**

Terdiri atas 2 Sasaran Strategis yaitu :

Sasaran 1 **Meningkatnya Intensitas Event Seni Budaya yang diselenggaran**

Terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu Presentase Lembaga Adat yang dibina, Jumlah Penyelenggaraan Event Seni Budaya dan Indeks Kerukunan Beragama. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp.6.070.651.000,- dengan realisasi Rp. 5.802,469,000,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 100,00%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permaslahan diantaranya Refocussing Program dan kegaiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 2 **Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial**

Terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Presentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp.30.288.064.500,- dengan realisasi Rp. 28.683.874.100,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 100%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permaslahan diantaranya Refocussing Program dan kegaiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

3.1.4. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Untuk mengoptimalkan pencapaian implementasi visi dan misi, maka dirumuskan sejumlah tujuan, sasaran dan indikato. Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupaka sesuatu yang akan di capai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun kedepan berdasarkan pada isu-isu strategjik. Terdapat beberapa Program dan kegaiatan dalam mendorong pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian semua sasaran strategis sebanyak 137 Program dan 226 kegiatan dan 612 sub kegiatan. Adapun analisis dari program dan kegaiatan tersebut diuraikan dibawah ini:

Tujuan 1 **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Memiliki 6 (enam) Sasaran strategis dan 9 (Sembilan) indikator kinerja. Dan didukung sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Pendidikan telah melaksanakan sebanyak 3 (tiga) Program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan tenaga Kependidikan. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggaranya mencapai 64,99%. Kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek belum optimalnya sarana dan prasarana oleh karena itu perlu memaksimalkan sarana dan prasarana dan memberikan bimtek serta pendistribusian pendidik dan tenaga pendidik yang belum merata.

- Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat telah melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) Program dan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Pemenuhan Upaya Kesehatan Peroranan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan dan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggaranya mencapai 99,98%. Adapun Kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya posyandu lansia, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengontrol penyakit yang diderita, masih adanya penyakit menular yang terlambat terdeteksi karena masyarakat tidak memeriksakan diri serta masih kurangnya Masyarakat untuk memeriksakan dan berobat teratur pada penyakit Hipertensi, DM, Jantung, dll (Penyakit Tidak Menular).

- Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak telah melaksanakan sebanyak 9 (sembilan) Program dan 54 (lima puluh empat) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program Perlindungan Khusus Anak, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berncana (KB) dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggaranya mencapai 100,00%. Adapun Kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek karena belum optimalnya layanan informasi bagi korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi yang baik dan harmonis antar Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

- Sasaran Strategis Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Kompeten dan Produktif telah melaksanakan sebanyak 4 (empat) Program dan 11 (sebelas) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Indudtrial dan Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggaranya mencapai 92,44%. Adapun Kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek pelatihan yang dilaksanakan oleh UPTD BLK tidak sesuai dengan pasar kerja yang tersedia serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

- Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan telah melaksanakan sebanyak 4 (empat) Program dan 20 (dua puluh) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Program Pengawasan Keamanan Pangan. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggaranya mencapai 102,11%. Adapun Kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

- Sasaran Strategis Meningkatnya Penanganan Maslaah Kesejahteraan Sosial telah melaksanakan sebanyak 3 (tiga) Program dan 9 (sembilan) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggaranya mencapai 113,57%. Adapun Kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman

Tujuan 2 **Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah**

Memiliki 2 (dua) Sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja. Dan didukung sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah telah melaksanakan sebanyak 6 (enam) Program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggaranya mencapai 106,71%. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu belum optimalnya sarana dan prasarana oleh karena itu perlu memaksimalkan sarana dan prasarana dan memberikan bimtek.

- Sasaran Strategis Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman telah melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) Program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggaranya mencapai 109,87%. Adapun Kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu belum optimalnya dukungan tim pengelolaan persampahan mendukung pengelolaan persampahan, air dan udara di wilayah pemukiman dan kurangnya kendaraan operasional yang mendukung pengelolaan persampahan, air dan udara di wilayah pemukiman

Tujuan 3 **Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi**

Memiliki 2 (dua) Sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja. Dan didukung sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah telah melaksanakan sebanyak 32 (tiga puluh dua) Program dan 100 (seratus) kegiatan. Adapun beberapa program kegiatan tersebut adalah Program Pengembangan UMKM, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dan lain sebagainya. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggaranya mencapai 97,72%. Adapun Kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu belum optimalnya realisasi APBD dalam penyediaan sarana dan prasarana keterbatasan pengadaan bahan dan fasilitas sarana dan prasarana.

- Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Daerah telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggaranya mencapai 191,15%. Adapun Kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu belum optimalnya sarana dan prasarana oleh karena itu perlu memaksimalkan sarana dan prasarana dan memberikan bimtek.

Tujuan 4 **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**

Memiliki 4 (empat) Sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja. Dan didukung sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan dan Pengolah Data telah melaksanakan sebanyak 16 (enam belas) Program dan 116 (seratus enam belas) kegiatan. Adapun beberapa program kegiatan tersebut adalah Program Pengelolan Keuangan Daerah, Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggaranya mencapai 97,41%. Adapun Kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama serta memastikan Rencana Aksi yang disusun merupakan intervensi terhadap prioritas permasalahan utama, menetapkan Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi menjadi peraturan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara perlu menyusun proses bisnis statistik yang terstandar untuk proses perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data yang berlaku bagi seluruh produsen data dengan merujuk pada Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), perlu Menyusun Renaksi dan Melaksanakan Sosialisasi dan dalam Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum perlu diberi pendampingan dan pemahaman.

- Sasaran Strategis Terwujudnya Birorkasi yang Kapabel, Optimalnya Implemntasi SPBE serta Pelayanan Publik yang Terpercaya telah melaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) Program dan 89 (delapan puluh sembilan) kegiatan. Adapun beberapa program kegiatan tersebut adalah Program Pendaftaran Penduduk, Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggaranya mencapai 93,90%. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu masih membutuhkan SDM bidang TIK dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya berlitearsi baik itu listerasi baca tulis, budaya, ekonomi maupun digital serta rendahnya pemahaman Masyarakat tentang pentingnya suatu arsip dinamis dan gangguan jaringan komunikasi.

- Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN telah melaksanakan sebanyak 2 (dua) Program dan 16 (enam belas) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah Program Kepegawaian Daerah dan Program pengembangan Sumber Daya Manusia. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggaranya mencapai 108,7%. Adapun Kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu belum mencapai tingkat maksimal yaitu karena sistem Manajemen ASN belum terintegrasi oleh karenanya, perlu adanya platform digital yang mengelola segala informasi tentang manajemen ASN. Oleh karena itu, Penguatan Database ASN dan Pelaksanaan Sistem Manajemen ASN menggunakan Aplikasi yang terintegrasi tetap harus dilakukan.

- Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa telah melaksanakan sebanyak 4 (empat) Program dan 14 (empat belas) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggaranya mencapai 110,26%. Adapun Kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu penyebaran penduduk belum merata sehingga daerah yang padat penduduknya tidak memiliki tanah gerapan, perbedaan adat kebiasaan dan Tingkat sosial ekonomi di setiap desa dan mayoritas penduduk desa bermata pencaharian belum tetap.

Tujuan 5 **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**

Memiliki 3 (tiga) Sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja. Dan didukung sebanyak 84 (delapan puluh empat) Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran Strategis Terjaganya Kualitas Pemanfaatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang telah melaksanakan sebanyak 2 (dua) Program dan 2 (dua) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Pembangunan Tanah. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggaranya mencapai 98,47%. Adapun Kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu penganggaran secara optimal setiap tahunnya agar taget yang diinginkan tercapai.

- Sasaran Strategis Menurunnya Tingkat Pencemaran Air dan Udara telah melaksanakan sebanyak 9 (sembilan) Program dan 53 (lima puluh tiga) kegiatan. Adapun beberapa program kegiatan tersebut adalah Program perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Keruksakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dan Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lngkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggaranya mencapai 100,26%. Adapun Kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu kurangnya kesadaran dari Perusahaan dan Masyarakat mengenai dampak yang ditimbulakan. Oleh karena itu, perlu melakukan sosialisasi dan monitoring di lapangan secara intens.

- Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Bencana telah melaksanakan sebanyak 4 (empat) Program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan. Adapun beberapa program kegiatan tersebut adalah Program Penanggulangan Bencana, Program Pencegahan, Penanguulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, Progeram Peningkatan Ketentraman dan Keteriban Umum dan Program Penanganan Bencana. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggarannya mencapai 98,59%. Adapun Kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu kualitas anggota Satpol PP dan SATLINMAS dalam Tanggap, kesiapsiagaan serta reaksi penanganan cepat bencana yang harus terus ditingkatkan kualitasnya serta dalam membagi personal kedalam kelompok berdasarkan klasifikasi zona wilayah serta perbedaan intensitas resiko.

Tujuan 6 **Melestarikan Seni Budaya Lokal**

Memiliki 2 (dua) Sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja. Dan didukung sebanyak 13 (tiga belas) Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran Strategis Meningkatnya Intensitas Event Seni Budaya yang diselenggarakan telah melaksanakan sebanyak 3 (tiga) Program dan 3 (tiga) kegiatan. Adapun program kegiatan tersebut adalah Prorgam Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggaranya mencapai 111,32%. Adapun Kendalayang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu perbedaan latar belakang dan identitas suku agama Masyarakat yang rentan digunakan sebagai pemecah pemersatuan melalui politik. Oleh karenannya menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda serta memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

- Sasaran Strategis Menurunnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) Program dan 18 (delapan belas) kegiatan. Adapun beberapa program kegiatan tersebut adalah Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lemabga Pendidkan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Poltik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan realisasi anggaranya mencapai 100,00%. Adapun Kendala yang dihadapi dalam upaya jangka pendek yaitu belum optimalnya koordinasi antar pihak dan Lembaga terkait untuk pencegahan terjadinya potensi konflik.

Tabel Sasaran Strategis/Program/Kegiatan, anggaran dan kinerja secara rinci akan disajikan dalam LAMPIRAN.



3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

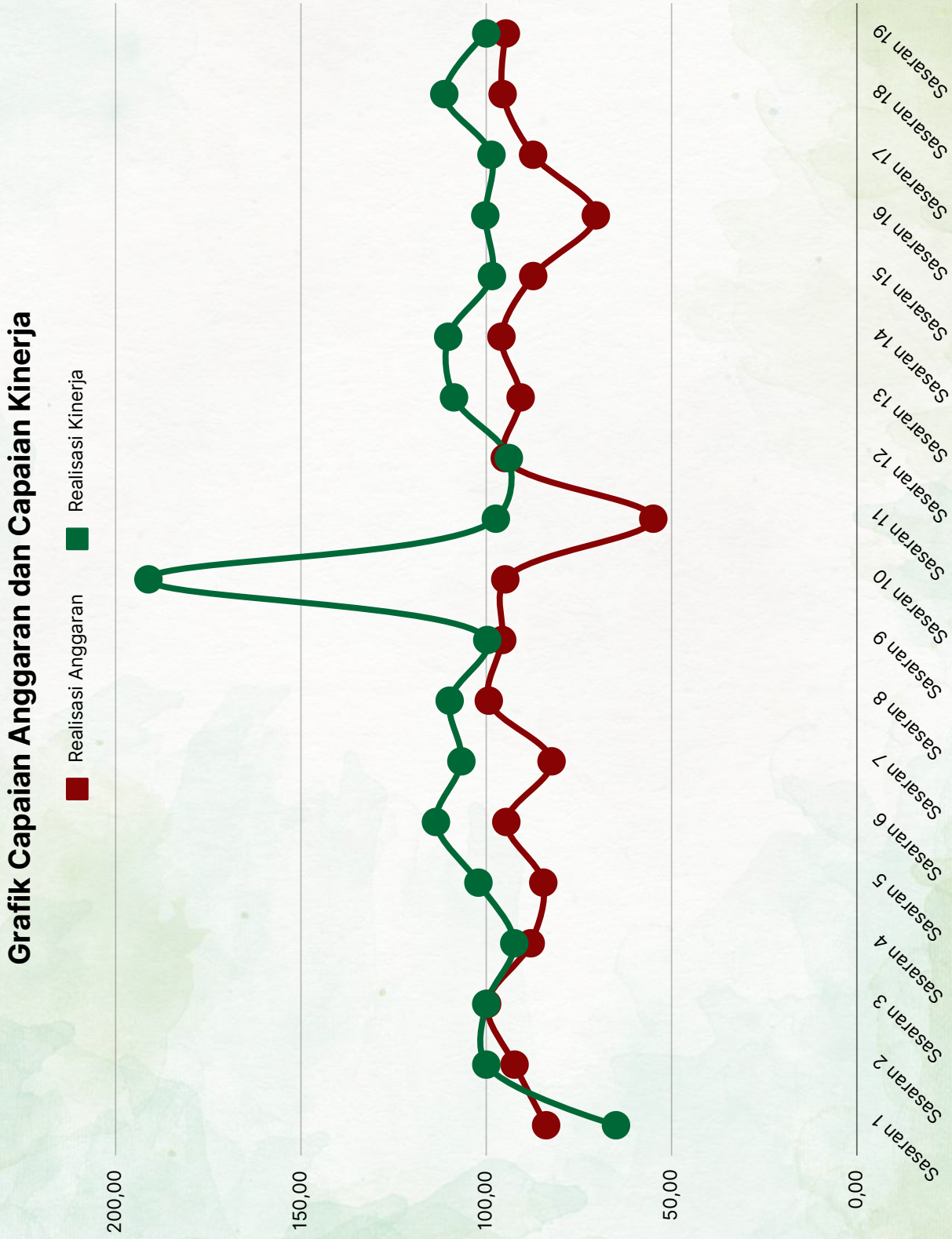
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah mengalokasikan anggaran pada APBD Tahun 2023 dengan total Belanja Daerah sebesar Rp. 1.985.264.359.214,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.754.746.593.389,00 atau 88,39%. Untuk lebih jelasnya secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

NO.	URAIAN	APBD PERUBAHAN(Rp.)	REALISASI BELANJA DAN TRANSFER (Rp)	CAPAIAN (%)
5	**BELANJA**	**1.985.264.359.214,00**	**1.754.746.593.389,00**	**88,39**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**995.812.623.259,43**	**879.140.953.135,00**	**88,28**
5.1.01	Belanja Pegawai	348.995.497.104,61	280.742.471.019,00	80,44
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	581.664.817.592,82	542.106.428.784,00	93,20
5.1.03	Belanja Bunga	5.817.380.062,00	3.959.618.032,00	68,07
5.1.05	Belanja Hibah	59.334.928.500,00	52.332.435.300,00	88,20
5.2	**BELANJA MODAL**	**760.360.231.416,57**	**651.514.135.716,00**	**85,68**
5.2.01	Belanja Tanah	30.593.706.255,00	25.787.194.522,00	84,29
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	84.570.284.675,15	80.772.503.039,00	95,51
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	153.227.937.729,53	121.131.751.068,00	79,05
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	470.027.301.056,89	403.587.608.937,00	85,86
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	20.994.001.700,00	19.290.973.150,00	91,89
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	947.000.000,00	944.105.000,00	99,69
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**5.000.000.000,00**	**-**	**0,00**
5.3.01	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	-	0,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**224.091.504.538,00**	**224.091.504.538,00**	**100,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	224.091.504.538,00	224.091.504.538,00	100,00
TOTAL (BELANJA + TRANSFER)		**1.985.264.359.214,00**	**1.754.746.593.389,00**	**88,39**

Rasio penggunaan anggaran tahun 2023 dengan realisasi sebesar 88,39% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 103.75% menunjukan efektifnya penggunaan anggaran Tahun 2023, namun demikian pencapaian tersebut termasuk dalam kategori "Sangat Baik".

SASARAN STRATEGIS		Tingkat Efisiensi		
		Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Kinerja (%)	Efisien/ inefisien
Sasaran 1	Meningkatnya Akses Pendidikan	83,84	64,99	Inefisien
Sasaran 2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	92,36	99,98	Efisien
Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak	99,76	100,00	Efisien
Sasaran 4	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Produktif	88,00	92,44	Efisien
Sasaran 5	Meningkatnya Ketahanan Pangan	84,61	102,11	Efisien
Sasaran 6	Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejateraan Sosial	94,58	113,57	Efisien
Sasaran 7	Meningkatnya Kapasitas Infrasturktur Wilayah	82,38	106,71	Efisien
Sasaran 8	Terpenuhinya Sarana Prasarana Kawasan Permukiman	99,31	109,87	Efisien
Sasaran 9	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah	95,69	99,72	Efisien
Sasaran 10	Meningkatnya Investasi Daerah	94,86	191,15	Efisien
Sasaran 11	Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan dan Pengelolaan Data	54,93	97,41	Efisien
Sasaran 12	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Optimalnya Implementasi SPBE serta Pelayanan Publik yang Terpercaya	95,00	93,9	Inefisien
Sasaran 13	Meningkatnya Kualitas Manajmen ASN	90,72	108,7	Efisien
Sasaran 14	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa	95,90	110,26	Efisien
Sasaran 15	Terjaganya Kualitas Pemanfaatan dan Pengenddalian Pemanfaatan Ruang	87,33	98,47	Efisien
Sasaran 16	Menurunnya Tingkat Pencemaran Air dan Udara	70,43	100,26	Efisien
Sasaran 17	Terwujudnya Tatakelola dan Manajemen Bencana	87,36	98,59	Efisien
Sasaran 18	Meningkatnya Intensitas Event Seni Budaya Yang Diselenggarakan	95,58	111,32	Efisien
Sasaran 19	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	94,70	100,00	Efisien
	Rata - Rata	**88,39**	**103.75**	


Grafik Capaian Anggaran dan Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
Realisasi Kinerja
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
Sasaran 1
Sasaran 2
Sasaran 3
Sasaran 4
Sasaran 5
Sasaran 6
Sasaran 7
Sasaran 8
Sasaran 9
Sasaran 10
Sasaran 11
Sasaran 12
Sasaran 13
Sasaran 14
Sasaran 15
Sasaran 16
Sasaran 17
Sasaran 18
Sasaran 19

BAB IV
PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

Pencapaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Tahun 2023 sebagaiman telah diuraikan pada BAB II pencapaian Sasaaran RPJMD 2021-2026 tahun ke Dua atau pencapaian pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kabupaten Konawe Utara 2023. Laporan kinerja ini merupakan Laporan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD 2021-2026 untuk menjadi pertanggunjawaban kepada Publik.

Hasil Pencapaian dari evaluasi pencapaian kinerja menggambarkan tingkat keberhasilan atau kegagalan semu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah pada umumnya pencapaian target dari indikator beberapa SKPD berada pada taraf yang perlu ditingkatkan atau rata rata 80,40% dan capaian ini sudah dapat dikategorikan baik.

Berdasarakan analisis pengukuran kinerja sasaran yang dinilai rata rata 103.75% tersebut menunjukkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terlksana dengan baik dalam arti program yang mendukung capaian tujuan dan sasaran dapat terealisasi dengan “Sangat Baik”. Namun demikian ada beberapa indikator sasaran yang perlu menjadi perhatian dan diharapkan tahun mendatang lebih dioptimalkan. Selain itu masih terdapat indikator yang belum tercapai sepenuhnya dikarenakan kondisi alam geografis.

Akhir kata, kiranya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 ini menjadi evaluasi dan memberi manfaat untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya dan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada stakeholders, sehingga visi jangkah menengah Kabupaten Konawe Utara yakni : “Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” dapat terwujud.

Wanggudu, 27 Maret 2023

BUPATI KONAWE UTARA,

H. RUKSAMIN

DOKUMENTASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Konawe Utara

LAKIP 2023


PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
SEKRETARIAT DAERAH




PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
SEKRETARIAT DAERAH



LAMPIRAN 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398):
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

14

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara 2021–2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Konawe Utara;
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat daerah Kabupaten Konawe Utara;
6. Bagian Organisasi Sekretariat daerah yang selanjutnya disebut Bagian organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD;
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut;
11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan;
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan;
13. Indikator Kinerja Utama (*Key Perfomance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II
RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan PD di Li ngkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk:

a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
c. Penyusunan dokumen penetapankinerja;
d. Pengukuran kinerja;

e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

Pendahuluan dan IKU di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupatiini:
a. Bagian Organisasi diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. Inspektorat Daerah melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap PD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 5

IKU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAB III PENUTUP

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 8 FEBRUARI 2022

BUPATI KONAWE UTARA,

RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 8 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR : 467

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 49 Tahun 2022
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money* (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan good governance dan result oriented government, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya di integrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencaaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang dinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabiltas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanankan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Konawe Utara menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud danTujuan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperolah gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapakan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secarabaik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Konawe Utara, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para pimpinan PD tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

BUPATI KONAWE UTARA,

RUKSAMIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 49
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2022

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET						KET.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup	70,266	70,672	71,078	71,484	71,890	72,296	
1.1.1	Meningkatnya Akses Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Jumlah seluruh tahun Pendidikan penduduk usia 15 tahun keatas dibagi dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dikali serratus	9,404	9,598	9,792	9,986	10,180	10,374	
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Jumlah penduduk yang bersekolah tahun n dibagi jumlah penduduk usia sekolah	13,066	13,302	13,358	13,774	14,01	14,246	
1.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk	70,09	70,67	71,26	71,84	72,42	73,00	
1.1.3	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	IPM perempuan dibagi IPM laki-laki	86,413	86,656	86,90	87,14	87,38	87,63	
		Kota Layak Anak (Kategori)	Hasil perhitungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak indonesia atas pemenuhan dan perlindungan anak	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	
1.1.4	Meningkatnya Sumberdaya Manusia Yang Kompeten dan Produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)	Jumlah penduduk usia kerja dibagi jumlah penduduk keseluhan kabupaten dikali seratus	75,14	75,84	76,54	77,23	77,93	78,63	
1.1.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	Skor PPH kabupaten dibagi skor PPH ideal dikali 100	80,52	81,53	82,56	83,56	84,58	85,58	

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET						KET.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.6	Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) (Persen)	Jumlah penduduk miskin pada tahun n dikurangi jumlah penduduk miskin pada tahun n-1 dibagi penduduk miskin pada tahun n-1 dikali 100	12,87	12,21	11,55	10,89	10,23	9,57	
2.2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Keterhubungan /Konektivitas Wilayah (Persen)	Jumlah ruas jalan/jalur pelayaran yang menghubungkan antar kecamatan dibagi jumlah kecamatan dikalikan seratus	85,84	86,53	87,22	87,91	88,6	89,29	
2.2.7	Meningkatnya Kapasitas Infrastuktur Wilayah	Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap (Persen)	Panjang jalan dan jembatan kondisi mantap dibagi Panjang jalan kabupaten dikalikan serratus	84,80	85,58	86,35	87,13	87,90	88,68	
		Persentase Daerah Irigasi (DI) yang Terlayani Jaringan Irigasi (Persen)	Luas Daerah irigasi yang terlayani dibagi luas daerah irigasi kewenangan kabupaten dikalikan seratus	67,79	68,35	68,91	69,47	70,03	70,59	
2.2.8	Terpenuhinya Sarana Prasarana Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan permukiman (Perkotaan/Perdesaan) yang tidak kumuh (Persen)	Jumlah luas Kawasan yang tidak kumuh dibagi luas wilayah permukiman dikalikan seratus	46,00	49,75	53,50	57,25	61,00	64,75	
		Rasio Akses Air Minum Layak (Persen)	Jumlah rumah tangga yang pengguna air minum layak dibagi rumah tangga keseluruhan kabupaten dikali setatus	56,86	59,20	61,54	63,88	66,22	68,79	
		Rasio Akses Sanitasi Layak (Persen)	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak dibagi jumlah rumah tinggal kabupaten dikalikan seratus	39,28	54,28	56,62	58,96	61,3	63,64	
		Cakupan Layanan Persampahan (Persen)	Jumlah kecamatan yang terlayani pengelolaan sampah dibagi total kecamatan dikali seratus	18,63	21,88	25,13	28,38	31,63	34,88	

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET						KET.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.3	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	Pertambahan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dalam periode tertentu pada suatu daerah	4,9	5,238	5,576	5,914	6,252	6,59	
		PDRB Perkapita (Rp. Juta/Jiwa/Tahun)	Jumlah PDRB dibagi jumlah penduduk	61,178	61,5082	61,839	62,169	62,500	62,831	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	Jumlah yang menganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikali serratus	3,747	3,70	3,661	3,618	3,575	3,532	
		Indeks Gini (Indeks)	Ketimpangan pendapatan secara keseluruhan	0,384	0,380	0,376	0,372	0,368	0,364	
		Tingkat Kemiskinan (Persen)	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali serratus	13,40	13,27	13,14	13,01	12,88	12,75	
3.3.9	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Persen)	PDRB sektor pertanian, kehutan dan perikanan tahun n dikurangi PDRB tahun n-1 dibagi PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan tahun n-1 dikali seratus	39,888	40,026	40,164	40,302	40,440	40,578	
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian (Persen)	PDRB sektor pertambangan dan penggalian tahun n dikurangi PDRB sektor pertambangan dan penggalian tahun n-1 dibagi PDRB pertambangan dan penggalian tahun n-1 dikali serratus	21,29	21,34	21,39	21,44	21,49	21,54	
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (Persen)	PDRB sektor perdagangan tahun n dikurangi PDRB sektor perdanganan tahun n-1 dibagi PDRB perdagangan tahun n-1 dikali seratus	11,802	11,824	11,846	11,868	11,890	11,912	
		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	PDRB sektor industri pengolahan tahun n dikurangi PDRB sektor	1,138	1,146	1,154	1,162	1,17	1,178	

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET						KET.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Pengolahan (Persen)	industri pengolahan tahun n-1 dibagi PDRB industri pengolahan tahun n-1 dikali seratus							
		Persentase PAD Sektor Pariwisata (Persen)	Jumlah penerimaan PAD sektor pariwisata tahun n dibagi jumlah keseluruhan PAD kabupaten dikali seratus	0,043	0,0534	0,063	0,073	0,083	0,093	
		Nilai Omset Usaha Koperasi (Rp. Ribu)	Jumlah keseluruhan penerimaan dari sektor koperasi kabupaten	741.587	777.799	814.011	850.223	886.435	922.647	
3.3.10	Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA (Persen)	Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun n dikurangi investasi PMDN dan PMA tahun n-1 dibagi investasi PMDN dan PMA tahun n-1 dikali serratus	13,488	15,116	16,744	18,372	20	21,628	
4.4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	Hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	50,242	50,404	50,566	50,728	50,89	51,052	
4.4.11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP (Kategori)	Hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	B	B	B	B	B	B	
		Opini BPK (Kategori)	Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
4.4.12	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Optimalnya Implementasi SPBE, serta Pelayanan Publik yang Terpercaya	Indeks Maturitas Kelembagaan (Level)	Hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penyelenggaraan sistem pengendalian intern	1	2	3	3	3	3	
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Indeks)	Hasil penilaian dari Kementrian Komunikasi dan Informasi atas penyelenggaran pemerintahan berbasi elektronik	1,38	1,46	1,54	1,62	1,7	1,78	

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET						KET.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Indeks Kepuasaan Masyarakat (Indeks)	Jumlah perangkat daerah yang melakukan survey kepuasan masyarakat dibagi total perangkat darah secara keseluruhan dikali seratus	3,41	3,48	3,55	3,62	3,69	3,76	
4.4.13	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Merit System (Indeks)	Hasil penilaian dari Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN) atas penerapan system merit dalam kebijakan dan manajemen ASN instansi Pemerintah	177	192	207	222	237	252	
4.4.14	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa	Indeks Desa Membangun (Indeks)	Indeks status kemajuan dan kemandirian desa hasil penilaian kementerian desa, PDT dan transmigrasi	0,5945	0,6037	0,6127	0,6218	0,6309	0,64	
5.5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	Hasil perhitungan dari indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan (IPA x 30%) + (IPU x 30%) + (ITH x 40%)	59,67	60,50	61,33	62,16	62,99	63,82	
5.5.15	Terjaganya Kualitas Pemafaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Perencanaan Tata Ruang (Persen)	Luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW Kab. Konawe Utara dibagi luas total wilayah keseluruhan RTRW Kab. Konawe Utara dikali seratus	80,49	80,98	81,47	81,96	82,45	82,94	
5.5.16	Menurunnya tingkat Pencemaran Air dan Udara	Indeks Kualitas Air dan Udara (Indeks)	Hasil pengujian kualitas air ditambah pengujian kualitas udara	93,316	94,0576	94,798	95,539	96,28	97,02	
5.5.17	Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana	Indeks Resiko Bencana (Indeks)	Hasil penilaian Badan Penanggulangan Bencana Nasional atas resiko bencana daerah	170,71	169,02	167,33	165,64	163,95	162,26	
6.6	Melestarikan Seni Budaya Lokal	Persentase Kapasitas Lembaga Adat yang dibina (Persen)	Jumlah Lembaga adat yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah Lembaga adat	100	100	100	100	100	100	

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET						KET.
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			keseluruhan kabupaten dikali seraus							
6.6.18	Meningkatnya Intensitas Event Seni Budaya yang diselenggarakan	Jumlah Penyelenggaraan Event Seni Budaya (Event)	Banyaknya festival dan budaya yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu	1	2	3	4	5	5	
6.7	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang dilandasi Nilai-Nilai Kerukunan Beragama	Indeks Kerukunan Beragama (Indeks)	Hasil survey penilaian Kementerian Agama atas penilaian kerukunan umat beragama	74,29	74,66	75,03	75,40	75,77	76,14	
6.7.19	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial (Persen)	Jumlah kasus konflik yang tertangani dibagi jumlah total keseluruhan kasus dikali seratus	100	100	100	100	100	100	

BUPATI KONAWE UTARA,

RUKSAMIN

LAMPIRAN 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam Rangka Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Ir. H. RUKSAMIN, ST.,M.SI., IPU. ASEAN, Eng.
Jabatan : BUPATI KONAWE UTARA

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Wanggudu, JANUARI 2023

BUPATI KONAWE UTARA

Dr. Ir. H. RUKSAMIN, ST., M.SI., IPU. ASEAN, Eng.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KABUPATEN KONAWE UTARA

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	71,078
1.1.1	Meningkatnya Akses Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,79
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,54
1.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	71,26
1.1.3	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	86,90
		Kota Layak Anak (Kategori)	Pratama
1.1.4	Meningkatnya Sumberdaya Manusia Yang Kompeten dan Produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)	76,54
1.1.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	82,56
1.1.6	Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) (Persen)	11,55
2.2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Keterhubungan /Konektivitas Wilayah (Persen)	87,22
2.2.7	Meningkatnya Kapasitas Infrastuktur Wilayah	Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap (Persen)	86,36
		Persentase Daerah Irigasi (DI) yang Terlayani Jaringan Irigasi (Persen)	68,91
2.2.8	Terpenuhinya Sarana Prasarana Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan permukiman	87,85

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		(Perkotaan/Perdesaan) yang tidak kumuh (Persen)	
		Rasio Akses Air Minum Layak (Persen)	61,54
		Rasio Akses Sanitasi Layak (Persen)	56,62
		Cakupan Layanan Persampahan (Persen)	25,13
3.3	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,58
		PDRB Perkapita (Rp. Juta/Jiwa/Tahun)	61,838
		Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3,66
		Indeks Gini (Indeks)	0,376
		Tingkat Kemiskinan (Persen)	13,14
3.3.9	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Persen)	40,16
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian (Persen)	21,39
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (Persen)	11,85
		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (Persen)	1,15
		Persentase PAD Sektor Pariwisata (Persen)	0,06
		Nilai Omset Usaha Koperasi (Rp. Ribu)	814.011
3.3.10	Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA (Persen)	16,74

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	50,57
4.4.11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP (Kategori)	BB
		Opini BPK (Kategori)	WTP
4.4.12	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Optimalnya Implementasi SPBE, serta Pelayanan Publik yang Terpercaya	Indeks Maturitas Kelembagaan (Level)	3
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Indeks)	1,54
		Indeks Kepuasaan Masyarakat (Indeks)	3,55
4.4.13	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Merit System (Indeks)	207
4.4.14	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa	Indeks Desa Membangun (Indeks)	0,6128
5.5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	61,33
5.5.15	Terjaganya Kualitas Pemafaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Perencanaan Tata Ruang (Persen)	81,47
5.5.16	Menurunnya tingkat Pencemaran Air dan Udara	Indeks Kualitas Air dan Udara (Indeks)	94,80
5.5.17	Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Bencana	Indeks Resiko Bencana (Indeks)	167,33
6.6	Melestarikan Seni Budaya Lokal	Persentase Kapasitas Lembaga Adat yang dibina (Persen)	100
6.6.18	Meningkatnya Intensitas Event Seni Budaya yang diselenggarakan	Jumlah Penyelenggaraan Event Seni Budaya (Event)	3
6.7	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang dilandasi Nilai-Nilai Kerukunan Beragama	Indeks Kerukunan Beragama (Indeks)	75,03

KODE	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6.7.19	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Persentase Pengelolaan Potensi Konflik Sosial (Persen)	100

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM	88%	43.123.183.392
		APK SD	106,25 indeks	
		APK SMP	85,35 indeks	
		APM SD	98,9 indeks	
		APM SMP	79,35 indeks	
		Persentase SD Terakreditasi Minimal B	19,23%	
		Persentase SMP Terakreditasi Minimal B	44,44%	
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi / 1000 kelahiran hidup	1,41 rasio	63.903.333.304
		Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	133 rasio	
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,20%	
		Prevalensi kasus Stunting	10,60%	
		Rasio Puskesmas per satuan penduduk x 1000	0,32 rasio	
		Prevalensi Tuberkulosis (TB) /100.000 penduduk	134 rasio	
		Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan Per Hari	17 rawat jalan	
		Length Of Stay (LOS)/Rata-rata Lama Hari Dirawat	7-6 hari	
		Bed Occupancy Rate (BOR)/ Tingkat Penggunaan Tempat Tidur	0,6	

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per 100.000 penduduk	56,24 rasio	3.083.987.000
		rasio bidan / 100.0000 penduduk	229,081 rasio	
		Rasio perawat / 100.000 penduduk	153,64 rasio	
		Emergency Respon Time Rate Kurang Dari 5 Menit	70%	
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Jumlah sertifikat laek higien	8 sertifikat	341.633.000
		Jumlah Rekomendasi Ijin Apotek/Toko Obat	12 rekomendasi	
		Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi Kurang dari 30 Menit	70%	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Desa Siaga Aktif	113 desa	635.024.000
		Jumlah posyandu aktif	165 posyandu	
		Persentase Rumah Tangga ber PHBS	91%	
		Persentase Masyarakat yang Diberdayakan	90%	
6.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik	2.715,74 Ha	17.007.687.700
7.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perpipaan	18.935 Unit	11.172.804.500
8.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penduduk Berakses Sanitasi Yang Layak	9.313 KK	1.198.648.000
9.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase isian aplikasi SI-BPB	53%	20.552.600.000
10.	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan dalam kondisi mantap	604,45 Km	237.981.577.947

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
11.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	81,47%	2.566.308.000
12.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pembangunan perumahan untuk korban bencana alam	5%	164.665.000
13.	Program Kawasan Permukiman	Jumlah rumah layak huni	12.996 Unit	1.400.000.000
14.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas umum	100%	3.527.551.733
15.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dan pengawasan keamanan dan ketertiban umum diwilayah kecamatan	100%	1.202.311.000
16.	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	9 Desa	106.683.853.386
17.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah WMK	69,90%	650.165.000
18.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase usaha ekonomi keluarga yang mendapatkan pembinaan	55,22%	5.873.046.850
19.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase DTKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi	34,25%	216.283.000
20.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	31,89%	65.195.000
21.	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100%	1.567.939.400
22.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi	77 Orang	1.103.336.800

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
23.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan	351 Orang	184.299.000
24.	Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	100%	58.664.000
25.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan Yang Menduduki Jabatan Publik	7,96%	138.140.000
26.	Program Perlindungan Perempuan	Jumlah Perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan/ditangani	2 Orang	770.068.000
27.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan kualitas keluarga	100%	215.700.000
28.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentse pengelolaan data gender dan anak	100%	363.251.000
29.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	72%	648.840.000
30.	Program Perlindungan Khusus Anak	Jumlah korban kekerasan anak yang ditindaklanjuti	2 Orang	74.593.800
31.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa Mandiri Pangan	9,43%	484.265.000
32.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Desa Lumbung Pangan	7,55%	1.729.011.000
33.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tingkat Penguatan Cadangan Pangan	100%	98.748.000
		Persentase penangangan kerawanan pangan	100%	
34.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita	2.870 Kkl/ Kapita/Hari	484.265.000

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
			75,34 Gr/Kapita/Hari	
35.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	100%	13.817
36.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas	100%	21.488
37.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	2,12	316.469.000
		Indeks Kualitas Udara	91,38	
38.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Tutupan Lahan	77,95	21.714.378.436
39.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memilah B3 dan limbah B3	70%	87.965.000
40.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan LH (PPLH)	90%	50.135.000
41.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase MHA yang Terakui	100%	37.707.000

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
42.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat penghargaan LH	63%	63.280.000
43.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat penghargaan LH	63%	18.420.000
44.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase aduan LH yang diselesaikan	100%	29.357.000
45.	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan wilayah pelayanan persampahan	15,38%	278.779.000
46.	Program Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan dokumen kependudukan Berbasis Elektronik	100%	433.548.000
47.	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil Berbasis Elektronik	100%	256.256.000
48.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	8 OPD	261.545.200
49.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Data Base kependudukan terupdate	1 database	15.080.000
50.	Program Penataan Desa	Persentase BPD, LPM, dan PKK aktif	100%	400.000.000
51.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyampaian RKPDes, APBDes, dan Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Bupati	83,45%	931.429.000
52.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase 1(satu) BUMDes dalam 1(satu) Desa Yang Aktif	100%	1.716.770.000
53.	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pertumbuhan penduduk	7,14%	1.968.507.000

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
54.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Peserta KB Aktif	11.923 Orang	7.155.092.000
55.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera	81,94%	3.325.740.000
		Cakupan PUS Unmeetneed	0,07%	
56.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, APIL, Guadrail, Delinator, dll) yang berfungsi baik	36,58%	1.156.900.204
		Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	87,62%	
57.	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pelabuhan Rakyat/Dermaga Rakyat Yang Berfungsi Baik	90,91%	1.156.900.204
58.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengaduan Berbasis Online Yang didistribusikan ke OPD	45%	2.249.634.000
59.	Program Aplikasi Informatika	Jumlah Penerapan SPBE	3 Aplikasi	1.767.281.000
60.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang dibina	35,71 Koperasi	283.686.000
61.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	18%	348.365.000
62.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan koperasi yang mengikuti pelatihan	74,32%	766.040.000
63.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif	77,03%	865.438.000

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
64.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha baru	0,76%	1.704.882.000
65.	Program Pengembangan Umkm	Jumlah UMKM yang dibina	50 UMKM	518.540.000
66.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Perbup yang mendukung Iklim Investasi	3 Perbup	701.839.000
67.	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi PMA/PMDN	Rp. 215,21 M	294.036.000
68.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Lama proses perizinan	2 hari	299.833.000
69.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengawasan investasi	100%	521.700.000
70.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah izin yang diterbitkan	398 Izin	284.000.000
		Survey Kepuasan Masyarakat	78,45	
71.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	12 Organisasi	2.118.123.000
72.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Cabang Olahraga Yang Berprestasi	8 Cabor	20.953.682.553
73.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi	45%	290.807.000
74.	Program Pembinaan Perpustakaan	Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan Daerah	50%	629.239.000
75.	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Penyelamatan Arsip Yang Telah Direservasi	16,15%	428.023.000

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
76.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	25,32%	49.987.000
77.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pesentase Kelompok Nelayan yang di lakukan pembinaan	70%	3.826.306.650
		Produktivitas perikanan tangkap	15.239 Ton	
78.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas perikanan budidaya	9.000,35 Ton	7.866.560.447
		Persentase kelompok pembudidaya yang dibina	70%	
79.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase POKMASWAS yang dibina	55%	50.340.000
80.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dibina	60%	301.618.000
81.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama menginap	2 Hari	442.832.520
82.	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	10.878 Jiwa	1.807.231.000
83.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pengembangan prasarana ekonomi kreatif	40%	243.295.000
84.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pembinaan ekonomi kreatif dan SDM kepariwisataan	100%	100.734.000

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
85.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas tanaman perkebunan	2.254 Ton	2.569.511.000
		Produktivitas Tanaman Pangan	493,29 Kw/Ha	
86.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Produksi tanaman Perkebunan	2.254 Ton	30.670.734.453
		Jumlah Produksi tanaman Hortikultura	166.277 Kg	
		Jumlah Produksi tanaman pangan	107.788 Ton	
		Jumlah produksi petenakan (Daging dan Telur)	254.605 Kg	
87.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian penyakit hewan ternak	60%	233.029.000
88.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian OPT	14%	9.039.560.798
		Persentase pengendalian bencana pertanian dan penanggulangannya	100%	
89.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani	100%	1.905.955.700
90.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pengajuan SKA yang diproses dan ditindaklanjuti	20%	88.339.000
91.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar sehat	64,71%	997.141.340
		Persentase peningkatan pelaku usaha perdagangan	82,35%	
92.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilitasi jenis barang penting	45%	289.888.000
93.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Omset yang dihasilkan dari Usaha Sektor Perdagangan	51,91%	40.130.000

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
94.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kontribusi Sektor Perdagangan	14,24%	147.660.000
95.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Omzet yang dihasilkan dari Sektor Usaha Perindustrian	51,91%	340.195.000
96.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase ketersediaan dperencanaan daerah kawasan transmigasi	100%	1.028.717.000
97.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pembangunan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	100%	7.431.795.101
98.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase warga transmigrasi yang mandiri	100%	243.860.000
99.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Sarana dan Prasarana keagamaan Yang Dibangun/Rehabilitasi	64 Unit	9.859.584.000
		Nilai EKPPD	Baik	
100.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase penyerapan anggaran pembangunan dan realisasinya	95%	2.184.905.000
101.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Peraturan Daerah Yang Dihasilkan	56%	11.592.027.000
102.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan	95,06%	2.383.766.000
		Persentase Keterukuran Indikator Perencanaan	100%	
		Persentase Tingkat Partisipatif Perencaanan	20,77%	

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
103.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase sinergitas perencanaan	75,51%	3.922.755.000
		Persentase OPD Yang Pencapaian Kinerja Sesuai Target	80,18%	
104.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD/APBDP tepat waktu	Tepat Waktu	273.040.975.218
105.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset pemda yang terinvetarisir	90%	4.991.306.400
106.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kenaikan pendapatan daerah	32%	1.900.530.000
107.	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi	75,19%	3.368.137.400
108.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	84,43%	1.717.400.000
109.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	35%	4.137.865.000
110.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	80,56%	3.889.925.000
111.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	2.319.794.000
112.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	62%	2.444.147.945
113.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penduduk/Etnis/Suku/Agama/ Ormas Yang Memahami Nilai-Nilai Kehidupan Politik dan Berbangsa	78,93%	1.127.403.000

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
114.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilihan Umum	93,47%	33.665.398.100
115.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan kabupaten	100%	186.852.000
116.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan ketahanan bidang politik, sosial dan budaya	100%	297.623.000
117.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Penanganan Potensi Konflik Tidak menjadi Konflik	100%	542.444.000
118.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	100%	570.044.443.302
JUMLAH				**1.611.095.336.283**

LAMPIRAN 3

TABEL RINCIAN SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
Sasaran 1 : Meningkatnya Akses Pendidikan		**41.011.455.231**	**34.385.889.303**	**83,84**	**7,57**	**64,99**
1.1	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**41.011.455.231**	**34.385.889.303**	**83,84**		
1.1.1	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**15.894.626.699**	**15.345.860.713**	**96,55**		
1.1.1.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	22.350.000	13.050.000	58,39		
1.1.1.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.511.600	-	-		
1.1.1.3	Pengadaan Mebel Sekolah	3.463.054.000	3.453.800.000	99,73		
1.1.1.4	Pengadaan Perlengkapan Siswa	200.000.000	199.396.500	99,70		
1.1.1.5	Penambahan Ruang Kelas Baru	116.415.000	116.415.000	100,00		
1.1.1.6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.271.968.000	3.271.888.000	100,00		
1.1.1.7	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	469.444.000	469.444.000	100,00		
1.1.1.8	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	430.420.000	335.447.000	77,93		
1.1.1.9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	238.324.000	238.324.000	100,00		
1.1.1.10	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	18.350.000	18.350.000	100,00		
1.1.1.11	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	384.080.150	376.170.878	97,94		
1.1.1.12	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	128.708.000	112.080.000	87,08		
1.1.1.13	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	5.840.000	3.500.000	59,93		
1.1.1.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.270.442.749	3.974.116.000	93,06		
1.1.1.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.701.712.700	2.599.645.000	96,22		
1.1.1.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	169.006.500	164.234.335	97,18		
1.1.2	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**16.350.987.239**	**15.526.582.790**	**94,96**		
1.1.2.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.949.774.239	2.607.887.000	88,41		
1.1.2.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.791.370.000	1.557.590.000	86,95		
1.1.2.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	683.730.000	666.980.000	97,55		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
1.1.2.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	433.350.000	416.694.000	96,16		
1.1.2.5	Pengadaan Mebel Sekolah	1.509.900.000	1.509.780.000	99,99		
1.1.2.6	Pengadaan Perlengkapan Siswa	200.000.000	199.509.800	99,75		
1.1.2.7	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	683.767.500	658.475.000	96,30		
1.1.2.8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.726.640.000	2.726.540.000	100,00		
1.1.2.9	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	473.356.000	473.356.000	100,00		
1.1.2.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.254.110.000	1.200.160.000	95,70		
1.1.2.11	Pembangunan Laboratorium	3.644.989.500	3.509.610.990	96,29		
1.1.3	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**8.765.841.293**	**3.513.445.800**	**40,08**		
1.1.3.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	155.201.793	149.800.000	96,52		
1.1.3.2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.764.037.500	1.673.606.250	94,87		
1.1.3.3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2.052.200.000	198.818.500	9,69		
1.1.3.4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	812.174.000	810.974.000	99,85		
1.1.3.5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	294.525.000	285.594.889	96,97		
1.1.3.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	327.313.000	316.739.138	96,77		
1.1.3.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	80.250.000	77.913.023	97,09		
1.1.3.8	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3.280.140.000	-	-		
1.2	**Program Pengembangan Kurikulum**	**-**	**-**	**-**		
1.3	**Program Pendidik dan Tenaga Pendidik**	-	-	**-**		
Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		**44.103.248.757**	**40.733.904.210**	**92,36**	**70,53**	**99,98**
2.1	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**43.325.240.757**	**39.957.502.260**	**92,23**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
2.1.1	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**16.774.457.915**	**16.100.166.560**	**95,98**		
2.1.1.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	200.002.687	199.500.000	99,75		
2.1.1.2	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.094.503.880	5.454.293.400	89,50		
2.1.1.3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.891.586.973	3.878.672.632	99,67		
2.1.1.4	Pengadaan Obat, Vaksin	2.744.074.100	2.729.463.412	99,47		
2.1.1.5	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.293.256.030	1.292.913.616	99,97		
2.1.1.6	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	202.000.000	202.000.000	100,00		
2.1.1.7	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	800.010.749	798.260.000	99,78		
2.1.1.8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.549.023.496	1.545.063.500	99,74		
2.1.2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**26.550.782.842**	**23.857.335.700**	**89,86**		
2.1.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	148.347.000	148.287.000	99,96		
2.1.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	47.973.000	47.973.000	100,00		
2.1.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	46.557.000	46.557.000	100,00		
2.1.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	99.765.000	99.745.000	99,98		
2.1.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.814.931.000	3.796.084.000	99,51		
2.1.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	86.284.500	86.284.500	100,00		
2.1.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	525.912.000	525.814.000	99,98		
2.1.2.8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	495.617.000	495.617.000	100,00		
2.1.2.9	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	172.866.000	172.862.000	100,00		
2.1.2.10	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	477.559.000	476.775.000	99,84		
2.1.2.11	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.457.610.942	11.802.150.800	81,63		
2.1.2.12	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1.147.361.400	1.136.645.400	99,07		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
2.1.2.13	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.625.540.000	3.623.975.000	99,96		
2.1.2.14	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	421.213.000	421.213.000	100,00		
2.1.2.15	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	353.321.000	350.659.000	99,25		
2.1.2.16	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	164.085.000	162.096.000	98,79		
2.1.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	16.278.000	16.278.000	100,00		
2.1.2.18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	57.834.000	56.892.000	98,37		
2.1.2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	259.756.000	259.456.000	99,88		
2.1.2.20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	131.972.000	131.972.000	100,00		
2.2	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**299.690.000**	**298.874.000**	**99,73**		
2.2.1	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**299.690.000**	**298.874.000**	**99,73**		
2.2.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	299.690.000	298.874.000	99,73		
2.3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**136.685.000**	**136.630.650**	**99,96**		
2.3.1	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**136.685.000**	**136.630.650**	**99,96**		
2.3.1.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	69.953.000	69.953.000	100,00		
2.3.1.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	66.732.000	66.677.650	99,92		
2.3.2	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**77.562.000**	**77.562.000**	**100,00**		
2.3.2.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77.562.000	77.562.000	100,00		
2.4	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**341.633.000**	**340.897.300**	**99,78**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
2.4.1	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**144.468.000**	**144.468.000**	**100,00**		
2.4.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	48.156.000	48.156.000	100,00		
2.4.1.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	48.156.000	48.156.000	100,00		
2.4.1.3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	48.156.000	48.156.000	100,00		
2.4.2	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**52.254.000**	**51.818.300**	**99,17**		
2.4.2.1	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	52.254.000	51.818.300	99,17		
2.4.3	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**28.091.000**	**28.091.000**	**100,00**		
2.4.3.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	28.091.000	28.091.000	100,00		
2.4.4	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**116.820.000**	**116.520.000**	**99,74**		
2.4.4.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	84.716.000	84.416.000	99,65		
2.4.4.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	32.104.000	32.104.000	100,00		
2.5	**Pemenuhan Upaya Kesehatan Peroranan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**6.884.037.000**	**6.854.391.882**	**99,57**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
2.5.1	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.720.205.000**	**2.695.513.942**	**99,09**		
2.5.1.1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.762.506.000	1.743.943.500	98,95		
2.5.1.2	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	137.640.000	136.327.500	99,05		
2.5.1.3	Pengadaan Obat, Vaksin	205.384.000	201.607.320	98,16		
2.5.1.4	Pengadaan Bahan Habis Pakai	614.675.000	613.635.622	99,83		
2.5.2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**3.994.632.000**	**3.990.735.440**	**99,90**		
2.5.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	412.432.000	411.835.440	99,86		
2.5.2.2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.582.200.000	3.578.900.000	99,91		
2.5.3	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**169.200.000**	**168.142.500**	**99,38**		
2.5.3.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	169.200.000	168.142.500	99,38		
2.6	**Program peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan**	**2.638.000.000**	**2.638.000.000**	**100,00**		
2.6.1	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**2.638.000.000**	**2.638.000.000**	**100,00**		
2.6.1.1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.638.000.000	2.638.000.000	100,00		
2.7	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**-**	**-**	**-**		
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Hidup perempuan dan pengarusutamaan Hak Anak		**21.240.558.800**	**21.190.212.600**	**99,76**	**86,9**	**100,00**
3.1	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**291.980.000**	**291.980.000**	**100,00**		
3.1.1	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**248.840.000**	**248.840.000**	**100,00**		
3.1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	248.840.000	248.840.000	100,00		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
3.1.2	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**43.140.000**	**43.140.000**	**100,00**		
3.1.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	43.140.000	43.140.000	100,00		
3.2	**Program Perlindungan Perempuan**	**856.348.000**	**833.548.000**	**97,34**		
3.2.1	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**195.959.000**	**195.959.000**	**100,00**		
3.2.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	86.280.000	86.280.000	100,00		
3.2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	109.679.000	109.679.000	100,00		
3.2.2	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**470.195.000**	**448.595.000**	**95,41**		
3.2.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	215.700.000	215.700.000	100,00		
3.2.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	254.495.000	232.895.000	91,51		
3.2.3	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**190.194.000**	**188.994.000**	**99,37**		
3.2.3.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	43.140.000	43.140.000	100,00		
3.2.3.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	147.054.000	145.854.000	99,18		
3.3	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**215.700.000**	**215.700.000**	**100,00**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
3.3.1	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**215.700.000**	**215.700.000**	**100,00**		
3.3.1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	215.700.000	215.700.000	100,00		
3.4	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**363.251.000**	**362.851.000**	**99,89**		
3.4.1	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**363.251.000**	**362.851.000**	**99,89**		
3.4.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	66.320.000	65.920.000	99,40		
3.4.1.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	296.931.000	296.931.000	100,00		
3.5	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**843.780.000**	**838.084.000**	**99,32**		
3.5.1	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**495.440.000**	**490.944.000**	**99,09**		
3.5.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	318.000.000	313.904.000	98,71		
3.5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	177.440.000	177.040.000	99,77		
3.5.2	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**348.340.000**	**347.140.000**	**99,66**		
3.5.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.780.000	174.580.000	99,32		
3.5.2.2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	172.560.000	172.560.000	100,00		
3.6	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**204.013.800**	**204.013.800**	**100,00**		
3.6.1	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**204.013.800**	**204.013.800**	**100,00**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
3.6.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	204.013.800	204.013.800	100,00		
3.7	**Program Pengendalian Penduduk**	**1.968.507.000**	**1.968.441.000**	**100,00**		
3.7.1	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**1.617.107.000**	**1.617.045.000**	**100,00**		
3.7.1.1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	581.034.000	581.034.000	100,00		
3.7.1.2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	694.315.000	694.291.000	100,00		
3.7.1.3	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	341.758.000	341.720.000	99,99		
3.7.2	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**351.400.000**	**351.396.000**	**100,00**		
3.7.2.1	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	127.200.000	127.200.000	100,00		
3.7.2.2	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	100.000.000	99.996.000	100,00		
3.7.2.3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	124.200.000	124.200.000	100,00		
3.8	**Program Pembinaan Keluarga Berncana (KB)**	**7.498.652.000**	**7.486.234.000**	**99,83**		
3.8.1	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**1.060.500.000**	**1.060.500.000**	**100,00**		
3.8.1.1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.000.000	120.000.000	100,00		
3.8.1.2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	50.000.000	50.000.000	100,00		
3.8.1.3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	10.000.000	10.000.000	100,00		
3.8.1.4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	150.000.000	100,00		
3.8.1.5	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	169.000.000	169.000.000	100,00		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
3.8.1.6	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	481.500.000	481.500.000	100,00		
3.8.1.7	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	80.000.000	100,00		
3.8.2	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**776.280.000**	**776.276.000**	**100,00**		
3.8.2.1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	250.000.000	250.000.000	100,00		
3.8.2.2	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	186.280.000	186.276.000	100,00		
3.8.2.3	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	340.000.000	340.000.000	100,00		
3.8.3	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**3.790.372.000**	**3.777.958.000**	**99,67**		
3.8.3.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.900.000	18.900.000	100,00		
3.8.3.2	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	126.000.000	126.000.000	100,00		
3.8.3.3	Peningkatan Kesertaan KB Pria	624.572.000	624.548.000	100,00		
3.8.3.4	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	171.000.000	171.000.000	100,00		
3.8.3.5	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	279.709.000	277.205.000	99,10		
3.8.3.6	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	84.000.000	84.000.000	100,00		
3.8.3.7	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.237.011.000	2.227.125.000	99,56		
3.8.3.8	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	236.280.000	236.280.000	100,00		
3.8.3.9	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.900.000	12.900.000	100,00		
3.8.4	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**1.871.500.000**	**1.871.500.000**	**100,00**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
3.8.4.1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	600.000.000	600.000.000	100,00		
3.8.4.2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	884.000.000	884.000.000	100,00		
3.8.4.3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	387.500.000	387.500.000	100,00		
3.9	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**8.998.327.000**	**8.989.360.800**	**99,90**		
3.9.1	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**8.192.967.000**	**8.184.366.800**	**99,90**		
3.9.1.1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	93.140.000	92.900.000	99,74		
3.9.1.2	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	5.600.027.000	5.600.026.800	100,00		
3.9.1.3	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	352.050.000	97,79		
3.9.1.4	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	136.280.000	136.011.000	99,80		
3.9.1.5	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	118.140.000	118.011.000	99,89		
3.9.1.6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.119.000.000	1.119.000.000	100,00		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
3.9.1.7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	616.380.000	616.368.000	100,00		
3.9.1.8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	150.000.000	150.000.000	100,00		
3.9.2	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**805.360.000**	**804.994.000**	**99,95**		
3.9.2.1	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	635.360.000	634.994.000	99,94		
3.9.2.2	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	170.000.000	170.000.000	100,00		
Sasaran 4 : Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Kompeten dan Produktif		**1.033.843.000**	**1.022.987.000**	**88,00**	**88,00**	**92,44**
4.1	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**-**	**-**	**-**		
4.2	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**600.951.000**	**599.951.000**	**99,83**		
4.2.1	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**33.467.000**	**33.467.000**	**100,00**		
4.2.1.1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	7.026.000	7.026.000	100,00		
4.2.1.2	Perluasan Kesempatan Kerja	26.441.000	26.441.000	100,00		
4.2.2	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**400.000.000**	**399.000.000**	**99,75**		
4.2.2.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	200.000.000	199.500.000	99,75		
4.2.2.2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	200.000.000	199.500.000	99,75		
4.2.3	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**157.532.000**	**157.532.000**	**100,00**		
4.2.3.1	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	3.692.000	3.692.000	100,00		
4.2.3.2	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	153.840.000	153.840.000	100,00		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
4.2.4	**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**9.952.000**	**9.952.000**	**100,00**		
4.2.4.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.952.000	9.952.000	100,00		
4.3	**Program Hubungan Indudtrial**	**405.388.000**	**405.388.000**	**100,00**		
4.3.1	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**405.388.000**	**405.388.000**	**100,00**		
4.3.1.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	173.320.000	173.320.000	100,00		
4.3.1.2	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	173.320.000	173.320.000	100,00		
4.3.1.3	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	58.748.000	58.748.000	100,00		
4.4	**Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja**	**27.504.000**	**17.648.000**	**64,17**		
4.4.1	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**27.504.000**	**17.648.000**	**64,17**		
4.4.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	27.504.000	17.648.000	64,17		
Sasaran 5 : Menignktanya Ketahanan Pangan		**6.510.896.890**	**5.508.878.500**	**84,61**	**84,30**	**102,11**
5.1	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**	**791.316.140**	**791.316.000**	**100,00**		
5.1.1	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**791.316.140**	**791.316.000**	**100,00**		
5.1.1.1	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	757.051.140	757.051.000	100,00		
5.1.1.2	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	34.265.000	34.265.000	100,00		
5.2	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**5.499.534.750**	**4.497.516.500**	**81,78**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
5.2.1	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**2.456.203.000**	**2.456.203.000**	**100,00**		
5.2.1.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	27.804.000	27.804.000	100,00		
5.2.1.2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	227.010.000	227.010.000	100,00		
5.2.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	27.108.000	27.108.000	100,00		
5.2.1.4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	54.216.000	54.216.000	100,00		
5.2.1.5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	25.065.000	25.065.000	100,00		
5.2.1.6	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.095.000.000	2.095.000.000	100,00		
5.2.2	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**501.279.750**	**499.261.500**	**99,60**		
5.2.2.1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	474.171.750	472.153.500	99,57		
5.2.2.2	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	27.108.000	27.108.000	100,00		
5.2.3	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**2.542.052.000**	**1.542.052.000**	**60,66**		
5.2.3.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	27.688.000	27.688.000	100,00		
5.2.3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.486.676.000	1.486.676.000	59,79		
5.2.3.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	27.688.000	27.688.000	100,00		
5.3	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**98.748.000**	**98.748.000**	**100,00**		
5.3.1	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**28.500.000**	**28.500.000**	**100,00**		
5.3.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	28.500.000	28.500.000	100,00		
5.3.2	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**70.248.000**	**70.248.000**	**100,00**		
5.3.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	43.140.000	43.140.000	100,00		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
5.3.2.2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.108.000	27.108.000	100,00		
5.4	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**121.298.000**	**121.298.000**	**100,00**		
5.4.1	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**121.298.000**	**121.298.000**	**100,00**		
5.4.1.1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	27.108.000	27.108.000	100,00		
5.4.1.2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	27.108.000	27.108.000	100,00		
5.4.1.3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	27.688.000	27.688.000	100,00		
5.4.1.4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	39.394.000	39.394.000	100,00		
Sasaran 6 : Meningkatnya Penanganan Maslaah Kesejahteraan Sosial		**10.763.358.300**	**10.180.009.000**	**94,58**	**10,17**	**113,57**
6.1	**Program Pemberdayaan Sosial**	**8.218.002.800**	**7.651.494.000**	**93,11**		
6.1.1	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**128.332.000**	**128.332.000**	**100,00**		
6.1.1.1	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	128.332.000	128.332.000	100,00		
6.1.2	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**8.089.670.800**	**7.523.162.000**	**93,00**		
6.1.2.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	408.680.000	408.680.000	100,00		
6.1.2.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	480.746.000	477.956.000	99,42		
6.1.2.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7.200.244.800	6.636.526.000	92,17		
6.2	**Program Rehabilitasi Sosial**	**2.480.160.500**	**2.463.320.000**	**99,32**		
6.2.1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**2.095.320.000**	**2.078.820.000**	**99,21**		
6.2.1.1	Penyediaan Permakanan	2.017.320.000	2.000.820.000	99,18		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
6.2.1.2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	78.000.000	78.000.000	100,00		
6.2.2	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**384.840.500**	**384.500.000**	**99,91**		
6.2.2.1	Penyediaan Alat Bantu	199.340.500	199.000.000	99,83		
6.2.2.2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	185.500.000	185.500.000	100,00		
6.3	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**65.195.000**	**65.195.000**	**100,00**		
6.3.1	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**65.195.000**	**65.195.000**	**100,00**		
6.3.1.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	65.195.000	65.195.000	100,00		
Sasaran 7 : Meningkatnya kUalitas Infrastruktur Wilayah		**359.594.412.291**	**296.248.665.063**	**82,38**	**86,02**	**106,71**
7.1	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**19.220.555.671**	**18.817.141.571**	**97,90**		
7.1.1	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**19.017.691.523**	**18.614.289.571**	**97,88**		
7.1.1.1	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	4.288.658.866	4.202.778.000	98,00		
7.1.1.2	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	4.079.415.845	3.944.535.000	96,69		
7.1.1.3	Normalisasi/Restorasi Sungai	8.709.565.064	8.564.301.571	98,33		
7.1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	179.998.889	179.990.000	100,00		
7.1.1.5	Pembangunan Tanggul Sungai	1.760.052.859	1.722.685.000	97,88		
7.1.2	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**202.864.148**	**202.852.000**	**99,99**		
7.1.2.1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	125.963.048	125.962.000	100,00		
7.1.2.2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	76.901.100	76.890.000	99,99		
7.2	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**796.080.000**	**794.700.000**	**99,83**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
7.2.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**796.080.000**	**794.700.000**	**99,83**		
7.2.1.1	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	796.080.000	794.700.000	99,83		
7.3	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**24.605.547.966**	**18.864.364.000**	**76,67**		
7.3.1	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**24.605.547.966**	**18.864.364.000**	**76,67**		
7.3.1.1	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7.673.959.973	4.613.462.000	60,12		
7.3.1.2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	16.931.587.993	14.250.902.000	84,17		
7.4	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**309.326.876.164**	**252.138.845.762**	**81,51**		
7.4.1	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**309.326.876.164**	**252.138.845.762**	**81,51**		
7.4.1.1	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.867.179.999	1.810.794.680	96,98		
7.4.1.2	Pembangunan Jembatan	46.587.596.147	45.981.003.657	98,70		
7.4.1.3	Rehabilitasi Jembatan	694.000.012	693.157.000	99,88		
7.4.1.4	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	446.540.000	444.905.000	99,63		
7.4.1.5	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	887.998.091	127.043.500	14,31		
7.4.1.6	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	700.000.000	696.155.600	99,45		
7.4.1.7	Pembangunan Jalan	138.831.081.669	99.325.219.163	71,54		
7.4.1.8	Rehabilitasi Jalan	119.312.480.246	103.060.567.162	86,38		
7.5	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**2.066.700.204**	**2.065.157.600**	**99,93**		
7.5.1	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100,00**		
7.5.1.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100,00		
7.5.1.2	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100,00		
7.5.2	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**191.399.484**	**191.353.600**	**99,98**		
7.5.2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	191.399.484	191.353.600	99,98		
7.5.3	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**379.756.720**	**379.280.000**	**99,87**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
7.5.3	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	379.756.720	379.280.000	99,87		
7.5.4	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**80.552.000**	**80.349.000**	**99,75**		
7.5.4.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	39.693.000	39.490.000	99,49		
7.5.4.2	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	40.859.000	40.859.000	100,00		
7.5.5	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**697.764.000**	**696.951.000**	**99,88**		
7.5.5.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	205.000.000	204.900.000	99,95		
7.5.5.2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100.000.000	99.300.000	99,30		
7.5.5.3	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	392.764.000	392.751.000	100,00		
7.5.6	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**286.060.000**	**286.060.000**	**100,00**		
7.5.6.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	25.000.000	25.000.000	100,00		
7.5.6.2	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	261.060.000	261.060.000	100,00		
7.5.7	**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**124.990.000**	**124.986.000**	**100,00**		
7.5.7.1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	100,00		
7.5.7.2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	99.990.000	99.986.000	100,00		
7.5.8	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**206.178.000**	**206.178.000**	**100,00**		
7.5.8	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	206.178.000	206.178.000	100,00		
7.6	**Program Pengelolaan Pelayaran**	**3.578.652.287**	**3.568.456.130**	**99,72**		
7.6.1	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota**	**44.828.000**	**44.754.000**	**99,83**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
7.6.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	44.828.000	44.754.000	99,83		
7.6.2	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**17.600.680**	**17.598.130**	**99,99**		
7.6.2.1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.600.680	17.598.130	99,99		
7.6.3	**Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal**	**17.842.130**	**17.834.000**	**99,95**		
7.6.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	17.842.130	17.834.000	99,95		
7.6.4	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**200.000.000**	**199.800.000**	**99,90**		
7.6.4	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	200.000.000	199.800.000	99,90		
7.6.5	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**3.250.478.477**	**3.240.567.000**	**99,70**		
7.6.5.1	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	3.250.478.477	3.240.567.000	99,70		
7.6.6	**Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**47.903.000**	**47.903.000**	**100,00**		
7.6.6.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	47.903.000	47.903.000	100,00		
Sasaran 8 : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman		**29.041.012.942**	**28.839.581.000**	**99,31**	**66,12**	**109,87**
8.1	**Program Pegelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**13.998.994.999**	**13.860.012.000**	**99,01**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
8.1.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**13.998.994.999**	**13.860.012.000**	**99,01**		
8.1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	400.000.000	400.000.000	100,00		
8.1.1.2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.859.995.999	3.837.660.000	99,42		
8.1.1.3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	9.738.999.000	9.622.352.000	98,80		
8.2	**Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan persampahan Regional**	**-**	**-**	**-**		
8.3	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**1.258.647.519**	**1.198.647.000**	**95,23**		
8.3.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.258.647.519**	**1.198.647.000**	**95,23**		
8.3.1.1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.258.647.519	1.198.647.000	95,23		
8.4	**Program Pengembangan Perumahan**	**200.665.000**	**200.631.000**	**99,98**		
8.4.1	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**165.420.000**	**165.420.000**	**100,00**		
8.4.1.1	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	165.420.000	165.420.000	100,00		
8.4.2	**Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**	**35.245.000**	**35.211.000**	**99,90**		
8.4.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	35.245.000	35.211.000	99,90		
8.5	**Program Kawasan Permukiman**	**8.425.000.000**	**8.425.000.000**	**100,00**		
8.5.1	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**800.000.000**	**800.000.000**	**100,00**		
8.5.1.1	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	800.000.000	800.000.000	100,00		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
8.5.2	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**7.625.000.000**	**7.625.000.000**	**100,00**		
8.5.2.1	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	7.625.000.000	7.625.000.000	100,00		
8.6	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**	**-**	**-**	**-**		
8.7	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**5.157.705.423**	**5.155.291.000**	**99,95**		
8.7.1	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**5.157.705.423**	**5.155.291.000**	**99,95**		
8.7.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.157.705.423	5.155.291.000	99,95		
8.7.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	9.230.000	9.090.000	98,48		
Sasaran 9 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah		**138.080.533.101**	**132.125.095.548**	**95,69**	**16,86**	**97,72**
9.1	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**5.305.894.610**	**5.225.207.000**	**98,48**		
9.1.1	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**4.666.301.610**	**4.586.297.000**	**98,29**		
9.1.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	50.436.000	50.436.000	100,00		
9.1.1.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.332.687.000	1.292.250.000	96,97		
9.1.1.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.283.178.610	3.243.611.000	98,79		
9.1.2	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**99.980.000**	**99.980.000**	**100,00**		
9.1.2.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	49.990.000	49.990.000	100,00		
9.1.2.2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	49.990.000	49.990.000	100,00		
9.1.3	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**539.613.000**	**538.930.000**	**99,87**		
9.1.3.1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	539.613.000	538.930.000	99,87		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
9.2	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**11.199.976.971**	**11.080.687.500**	**98,93**		
9.2.1	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**546.073.600**	**544.674.800**	**99,74**		
9.2.1.1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	59.630.000	59.630.000	100,00		
9.2.1.2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	95.000.000	95.000.000	100,00		
9.2.1.3	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	391.443.600	390.044.800	99,64		
9.2.2	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**10.653.903.371**	**10.536.012.700**	**98,89**		
9.2.2.1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	56.786.000	49.773.200	87,65		
9.2.2.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.540.031.703	3.451.067.500	97,49		
9.2.2.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.457.305.668	6.437.195.000	99,69		
9.2.2.4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.990.000	49.990.000	100,00		
9.2.2.5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	51.070.000	49.387.000	96,70		
9.2.2.6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	483.720.000	483.600.000	99,98		
9.2.2.7	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	15.000.000	15.000.000	100,00		
9.3	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**50.340.000**	**50.340.000**	**100,00**		
9.3.1	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**50.340.000**	**50.340.000**	**100,00**		
9.3.1.1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	50.340.000	50.340.000	100,00		
9.4	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**310.918.000**	**310.918.000**	**100,00**		
9.4.1	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**56.768.000**	**56.768.000**	**100,00**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
9.4.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	56.768.000	56.768.000	100,00		
9.4.2	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**95.000.000**	**95.000.000**	**100,00**		
9.4.2.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	95.000.000	95.000.000	100,00		
9.4.3	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**159.150.000**	**159.150.000**	**100,00**		
9.4.3.1	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	159.150.000	159.150.000	100,00		
9.5	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**2.072.597.530**	**2.050.820.820**	**98,95**		
9.5.1	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**142.310.500**	**142.310.500**	**100,00**		
9.5.1.1	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	142.310.500	142.310.500	100,00		
9.5.2	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**1.258.159.000**	**1.253.276.800**	**99,61**		
9.5.2.1	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	236.749.000	236.749.000	100,00		
9.5.2.2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	500.000.000	496.000.000	99,20		
9.5.2.3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	172.630.000	172.630.000	100,00		
9.5.2.4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	348.780.000	347.897.800	99,75		
9.5.3	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**672.128.030**	**655.233.520**	**97,49**		
9.5.3.1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	219.856.521	208.600.000	94,88		
9.5.3.2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	240.047.509	236.570.000	98,55		
9.5.3.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	212.224.000	210.063.520	98,98		
9.6	**Program Pemasaran Pariwisata**	**6.775.095.000**	**6.750.775.900**	**99,64**		
9.6.1	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**6.775.095.000**	**6.750.775.900**	**99,64**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
9.6.1.1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	419.630.000	415.800.000	99,09		
9.6.1.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	4.905.465.000	4.885.095.400	99,58		
9.6.1.3	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1.450.000.000	1.449.880.500	99,99		
9.7	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Inteltual**	**2.926.517.600**	**2.918.567.600**	**99,73**		
9.7.1	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**2.926.517.600**	**2.918.567.600**	**99,73**		
9.7.1.1	Pengembangan Riset	900.000.000	900.000.000	100,00		
9.7.1.2	Pengembangan Pendidikan	250.002.600	245.652.600	98,26		
9.7.1.3	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	250.000.000	247.200.000	98,88		
9.7.1.4	Pengembangan Sistem Pemasaran	456.515.000	455.715.000	99,82		
9.7.1.5	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	120.000.000	120.000.000	100,00		
9.7.1.6	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	950.000.000	950.000.000	100,00		
9.8	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariowisata dan Ekonomi Kreatif**	**591.974.000**	**591.765.000**	**99,96**		
9.8.1	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**591.974.000**	**591.765.000**	**99,96**		
9.8.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	88.734.000	88.525.000	99,76		
9.8.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	503.240.000	503.240.000	100,00		
9.9	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**24.409.616.045**	**24.047.592.667**	**98,52**		
9.9.1	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**24.409.616.045**	**24.047.592.667**	**98,52**		
9.9.1.1	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	150.000.000	150.000.000	100,00		
9.9.1.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	22.983.416.969	22.655.477.167	98,57		
9.9.1.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.276.199.077	1.242.115.500	97,33		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
9.10	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**7.882.897.190**	**4.751.862.840**	**60,28**		
9.10.1	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**7.882.897.190**	**4.751.862.840**	**60,28**		
9.10.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.972.920.000	887.311.040	44,97		
9.10.1.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.692.077.000	658.695.000	24,47		
9.10.1.3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.217.900.190	3.205.856.800	99,63		
9.11	**Program Penyuluhan Pertanian**	**661.114.000**	**660.206.000**	**99,86**		
9.11.1	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**661.114.000**	**660.206.000**	**99,86**		
9.11.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	107.932.000	107.200.000	99,32		
9.11.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	332.826.000	332.826.000	100,00		
9.11.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	20.356.000	20.180.000	99,14		
9.11.4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	200.000.000	200.000.000	100,00		
9.12	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**6.933.119.420**	**6.925.090.120**	**99,88**		
9.12.1	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**439.820.000**	**439.028.440**	**99,82**		
9.12.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	439.820.000	439.028.440	99,82		
9.12.2	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1.207.762.600**	**1.207.404.320**	**99,97**		
9.12.2.1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1.207.762.600	1.207.404.320	99,97		
9.12.3	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**5.285.536.820**	**5.278.657.360**	**99,87**		
9.12.3.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	5.285.536.820	5.278.657.360	99,87		
9.13	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**29.707.000.902**	**29.099.318.011**	**97,95**		
9.13.1	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**1.120.200.000**	**1.120.000.000**	**99,98**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
9.13.1.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	1.120.200.000	1.120.000.000	99,98		
9.13.2	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**28.426.800.902**	**27.819.613.011**	**97,86**		
9.13.2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4.612.502.142	4.544.800.000	98,53		
9.13.2.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	400.000.000	400.000.000	100,00		
9.13.2.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	20.145.895.420	19.619.895.011	97,39		
9.13.2.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	4.501.700	4.500.000	99,96		
9.13.2.5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	322.507.540	322.500.000	100,00		
9.13.2.6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	271.224.946	266.000.000	98,07		
9.13.2.7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2.670.169.153	2.661.918.000	99,69		
9.13.3	**Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum**	**160.000.000**	**159.705.000**	**99,82**		
9.13.3.1	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	160.000.000	159.705.000	99,82		
9.14	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**441.700.082**	**441.471.082**	**99,95**		
9.14.1	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**368.671.082**	**368.671.082**	**100,00**		
9.14.1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	368.671.082	368.671.082	100,00		
9.14.2	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**73.029.000**	**72.800.000**	**99,69**		
9.14.2.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	73.029.000	72.800.000	99,69		
9.15	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**8.190.630.710**	**7.176.449.317**	**87,62**		
9.15.1	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**8.190.630.710**	**7.176.449.317**	**87,62**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
9.15.1.1	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	8.190.630.710	7.176.449.317	87,62		
9.16	**Program Penyuluhan Pertanian**	**1.964.876.620**	**1.962.596.620**	**99,88**		
9.16.1	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**1.964.876.620**	**1.962.596.620**	**99,88**		
9.16.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	702.410.620	700.810.620	99,77		
9.16.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	446.876.000	446.196.000	99,85		
9.16.1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	522.650.000	522.650.000	100,00		
9.16.1.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	292.940.000	292.940.000	100,00		
9.17	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	**88.339.000**	**88.339.000**	**100,00**		
9.17.1	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**19.794.000**	**19.794.000**	**100,00**		
9.17.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	19.794.000	19.794.000	100,00		
9.17.2	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**63.545.000**	**63.545.000**	**100,00**		
9.17.2.1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	63.545.000	63.545.000	100,00		
9.17.3	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)**	**5.000.000**	**5.000.000**	**100,00**		
9.17.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	5.000.000	5.000.000	100,00		
9.18	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**3.745.433.841**	**3.734.245.000**	**99,70**		
9.18.1	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**3.745.433.841**	**3.734.245.000**	**99,70**		
9.18.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	49.815.000	49.815.000	100,00		
9.18.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdaganga	3.695.618.841	3.684.430.000	99,70		
9.19	**Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**3.224.957.000**	**3.224.159.000**	**99,98**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
9.19.1	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**53.874.000**	**53.848.000**	**99,95**		
9.19.1.1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	53.874.000	53.848.000	99,95		
9.19.2	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**3.171.083.000**	**3.170.311.000**	**99,98**		
9.19.2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	527.670.000	527.306.000	99,93		
9.19.2.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.643.413.000	2.643.005.000	99,98		
9.20	**Program Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**96.010.000**	**95.905.000**	**99,89**		
9.20.1	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**96.010.000**	**95.905.000**	**99,89**		
9.20.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	20.065.000	20.065.000	100,00		
9.20.1.2	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	75.945.000	75.840.000	99,86		
9.21	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**1.498.426.700**	**1.498.276.700**	**99,99**		
9.21.1	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**1.498.426.700**	**1.498.276.700**	**99,99**		
9.21.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1.482.111.700	1.481.961.700	99,99		
9.21.1.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	16.315.000	16.315.000	100,00		
9.22	**Program Perencanaan dan Pengembangan Industrial**	**514.035.000**	**513.905.000**	**99,97**		
9.22.1	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**514.035.000**	**513.905.000**	**99,98**		
9.22.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	290.065.000	290.065.000	100,00		
9.22.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	20.065.000	20.065.000	100,00		
9.22.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	20.065.000	20.065.000	100,00		
9.22.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	183.840.000	183.710.000	99,93		
9.23	**Program Pengendalian Usaha Izin Usaha Industrial kab/Kota**	**-**	**-**	**-**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
9.24	**Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**	**1.128.717.000**	**1.128.506.000**	**99,98**		
9.24.1	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**1.128.717.000**	**1.128.506.000**	**99,98**		
9.24.1.1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	28.717.000	28.717.000	100,00		
9.24.1.2	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1.100.000.000	1.099.789.000	99,98		
9.25	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**11.321.493.881**	**10.780.173.185**	**95,22**		
9.25.1	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**11.321.493.881**	**10.780.173.185**	**95,22**		
9.25.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	107.030.000	106.326.680	99,34		
9.25.1.2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	10.997.017.881	10.454.550.505	95,07		
9.25.1.3	Penyuluhan Transmigrasi	43.140.000	43.140.000	100,00		
9.25.1.4	Pelatihan Transmigrasi	174.306.000	176.156.000	101,06		
9.26	**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**	**352.904.000**	**343.504.186**	**97,34**		
9.26.1	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**352.904.000**	**343.504.186**	**97,34**		
9.26.1.1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	203.198.000	203.197.986	100,00		
9.26.1.2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	149.706.000	140.306.200	93,72		
9.27	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**485.346.000**	**485.346.000**	**100,00**		
9.27.1	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**485.346.000**	**485.346.000**	**100,00**		
9.27.1.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	401.730.000	401.730.000	100,00		
9.27.1.2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	83.616.000	83.616.000	100,00		
9.28	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**530.755.000**	**530.755.000**	**100,00**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
9.28.1	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**530.755.000**	**530.755.000**	**100,00**		
9.28.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	530.755.000	530.755.000	100,00		
9.29	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**1.183.686.000**	**1.183.652.000**	**100,00**		
9.29.1	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.183.686.000**	**1.183.652.000**	**100,00**		
9.29.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.183.686.000	1.183.652.000	100,00		
9.30	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**1.064.917.000**	**1.064.917.000**	**100,00**		
9.30.1	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.064.917.000**	**1.064.917.000**	**100,00**		
9.30.1.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	945.657.000	945.657.000	100,00		
9.30.1.2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	119.260.000	119.260.000	100,00		
9.31	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**	**2.702.182.000**	**2.690.682.000**	**99,57**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
9.31.1	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**2.702.182.000**	**2.690.682.000**	**99,57**		
9.31.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	508.479.000	508.479.000	100,00		
9.31.1.2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	2.089.183.000	2.077.683.000	99,45		
9.31.1.3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	104.520.000	104.520.000	100,00		
9.32	**Program Pengembangan UMKM**	**719.062.000**	**719.062.000**	**100,00**		
9.32.1	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**719.062.000**	**719.062.000**	**100,00**		
9.32.1.1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	719.062.000	719.062.000	100,00		
Sasaran 10 : Meningkatnya Investasi Daerah		**2.380.532.000**	**2.258.125.000**	**94,86**	**320,90**	**191,15**
10.1	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**901.839.000**	**901.839.000**	**100,00**		
10.1.1	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**901.839.000**	**901.839.000**	**100,00**		
10.1.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	250.000.000	250.000.000	100,00		
10.1.1.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	301.839.000	301.839.000	100,00		
10.1.1.3	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	350.000.000	100,00		
10.2	**Program Promosi Penanaman Modal**	**158.160.000**	**157.852.000**	**99,81**		
10.2.1	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**158.160.000**	**157.852.000**	**99,81**		
10.2.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	158.160.000	157.852.000	99,81		
10.3	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**499.833.000**	**497.090.000**	**99,45**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
10.3.1	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**499.833.000**	**497.090.000**	**99,45**		
10.3.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	63.753.000	63.753.000	100,00		
10.3.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	106.080.000	106.064.000	99,98		
10.3.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20.000.000	17.303.000	86,52		
10.3.1.4	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	260.000.000	259.970.000	99,99		
10.3.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	50.000.000	50.000.000	100,00		
10.4	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**521.700.000**	**403.564.000**	**77,36**		
10.4.1	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**521.700.000**	**403.564.000**	**77,36**		
10.4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	114.836.000	-	-		
10.4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	239.863.000	239.863.000	100,00		
10.4.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	167.001.000	163.701.000	98,02		
10.5	**Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**299.000.000**	**297.780.000**	**99,59**		
10.5.1	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**299.000.000**	**297.780.000**	**99,59**		
10.5.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	299.000.000	297.780.000	99,59		
Sasaran 11 : Meningkatnya Investasi Daerah		**292.311.947.186**	**160.577.585.662**	**54,93**	**58,35**	**97,41**
11.1	**Program Penyelenggaraan Statistyik Sektoral**	**262.007.000**	**261.607.000**	**99,85**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
11.1.1	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**262.007.000**	**261.607.000**	**99,85**		
11.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	189.967.000	189.567.000	99,79		
11.1.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	44.600.000	44.600.000	100,00		
11.1.1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	27.440.000	27.440.000	100,00		
11.2	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**3.318.554.000**	**3.197.000.000**	**96,34**		
11.2.1	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**2.560.012.000**	**2.511.884.000**	**98,12**		
11.2.1.1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1.265.734.000	1.264.600.000	99,91		
11.2.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	49.045.000	49.045.000	100,00		
11.2.1.3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	752.940.000	705.946.000	93,76		
11.2.1.4	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	286.093.000	286.093.000	100,00		
11.2.1.5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	206.200.000	206.200.000	100,00		
11.2.2	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**123.780.000**	**110.000.000**	**88,87**		
11.2.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	13.780.000	-	-		
11.2.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	100.000.000	100.000.000	100,00		
11.2.2.3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	100,00		
11.2.3	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**634.762.000**	**575.116.000**	**90,60**		
11.2.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	105.585.000	47.180.000	44,68		
11.2.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	529.177.000	527.936.000	99,77		
11.3	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah**	**5.414.238.000**	**5.228.405.000**	**96,57**		
11.3.1	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**2.381.009.000**	**2.302.348.000**	**96,70**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
11.3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.381.009.000	2.302.348.000	96,70		
11.3.2	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**377.847.000**	**357.422.000**	**94,59**		
11.3.2.1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	377.847.000	357.422.000	94,59		
11.3.3	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**2.655.382.000**	**2.568.635.000**	**96,73**		
11.3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	649.158.000	649.158.000	100,00		
11.3.3.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	107.215.000	89.585.000	83,56		
11.3.3.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1.899.009.000	1.829.892.000	96,36		
11.4	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**6.016.033.000**	**5.822.020.000**	**96,78**		
11.4.1	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**306.682.000**	**306.472.000**	**99,93**		
11.4.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	212.703.000	212.493.000	99,90		
11.4.1.2	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	93.979.000	93.979.000	100,00		
11.4.2	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**356.090.000**	**356.090.000**	**100,00**		
11.4.2.1	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	300.000.000	300.000.000	100,00		
11.4.2.2	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	56.090.000	56.090.000	100,00		
11.4.3	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**250.000.000**	**250.000.000**	**100,00**		
11.4.3.1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	250.000.000	250.000.000	100,00		
11.4.4	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**5.103.261.000**	**4.909.458.000**	**292**		
11.4.4.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4.812.702.000	4.629.299.000	96,19		
11.4.4.2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	265.559.000	255.159.000	96,08		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
11.4.4.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	25.000.000	25.000.000	100,00		
11.5	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**10.517.461.000**	**10.246.461.000**	**97,42**		
11.5.1	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**10.517.461.000**	**10.246.461.000**	**97,42**		
11.5.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.947.461.000	1.946.461.000	99,95		
11.5.1.2	elaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	8.570.000.000	8.300.000.000	96,85		
11.6	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**310.390.000**	**310.390.000**	**100,00**		
11.6.1	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**310.390.000**	**310.390.000**	**100,00**		
11.6.1.1	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	95.000.000	95.000.000	100,00		
11.6.1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	120.390.000	120.390.000	100,00		
11.6.1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	95.000.000	95.000.000	100,00		
11.7	**Program Pengelolan Keuangan Daerah**	**249.515.230.020**	**119.683.593.948**	**47,97**		
11.7.1	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**7.420.210.400**	**4.904.233.418**	**66,09**		
11.7.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	773.715.000	583.300.000	75,39		
11.7.1.2	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	284.786.800	246.990.668	86,73		
11.7.1.3	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	561.836.800	251.924.160	44,84		
11.7.1.4	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	202.724.800	15.514.000	7,65		
11.7.1.5	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	970.974.200	402.155.000	41,42		
11.7.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	707.715.000	429.800.000	60,73		
11.7.1.7	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	233.973.000	-	-		
11.7.1.8	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	161.582.000	120.000.000	74,27		
11.7.1.9	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	161.582.000	90.405.000	55,95		
11.7.1.10	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	132.782.000	132.000.000	99,41		
11.7.1.11	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.221.362.400	926.227.970	75,84		
11.7.1.12	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.011.180.400	838.316.620	82,90		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
11.7.1.13	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	995.996.000	867.600.000	87,11		
11.7.2	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**2.176.897.000**	**1.759.121.760**	**80,81**		
11.7.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	437.925.000	340.366.240	77,72		
11.7.2.2	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	154.482.000	154.300.000	99,88		
11.7.2.3	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	408.102.000	270.016.000	66,16		
11.7.2.4	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	124.911.000	124.911.000	100,00		
11.7.2.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	532.733.000	523.677.467	98,30		
11.7.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	89.911.000	82.000.000	91,20		
11.7.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	44.520.000	40.597.473	91,19		
11.7.2.8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	154.483.000	104.234.665	67,47		
11.7.2.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	229.830.000	119.018.915	51,79		
11.7.3	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**5.009.238.020**	**4.369.340.200**	**87,23**		
11.7.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	404.856.020	359.290.000	88,75		
11.7.3.2	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	494.460.000	310.670.000	62,83		
11.7.3.3	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	850.062.000	724.216.600	85,20		
11.7.3.4	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	158.062.000	157.800.000	99,83		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
11.7.3.5	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	487.464.000	460.310.000	94,43		
11.7.3.6	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1.074.424.000	842.789.280	78,44		
11.7.3.7	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	433.938.000	416.102.000	95,89		
11.7.3.8	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1.105.972.000	1.098.162.320	99,29		
11.7.4	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**234.908.884.600**	**108.650.898.570**	**46,25**		
11.7.4.1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	5.817.380.062	3.959.618.032	68,07		
11.7.4.2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	224.091.504.538	104.691.280.538	46,72		
11.7.4.3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000	-	-		
11.8	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**6.129.871.800**	**5.551.366.360**	**90,56**		
11.8.1	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**6.129.871.800**	**5.551.366.360**	**90,56**		
11.8.1.1	Penyusunan Standar Harga	1.029.994.000	799.145.000	77,59		
11.8.1.2	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	793.860.800	763.006.040	96,11		
11.8.1.3	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	245.805.000	245.805.000	100,00		
11.8.1.4	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	427.990.000	227.990.000	53,27		
11.8.1.5	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1.590.177.000	1.561.786.200	98,21		
11.8.1.6	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	326.938.800	288.965.760	88,39		
11.8.1.7	Inventarisasi Barang Milik Daerah	423.340.000	423.340.000	100,00		
11.8.1.8	Pengamanan Barang Milik Daerah	696.892.600	680.245.760	97,61		
11.8.1.9	Penilaian Barang Milik Daerah	303.153.000	290.700.400	95,89		
11.8.1.10	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	291.720.600	270.382.200	92,69		
11.9	**Program Pengelolan Keuangan Daerah**	**401.224.000**	**400.854.154**	**99,91**		
11.9.1	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**210.000.000**	**210.000.000**	**100,00**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
11.9.1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	210.000.000	210.000.000	100,00		
11.9.2	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**191.224.000**	**190.854.154**	**99,81**		
11.9.2.1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	191.224.000	190.854.154	99,81		
11.10	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**2.210.614.800**	**2.208.534.300**	**99,91**		
11.10.1	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**2.210.614.800**	**2.208.534.300**	**99,91**		
11.10.1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	119.200.000	119.200.000	100,00		
11.10.1.2	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	267.008.000	267.008.000	100,00		
11.10.1.3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	267.008.000	267.008.000	100,00		
11.10.1.4	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	180.000.000	180.000.000	100,00		
11.10.1.5	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	150.084.800	150.084.800	100,00		
11.10.1.6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	752.736.000	750.655.500	99,72		
11.10.1.7	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	60.000.000	60.000.000	100,00		
11.10.1.8	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	135.000.000	135.000.000	100,00		
11.10.1.9	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	279.578.000	279.578.000	100,00		
11.11	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**3.886.311.000**	**3.715.451.000**	**95,60**		
11.11.1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**3.259.033.000**	**3.192.764.000**	**97,97**		
11.11.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	356.287.000	317.636.000	89,15		
11.11.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	509.211.000	482.538.000	94,76		
11.11.1.3	Reviu Laporan Kinerja	329.987.000	329.987.000	100,00		
11.11.1.4	Reviu Laporan Keuangan	733.055.000	732.605.000	99,94		
11.11.1.5	Pengawasan Desa	527.120.000	527.120.000	100,00		
11.11.1.6	Kerja Sama Pengawasan Internal	630.021.000	629.526.000	99,92		
11.11.1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	173.352.000	173.352.000	100,00		
11.11.2	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**627.278.000**	**522.687.000**	**83,33**		
11.11.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	289.912.000	185.322.000	63,92		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
11.11.2.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	337.366.000	337.365.000	100,00		
11.12	**Program perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi**	**2.550.728.000**	**2.441.171.100**	**95,70**		
11.12.1	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**331.203.000**	**331.046.100**	**99,95**		
11.12.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	331.203.000	331.046.100	99,95		
11.12.2	**Pendampingan dan Asistensi**	**2.219.525.000**	**2.110.125.000**	**95,07**		
11.12.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	593.951.000	593.951.000	100,00		
11.12.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	633.351.000	632.406.000	99,85		
11.12.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	992.223.000	883.768.000	89,07		
11.13	**Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik**	**-**	**-**	**-**		
11.14	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**-**	**-**	**-**		
11.15	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**-**	**-**	**-**		
11.16	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**1.779.284.566**	**1.510.731.800**	**84,91**		
11.16.1	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**1.779.284.566**	**1.510.731.800**	**84,91**		
11.16.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Andowia	104.364.832	97.500.000	93,42		
11.16.1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bende	200.000.000	200.000.000	100,00		
11.16.1.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tinobu	210.415.500	-	-		
11.16.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Asera	275.164.750	272.161.800	98,91		
11.16.1.5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lamonae	282.887.484	282.720.000	99,94		
11.16.1.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lembo	285.300.000	265.250.000	92,97		
11.16.1.7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Langgikima	221.152.000	193.600.000	87,54		
11.16.1.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Linomoiyo	200.000.000	199.500.000	99,75		
Sasaran 12 : **Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Optimalnya implementasi SPBE, serta Pelayanan Publik yang terpercaya.**		**58.622.976.521**	**55.691.837.620**	**95,00**	**2,24**	**93,90**
12.1	**Program Pendaftaran Penduduk**	**455.916.000**	**452.238.000**	**99,19**		
12.1.1	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**140.217.000**	**139.715.000**	**99,64**		
12.1.1.1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	23.739.000	23.657.000	99,65		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
12.1.1.2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	116.478.000	116.058.000	99,64		
12.1.2	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**195.100.000**	**195.100.000**	**100,00**		
12.1.2.1	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	195.100.000	195.100.000	100,00		
12.1.3	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**98.339.000**	**98.103.000**	**99,76**		
12.1.3.1	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	98.339.000	98.103.000	99,76		
12.1.4	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**22.260.000**	**19.320.000**	**86,79**		
	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	22.260.000	19.320.000	86,79		
12.2	**Program Pencatatan Sipil**	**229.845.000**	**221.865.000**	**96,53**		
12.2.1	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**177.412.000**	**174.847.000**	**193**		
12.2.1.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	27.300.000	25.656.000	93,98		
12.2.1.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	150.112.000	149.191.000	99,39		
12.2.2	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**30.173.000**	**27.278.000**	**90,41**		
12.2.2.1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	22.260.000	20.460.000	91,91		
12.2.2.2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	7.913.000	6.818.000	86,16		
12.2.3	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**22.260.000**	**19.740.000**	**88,68**		
12.2.3	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	22.260.000	19.740.000	88,68		
12.3	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**572.249.000**	**549.615.000**	**96,04**		
12.3.1	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**13.356.000**	**13.260.000**	**99,28**		
12.3.1.1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	13.356.000	13.260.000	99,28		
12.3.2	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**541.085.000**	**520.475.000**	**96,19**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
12.3.2.1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17.808.000	16.740.000	94,00		
12.3.2.2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	77.113.000	76.363.000	99,03		
12.3.2.3	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	446.164.000	427.372.000	95,79		
12.3.3	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**17.808.000**	**15.880.000**	**89,17**		
12.3.3.1	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	17.808.000	15.880.000	89,17		
12.4	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**15.080.000**	**15.080.000**	**100,00**		
12.4.1	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**15.080.000**	**15.080.000**	**100,00**		
12.4.1.1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	15.080.000	15.080.000	100,00		
12.5	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	**7.702.945.000**	**7.628.481.815**	**99,03**		
12.5.1	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**7.702.945.000**	**7.628.481.815**	**99,03**		
12.5.1.1	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	66.012.000	66.011.815	100,00		
12.5.1.2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	301.980.000	301.980.000	100,00		
12.5.1.3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	562.425.000	517.680.000	92,04		
12.5.1.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2.000.000	2.000.000	100,00		
12.5.1.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	17.758.000	17.500.000	98,55		
12.5.1.6	Pelayanan Informasi Publik	11.770.000	11.770.000	100,00		
12.5.1.7	Layanan Hubungan Media	6.741.000.000	6.711.540.000	99,56		
12.6	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**6.047.813.000**	**4.388.754.685**	**72,57**		
12.6.1	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1.321.000**	**-**	**-**		
12.6.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.321.000	-	-		
12.6.2	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**6.046.492.000**	**4.388.754.685**	**72,58**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
12.6.2.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3.623.969.000	3.582.518.236	98,86		
12.6.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	393.413.000	343.574.449	87,33		
12.6.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	50.000.000	-	-		
12.6.2.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	360.570.000	266.220.000	73,83		
12.6.2.5	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.618.540.000	196.442.000	12,14		
12.7	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**2.116.209.000**	**2.115.507.000**	**99,97**		
12.7.1	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.116.209.000**	**2.115.507.000**	**99,97**		
12.7.1.1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	2.116.209.000	2.115.507.000	99,97		
12.8	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**25.956.429.521**	**24.916.770.400**	**95,99**		
12.8.1	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**15.287.701.521**	**14.269.858.400**	**93,34**		
12.8.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	24.078.000	23.785.000	98,78		
12.8.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	15.263.623.521	14.246.073.400	93,33		
12.8.2	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**635.728.000**	**613.912.000**	**96,57**		
12.8.2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	191.799.000	191.799.000	100,00		
12.8.2.2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	443.929.000	422.113.000	95,09		
12.8.3	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**33.000.000**	**33.000.000**	**100,00**		
12.8.3.1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	33.000.000	33.000.000	100,00		
12.8.4	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**100,00**		
12.8.4.1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00		
12.9	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**1.304.072.000**	**1.303.862.000**	**99,98**		
12.9.1	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.045.232.000**	**1.045.022.000**	**99,98**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
12.9.1.1	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	49.972.000	49.972.000	100,00		
12.9.1.2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.980.000	199.980.000	100,00		
12.9.1.3	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	41.820.000	41.820.000	100,00		
12.9.1.4	Pengembangan Bahan Pustaka	753.460.000	753.250.000	99,97		
12.9.2	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**258.840.000**	**258.840.000**	**100,00**		
12.9.2.1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	258.840.000	258.840.000	100,00		
12.10	**Program Pengelolaan Arsip**	**443.957.000**	**443.930.000**	**99,99**		
12.10.1	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**15.868.000**	**15.868.000**	**100,00**		
12.10.1.1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	15.868.000	15.868.000	100,00		
12.10.2	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**33.558.000**	**33.558.000**	**100,00**		
12.10.2.1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	33.558.000	33.558.000	100,00		
12.10.3	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**378.544.000**	**378.544.000**	**100,00**		
12.10.3.1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	142.650.000	142.650.000	100,00		
12.10.3.2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	235.894.000	235.894.000	100,00		
12.10.4	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**15.987.000**	**15.960.000**	**99,83**		
12.10.4.1	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	15.987.000	15.960.000	99,83		
12.11	**Program perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**34.000.000**	**34.000.000**	**100,00**		
12.11.1	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**34.000.000**	**34.000.000**	**100,00**		
12.11.1.1	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	34.000.000	34.000.000	100,00		
12.12	**Program Perizinan Penggunaan Arsip**					
12.13	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**13.744.461.000**	**13.621.733.720**	**99,11**		
12.13.1	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**700.000.000**	**700.000.000**	**100,00**		
12.13.1.1	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	700.000.000	700.000.000	100,00		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
12.13.2	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**1.624.409.000**	**1.595.379.641**	**98,21**		
12.13.2.1	Pendalaman Tugas DPRD	962.409.000	934.179.641	97,07		
12.13.2.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	200.000.000	199.200.000	99,60		
12.13.2.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	462.000.000	462.000.000	100,00		
12.13.3	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**2.424.000.000**	**2.403.900.000**	**99,17**		
12.13.3.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	324.000.000	303.900.000	93,80		
12.13.3.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	700.000.000	700.000.000	100,00		
12.13.3.3	Pelaksanaan Reses	1.400.000.000	1.400.000.000	100,00		
12.13.4	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**1.254.400.000**	**1.205.700.000**	**96,12**		
12.13.4.1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.254.400.000	1.205.700.000	96,12		
12.13.5	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**7.741.652.000**	**7.716.754.079**	**99,68**		
12.13.5.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.344.062.000	7.338.369.015	99,92		
12.13.5.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	62.550.000	62.550.000	100,00		
12.13.5.3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	335.040.000	315.835.064	94,27		
Sasaran 13 : Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN		**7.749.523.875**	**7.030.020.837**	**90,72**	**225,00**	**108,70**
13.1	**Program Kepegawaian Daerah**	**5.586.323.875**	**4.866.820.837**	**87,12**		
13.1.1	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**4.938.370.075**	**4.283.253.289**	**86,73**		
13.1.1.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	958.886.800	895.277.725	93,37		
13.1.1.2	Pengelolaan Data Kepegawaian	5.550.000	5.500.000	99,10		
13.1.1.3	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.770.497.715	1.264.502.151	71,42		
13.1.1.4	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.091.080.000	2.058.407.463	98,44		
13.1.1.5	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	112.355.560	59.565.950	53,02		
13.1.2	**Mutasi dan Promosi ASN**	**106.535.000**	**80.436.150**	**75,50**		
13.1.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	1.057.000	-	-		
13.1.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	105.478.000	80.436.150	76,26		
13.1.3	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**541.418.800**	**503.131.398**	**92,93**		
13.1.3.1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	104.442.000	104.442.000	100,00		
13.1.3.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	117.381.680	115.423.591	98,33		
13.1.3.3	Pembinaan Disiplin ASN	188.073.000	154.256.818	82,02		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
13.1.3.4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	131.522.120	129.008.989	98,09		
13.2	**Program pengembangan Sumber Daya Manusia**	**2.163.200.000**	**2.163.200.000**	**100,00**		
13.2.1	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**2.163.200.000**	**2.163.200.000**	**100,00**		
13.2.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2.163.200.000	2.163.200.000	100,00		
Sasaran 14 : Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa		**5.718.238.567**	**5.483.846.950**	**95,90**	**0,68**	**110,26**
14.1	**Program Penataan Desa**	**944.973.167**	**714.394.550**	**75,60**		
14.1.1	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**944.973.167**	**714.394.550**	**75,60**		
14.1.1.1	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	944.973.167	714.394.550	75,60		
14.2	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**1.300.000.000**	**1.300.000.000**	**100,00**		
14.2.1	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**1.300.000.000**	**1.300.000.000**	**100,00**		
14.2.1.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1.300.000.000	1.300.000.000	100,00		
14.3	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**1.381.398.000**	**1.381.398.000**	**100,00**		
14.3.1	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**1.381.398.000**	**1.381.398.000**	**100,00**		
14.3.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	81.075.000	81.075.000	100,00		
14.3.1.2	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	411.244.000	411.244.000	100,00		
14.3.1.3	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	142.763.000	142.763.000	100,00		
14.3.1.4	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	746.316.000	746.316.000	100,00		
14.4	**Program Pemberdyaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**2.091.867.400**	**2.088.054.400**	**99,82**		
14.4.1	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2.091.867.400**	**2.088.054.400**	**99,82**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
14.4.1.1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100.064.000	100.064.000	100,00		
14.4.1.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	41.358.000	41.358.000	100,00		
14.4.1.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	293.642.000	293.642.000	100,00		
14.4.1.4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.656.803.400	1.652.990.400	99,77		
Sasaran 15 : Terjaganya kualitas Pemanfaatan dan Pengndalian Pemanfaatan Ruang		**2.941.308.000**	**2.568.683.050**	**87,33**	**70,56**	**98,47**
15.1	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**2.941.308.000**	**2.568.683.050**	**87,33**		
15.1.1	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**2.941.308.000**	**2.568.683.050**	**87,33**		
15.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	2.941.308.000	2.568.683.050			
15.2	**Program Pembangunan Tanah**	**-**	**-**	**-**		
Sasaran 16 : Menurunnya Tingkat Pencemaran Air dan Udara		**39.718.007.714**	**27.974.443.300**	**70,43**	**35,05**	**100,26**
16.1	**Program perencanaan Lingkungan Hidup**	**250.845.000**	**250.845.000**	**100,00**		
16.1.1	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**221.488.000**	**221.488.000**	**100,00**		
16.1.1.1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	221.488.000	221.488.000	100,00		
16.1.2	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**29.357.000**	**29.357.000**	**100,00**		
16.1.2.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	13.565.000	13.565.000	100,00		
16.1.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	15.792.000	15.792.000	100,00		
16.2	**Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Keruksakan Lingkungan Hidup**	**356.469.000**	**356.424.000**	**99,99**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
16.2.1	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**160.588.000**	**160.588.000**	**100,00**		
16.2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	15.659.000	15.659.000	100,00		
16.2.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	14.974.000	14.974.000	100,00		
16.2.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	129.955.000	129.955.000	100,00		
16.2.2	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**44.492.000**	**44.492.000**	**100,00**		
16.2.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	8.652.000	8.652.000	100,00		
16.2.2.2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	7.190.000	7.190.000	100,00		
16.2.2.3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	28.650.000	28.650.000	100,00		
16.2.3	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**151.389.000**	**151.344.000**	**99,97**		
16.2.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	24.885.000	24.840.000	99,82		
16.2.3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	30.120.000	30.120.000	100,00		
16.2.3.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	36.144.000	36.144.000	100,00		
16.2.3.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	60.240.000	60.240.000	100,00		
16.3	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**38.924.816.714**	**27.194.507.300**	**69,86**		
16.3.1	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**38.924.816.714**	**27.194.507.300**	**69,86**		
16.3.1.1	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	33.323.000	33.323.000	100,00		
16.3.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	38.841.889.714	27.117.180.300	69,81		
16.3.1.3	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	9.468.000	9.468.000	100,00		
16.3.1.4	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	13.936.000	13.936.000	100,00		
16.3.1.5	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	26.200.000	20.600.000	78,63		
16.4	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**87.965.000**	**81.465.000**	**92,61**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
16.4.1	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**38.293.000**	**38.293.000**	**100,00**		
16.4.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.368.000	10.368.000	100,00		
16.4.1.2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	27.925.000	27.925.000	100,00		
16.4.2	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**49.672.000**	**43.172.000**	**86,91**		
16.4.2.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	24.665.000	18.165.000	73,65		
16.4.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	25.007.000	25.007.000	100,00		
16.5	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lngkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH)**	**50.135.000**	**43.425.000**	**86,62**		
16.5.1	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**50.135.000**	**43.425.000**	**86,62**		
16.5.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	13.255.000	13.255.000	100,00		
16.5.1.2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	12.384.000	12.384.000	100,00		
16.5.1.3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.420.000	6.710.000	50,00		
16.5.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	11.076.000	11.076.000	100,00		
16.6	**Program peningkatan pendidikan, Pelatihan danPenyuluhan Lingkungan Hidupo untuk Masyarakat**	**63.280.000**	**50.280.000**	**79,46**		
16.6.1	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**63.280.000**	**50.280.000**	**79,46**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
16.6.1.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	24.665.000	18.165.000	73,65		
16.6.1.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	15.315.000	15.315.000	100,00		
16.6.1.3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	23.300.000	16.800.000	72,10		
16.7	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**18.420.000**	**18.420.000**	**100,00**		
16.7.1	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**18.420.000**	**18.420.000**	**100,00**		
16.7.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	18.420.000	18.420.000	100,00		
16.8	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**29.357.000**	**29.357.000**			
16.8.1	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**29.357.000**	**29.357.000**	**100,00**		
16.8.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	13.565.000	13.565.000	100,00		
16.8.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	15.792.000	15.792.000	100,00		
16.9	**Program Pengelolaan Persampahan**	**1.266.186.620**	**1.229.779.000**	**97,12**		
16.9.1	**Pengelolaan Sampah**	**1.022.210.620**	**985.803.000**	**96,44**		
16.9.1.1	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	16.214.000	16.214.000	100,00		
16.9.1.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	11.498.000	4.398.000	38,25		
16.9.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	16.291.000	16.291.000	100,00		
16.9.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	978.207.620	948.900.000	97,00		
16.9.2	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	**243.976.000**	**243.976.000**	**100,00**		
16.9.2.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	13.936.000	13.936.000	100,00		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
16.9.2.2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	15.971.000	15.971.000	100,00		
16.9.2.3	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	214.069.000	214.069.000	100,00		
Sasaran 17 : Terwujudnya Tata Keloa dan Manajemen Bencana		**150.596.230.124**	**131.554.704.634**	**87,36**	**163,73**	**98,59**
17.1	**Program Penanggulangan Bencana**	**141.527.477.722**	**122.497.447.734**	**86,55**		
17.1.1	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**141.527.477.722**	**122.497.447.734**	**86,55**		
17.1.1.1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	88.420.000	88.420.000	100,00		
17.1.1.2	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1.530.048.800	1.420.043.810	92,81		
17.1.1.3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	83.994.309.850	79.524.711.471	94,68		
17.1.1.4	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	79.170.000	50.000.000	63,16		
17.1.1.5	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100,00		
17.1.1.6	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	190.800.000	184.770.533	96,84		
17.1.1.7	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	55.594.729.072	41.179.501.920	74,07		
17.2	**Program Pencegahan, Penanguulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**1.586.030.000**	**1.584.275.000**	**99,89**		
17.2.1	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**478.730.000**	**478.125.000**	**99,87**		
17.2.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.125.000	9.975.000	98,52		
17.2.1.2	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	6.750.000	6.400.000	94,81		
17.2.1.3	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100,00		
17.2.1.4	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	215.700.000	215.700.000	100,00		
17.2.1.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	51.155.000	51.050.000	99,79		
17.2.1.6	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	50.000.000	50.000.000	100,00		
17.2.1.7	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	95.000.000	95.000.000	100,00		
17.2.2	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**474.600.000**	**474.600.000**	**100,00**		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
17.2.2.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	43.200.000	43.200.000	100,00		
17.2.2.2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	431.400.000	431.400.000	100,00		
17.2.3	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**39.480.000**	**39.480.000**	**100,00**		
17.2.3.1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	39.480.000	39.480.000	100,00		
17.2.4	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**86.280.000**	**86.280.000**	**100,00**		
17.2.4.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	43.140.000	43.140.000	100,00		
17.2.4.2	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	43.140.000	43.140.000	100,00		
17.2.5	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**506.940.000**	**505.790.000**	**99,77**		
17.2.5.1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	32.400.000	31.250.000	96,45		
17.2.5.2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	431.400.000	431.400.000	100,00		
17.2.5.3	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	43.140.000	43.140.000	100,00		
17.3	**Progeram Peningkatan Ketentraman dan Keteriban Umum**	**2.648.507.503**	**2.642.397.000**	**99,77**		
17.3.1	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**2.202.264.503**	**2.200.303.000**	**99,91**		
17.3.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	397.921.503	397.859.000	99,98		
17.3.1.2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	49.340.000	49.299.000	99,92		
17.3.1.3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	400.299.000	400.085.000	99,95		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
17.3.1.4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	12.039.000	11.814.000	98,13		
17.3.1.5	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	249.609.000	249.609.000	100,00		
17.3.1.6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.093.056.000	1.091.637.000	99,87		
17.3.4	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**117.210.000**	**115.079.000**	**98,18**		
17.3.4.1	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	19.880.000	19.880.000	100,00		
17.3.4.2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	97.330.000	95.199.000	97,81		
17.3.3	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**329.033.000**	**327.015.000**	**99,39**		
17.3.3.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	329.033.000	327.015.000	99,39		
17.4	**Program Penanganan Bencana**	**4.834.214.900**	**4.830.584.900**	**99,92**		
17.4.1	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**4.499.034.900**	**4.499.034.900**	**100,00**		
17.4.1.1	Penyediaan Makanan	4.499.034.900	4.499.034.900	100,00		
17.4.2	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**335.180.000**	**331.550.000**	**98,92**		
17.4.2.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	335.180.000	331.550.000	98,92		
Sasaran 18 : Meningkatnya Intensitas Event Seni Budaya Yang Diselenggarakan		**6.070.651.000**	**5.802.469.000**	**95,58**	**34,67**	**111,32**
18.1	**Prorgam Pengembangan Kebudayaan**	**6.070.651.000**	**5.802.469.000**	**95,58**		
18.1.1	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**6.070.651.000**	**5.802.469.000**	**95,58**		
18.1.1.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	5.952.523.000	5.686.469.000	95,53		
18.1.1.2	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	118.128.000	116.000.000	98,20		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
18.2	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**-**	**-**	**-**		
18.3	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**-**	**-**	**-**		
Sasaran 19 : Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial		**30.288.064.500**	**28.683.874.100**	**94,70**	**100,00**	**100,00**
19.1	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**1.203.019.000**	**1.202.356.800**	**99,94**		
19.1.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**1.203.019.000**	**1.202.356.800**	**99,94**		
19.1.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.083.779.000	1.083.116.900	99,94		
19.1.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	119.240.000	119.239.900	100,00		
19.2	**Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lemabga Pendidkan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Poltik**	**28.031.550.500**	**26.428.022.300**	**94,28**		
19.2.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**28.031.550.500**	**26.428.022.300**	**94,28**		
19.2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	112.370.000	112.370.000	100,00		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
19.2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	27.866.158.500	26.262.630.300	94,25		
19.2.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	53.022.000	53.022.000	100,00		
19.3	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**163.748.000**	**161.498.000**	**98,63**		
19.3.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**163.748.000**	**161.498.000**	**98,63**		
19.3.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	129.248.000	126.998.000			
19.3.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	34.500.000	34.500.000			
19.4	**Progrma Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi , Sosial dan Budaya**	**340.078.000**	**340.078.000**	**100,00**		
19.4.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**340.078.000**	**340.078.000**	**100,00**		
19.4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	184.200.000	184.200.000	100,00		
19.4.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	109.925.000	109.925.000	100,00		

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI Kinerja 2023	
		APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	Kinerja	Capaian
19.4.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	45.953.000	45.953.000	100,00		
19.5	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**713.417.000**	**713.417.000**	**100,00**		
19.5.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**713.417.000**	**713.417.000**	**100,00**		
19.5.1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	504.000.000	504.000.000	100,00		
19.5.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	111.865.000	111.865.000	100,00		
19.5.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	97.552.000	97.552.000	100,00		
JUMLAH		**1.247.776.798.797**	**997.860.812.377**	**79,97**	**80,40**	**105,13**

LAMPIRAN 4

SOP
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH DAERAH KAB. KONAWE UTARA SEKRETARIAT DAERAH	Nomor SOP	**37 / SOP-Bagor / 2020**
	Tanggal Pembuatan	**23 November 2020**
	Tanggal Refisi	-
	Tanggal Pengesahan	**25 Januari 2021**
	Disahkan oleh	**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**
	Nama SOP:	**Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**
	Kualifikasi Pelaksana	

Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Provinsi dan Kabupaten/kota 2. Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemebentukan dan susunan erangakat daerah Kab konawe Utara tanggal 8 Januari 2019 4. Perbub 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kab Konawe Utara	1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja OPD.
Keterkaitanx	**Peralatan/Perlengkapan**
SOP Perjanjian Kinerja	1. Renstra OPD 2. Format Penyusunan LAKIP 3. Dokumen Perjanjian Kinerja 4. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD 5. Laporan realisasi keuangan 6. Perangkat Komputer
Peringatan :	**Pencatatan & Pendataan**
1.Jika tidak sesuai SOP, maka proses penyusnan LAKIP ini tidak berjalan lancar	1. Indikator Kinerja, target realisasi dan presentase capaian kinerja

SOP PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Buku			Ket
		Bupati	Sekretaris Daerah	Tim Reviu	Kabag Organisasi	Kasubag Kinerja dan RB	Bidang LItbang	Bidang Akuntansi	Staf /Jafung Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Out Put	
	Memerintahkan Penyusunan LAKIP		Mulai							Disposisi Surat	10 Menit	Disposisi Surat	
	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari OPD									Format Penyusunan Lakip	2 jam	Format Penyusunan LAKIP	
	Menyampaikan data Capaian Indikator Kinerja Utama									Format Penyusnan Lakip	1 jam	Format penyusunan Lakip	
	Menyampaiakan realisasi Capaian Anggaran									Format Penyusunan Lakip	1 Jam	Format penyusunan LAKIP	
	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing OPD									Format Penyusnan LAKIP	4 Hari	Draf LAKIP	SOP Perjanjian Kinerja
	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja									Format Penyusunan LAKIP	2 hari	Dokumen LAKIP	SOP Perjanjian KInerja
	Membuat Dokumen LAKIP									Draft LAKIP	5 Hari	Dokumen Lakip	SOP Perjanjian Kinerja
	Mengorekasi Dokumen LAKIP									Dokumen Lakip	1 Hari	Dokumen Lakip	
	Mengevaluasi Dokumen LAKIP									Dokumen LAKIP	2 Hari	Dokumen Lakip	

	Menindaklanjuti Laporan Hasil Reviu								Dokumen LAKIP	2 Hari	Dokumen Lakip	
	Menyampaikan Dokumen Lakip kepada Sekretaris Daerah untuk di Paraf								Dokumen LAKIP	1 Jam	Dokumen LAKIP	
	Penandatanganan Dokumen LAKIP kemudian diteruskan ke Kasubag								Dokumen LAKIP	10 Menit	Dokumen LAKIP	Konsep LAKIP
	Membuat Surat Pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirm kealamat yang dituju								Konsep Surat Pengantar	15 Menit	Surat Pengantar	-
	Mengantar Surat, mengganda kan dan mengarsipkan Dokumen LAKIP							Selesai	Dokumen LAKIP	1 Jam	Dokumen LAKIP	-

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H.M KASIM PAGALA, M.Si
Pembina Utama Madya IV/d
NIP 196310101992031002

PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE UTARA

2023
LAKIP
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA



konaweutarakab.go.id